

2024

LAPORAN

KEUANGAN

SEMESTER I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**Periode yang berakhir :
30 JUNI 2024**

www.bkn.go.id

@BKNgoidofficial

@BKNgoid



BAGIAN ANGGARAN 088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

JL. LETJEN SUTOYO NO. 12 CILILITAN - JAKARTA TIMUR
TELP. (021) 8093008

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Negara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 29 Juli 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Telah Direviu	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	47
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	80
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	90
F. Pengungkapan Penting Lainnya	96
VI. Lampiran – Lampiran	
A. Lampiran A1 Daftar Rekening Bendahara Satker BKN	
B. Lampiran A2 Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C. Lampiran A3 Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	
D. Lampiran A4 Daftar Hibah Langsung berupa Barang/Jasa	
E. Lampiran A5 Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	16
Tabel 1.2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 1.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel 2.1	Perubahan Anggaran pada Semester I Tahun Anggaran 2024	20
Tabel 2.2	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	20
Tabel 2.3	Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program	21
Tabel 2.4	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBPNBP	21
Tabel 2.5	Rincian Pendapatan Peralatan dan Mesin per Satker	22
Tabel 2.6	Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per Satker	22
Tabel 2.7	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	23
Tabel 2.8	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	24
Tabel 2.9	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	24
Tabel 2.10	Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPNBP Lainnya	25
Tabel 2.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	25
Tabel 2.12	Rincian Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Program	26
Tabel 2.13	Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	27
Tabel 2.14	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	27
Tabel 2.15	Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satker	28
Tabel 2.16	Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	28
Tabel 2.17	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per Satker	29
Tabel 2.18	Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	29
Tabel 2.19	Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per Satker	30
Tabel 2.20	Perbandingan Realisasi Belanja Lembur	30
Tabel 2.21	Rincian Belanja Lembur per Satker	31
Tabel 2.22	Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	31

Tabel 2.23	Perbandingan Realisasi Belanja Barang	32
Tabel 2.24	Rincian Belanja Barang per Satker	32
Tabel 2.25	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional	33
Tabel 2.26	Rincian Belanja Barang Operasional per Satker	33
Tabel 2.27	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional	34
Tabel 2.28	Rincian Belanja Barang Non Operasional per Satker	34
Tabel 2.29	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan	35
Tabel 2.30	Rincian Belanja Barang Persediaan per Satker	35
Tabel 2.31	Perbandingan Realisasi Belanja Jasa	36
Tabel 2.32	Rincian Belanja Jasa per Satker	36
Tabel 2.33	Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan	37
Tabel 2.34	Rincian Belanja Pemeliharaan per Satker	38
Tabel 2.35	Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	38
Tabel 2.36	Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Satker	39
Tabel 2.37	Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri	39
Tabel 2.38	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	40
Tabel 2.39	Rincian Belanja Modal per Satker	40
Tabel 2.40	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41
Tabel 2.41	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker	41
Tabel 2.42	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42
Tabel 2.43	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker	42
Tabel 2.44	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker	42
Tabel 2.45	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya	43
Tabel 2.46	Rincian Capaian Output Prioritas Nasional	44
Tabel 3.1	Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	47
Tabel 3.2	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker	47
Tabel 3.3	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	48
Tabel 3.4	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker	49
Tabel 3.5	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Di Muka	49

Tabel 3.6	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak	50
Tabel 3.7	Rincian Piutang Bukan Pajak per Satker	50
Tabel 3.8	Rincian Persediaan	51
Tabel 3.9	Rincian Persediaan per Satker	51
Tabel 3.10	Rincian Persediaan Usang per Satker	52
Tabel 3.11	Mutasi Tanah Per 30 Juni 2024	52
Tabel 3.12	Rincian Tanah Per Satker	53
Tabel 3.13	Mutasi Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2024	56
Tabel 3.14	Rincian Realisasi Pembelian Peralatan dan Mesin	56
Tabel 3.15	Rincian Realisasi Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker	57
Tabel 3.16	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin	58
Tabel 3.17	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per Satker	58
Tabel 3.18	Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker	59
Tabel 3.19	Mutasi Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024	60
Tabel 3.20	Rincian Penyelesaian Pembangunan Langsung	60
Tabel 3.21	Rincian Penyelesaian Pembangunan Langsung per Satker	60
Tabel 3.22	Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung	61
Tabel 3.23	Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung per Satker	61
Tabel 3.24	Rincian Gedung dan Bangunan per Satker	62
Tabel 3.25	Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024	63
Tabel 3.26	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satker	63
Tabel 3.27	Mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024	64
Tabel 3.28	Rincian Aset Tetap Lainnya	64
Tabel 3.29	Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker	66
Tabel 3.30	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024	67
Tabel 3.31	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Satker	68
Tabel 3.32	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	68
Tabel 3.33	Mutasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024	69
Tabel 3.34	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud	70

Tabel 3.35	Rincian Aset Tak Berwujud per Satker	70
Tabel 3.36	Mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024	71
Tabel 3.37	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Satker	71
Tabel 3.38	Mutasi Aset Lain-Lain per 30 Juni 2024	72
Tabel 3.39	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	72
Tabel 3.40	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker	73
Tabel 3.41	Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan	73
Tabel 3.42	Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan per Satker	73
Tabel 3.43	Rincian Aset Lain-Lain per Satker	74
Tabel 3.44	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	74
Tabel 3.45	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	75
Tabel 3.46	Rincian Belanja Pegawai yang masih Harus Dibayar per Satker	75
Tabel 3.47	Rincian Belanja Barang yang masih Harus Dibayar per Satker	76
Tabel 3.48	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per Satker	76
Tabel 3.49	Rincian Utang yang Belum Ditagihkan per Satker	77
Tabel 3.50	Perbandingan Pendapatan Diterima Di Muka	78
Tabel 3.51	Perbandingan Uang Muka dari KPPN	78
Tabel 3.52	Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya	79
Tabel 4.1	Perbandingan Rincian PNBPN	80
Tabel 4.2	Rincian Pendapatan Operasional per Satker	80
Tabel 4.3	Perbandingan Rincian Beban Pegawai	81
Tabel 4.4	Rincian Beban Pegawai per Satker	81
Tabel 4.5	Perbandingan Rincian Beban Persediaan	82
Tabel 4.6	Rincian Beban Persediaan per Satker	82
Tabel 4.7	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa	83
Tabel 4.8	Rincian Beban Barang dan Jasa per Satker	83
Tabel 4.9	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan	84
Tabel 4.10	Rincian Beban Pemeliharaan per Satker	84
Tabel 4.11	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas	85
Tabel 4.12	Rincian Beban Perjalanan Dinas per Satker	85

Tabel 4.13	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	86
Tabel 4.14	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	87
Tabel 4.15	Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional	87
Tabel 4.16	Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per Satker	88
Tabel 4.17	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Satker	88
Tabel 4.18	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	88
Tabel 4.19	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	89
Tabel 5.1	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	90
Tabel 5.2	Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	91
Tabel 5.3	Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per Satker	93
Tabel 5.4	Rincian Transaksi Antar Entitas	93
Tabel 5.5	Rincian Transfer Keluar per Satker	94
Tabel 5.6	Rincian Transfer Masuk per Satker	94
Tabel 6.1	Rincian MoU Pinjam Pakai Sejak Tahun 2015	108
Tabel 6.1	Rincian Kepemilikan UPT sampai dengan Tahun 2023	110
Tabel 6.2	Perbandingan Rincian Pencatatan Aset dengan Dokumen Sumber dan Cek Fisik di Lapangan	111
Tabel 6.3	Rincian Nilai Koreksi Lain-Lain per Satker	103

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara untuk Semester I Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Kepegawaian Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 29 Juli 2024
Inspektur Badan Kepegawaian Negara

 Ditandatangani Secara Elektronik
Dedi Herdi



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 29 Juli 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



The image shows a circular official stamp of the Badan Kepegawaian Negara (BKN) of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom, with a central emblem. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'Harvomo Dwi Putranto' is printed below it.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Semester I Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp13.801.169.897,00 atau mencapai 73,87 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp18.684.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp329.253.371.693,00 atau mencapai 42,01 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp783.765.194.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.254.820.523.311,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp9.525.665.570,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.234.631.147.581,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp10.663.710.160,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp77.272.697.793,00 dan Rp3.177.547.825.518,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp11.812.386.821,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp357.060.892.920,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp345.248.506.099,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp522.287.325,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp345.770.793.424,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp3.208.549.866.357,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp345.770.793.424,00, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp1.596.978.911,00) dan ditambah transaksi antar entitas senilai Rp316.365.731.496,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp3.177.547.825.518,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 204 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	30 JUNI 2024		% thd Angg	30 JUNI 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
I	Pendapatan Perpajakan	-	-	0.00	-
	1. Pajak Dalam Negeri	-	-	0.00	-
	2. Pajak Perdagangan Internasional	-	-	0.00	-
II	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,684,000,000.00	13,801,169,897.00	73.87	14,198,775,177.00
	1. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	0.00	-
	2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	-	-	0.00	-
	3. Pendapatan BLU	-	-	0.00	-
	4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,684,000,000.00	13,801,169,897.00	73.87	14,198,775,177.00
III	Pendapatan Hibah	-	-	0.00	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		18,684,000,000.00	13,801,169,897.00	73.87	14,198,775,177.00
B	BELANJA NEGARA				
I	Belanja Pemerintah Pusat	783,765,194,000.00	329,253,371,693.00	42.01	305,632,784,066.00
	1. Belanja Pegawai	397,463,752,000.00	194,290,916,221.00	48.88	174,954,293,708.00
	2. Belanja Barang	202,613,488,000.00	79,197,733,415.00	39.09	113,975,142,319.00
	3. Belanja Modal	183,687,954,000.00	55,764,722,057.00	30.36	16,703,348,039.00
	4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	0.00	-
	5. Belanja Subsidi	-	-	0.00	-
	6. Belanja Hibah	-	-	0.00	-
	7. Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00	-
	8. Belanja Lain-lain	-	-	0.00	-
II	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	-	0.00	-
	1. Transfer ke Daerah	-	-	0.00	-
	a. Dana Perimbangan	-	-	0.00	-
	1. Dana Transfer Umum	-	-	0.00	-
	a. Dana Bagi Hasil	-	-	0.00	-
	b. Dana Alokasi Umum	-	-	0.00	-
	2. Dana Transfer Khusus	-	-	0.00	-
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	0.00	-
	b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	0.00	-

URAIAN	CAT	30 JUNI 2024		% thd Angg	30 JUNI 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
b. Dana Insentif Daerah		-	-	0.00	-
c. Dana Keistimewaan DIY		-	-	0.00	-
d. Dana Otonomi Khusus		-	-	0.00	-
2. Dana Desa		-	-	0.00	-
3. Hibah Kepada Daerah		-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA NEGARA		783,765,194,000.00	329,253,371,693.00	42.01	305,632,784,066.00
C PEMBIAYAAN		-	-	0.00	-

Jakarta, 29 Juli 2024
 Pdt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	2,300,000,000.00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	114,490,399.00	4,587,816.00
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.4	-	131,199,742.00
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	(850,000.00)	-
Piutang Bukan Pajak	C.6	16,894,305.00	2,747,393,181.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	-	(13,736,966.00)
Persediaan	C.8	7,095,120,866.00	7,106,175,160.00
Persediaan yang Belum Diregister	C.9	10,000.00	-
JUMLAH ASET LANCAR		9,525,665,570.00	9,975,618,933.00
ASET TETAP			
Tanah	C.10	2,331,580,054,368.00	2,330,666,524,668.00
Peralatan dan Mesin	C.11	774,657,579,537.00	704,398,035,892.00
Gedung dan Bangunan	C.12	870,549,881,368.00	868,849,348,970.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	24,716,999,940.00	24,716,999,940.00
Aset Tetap Lainnya	C.14	13,253,848,057.00	13,874,987,099.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	9,099,203,348.00	168,877,064.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(789,226,419,037.00)	(746,282,602,430.00)
JUMLAH ASET TETAP		3,234,631,147,581.00	3,196,392,171,203.00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.17	135,615,931,787.00	125,741,319,487.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.18	-	21,071,862,270.00
Aset Lain-Lain	C.19	28,056,844,713.00	21,362,783,827.00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.20	(153,009,066,340.00)	(145,268,566,532.00)
JUMLAH ASET LAINNYA		10,663,710,160.00	22,907,399,052.00
JUMLAH ASET		3,254,820,523,311.00	3,229,275,189,188.00

URAIAN	CAT	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.21	71,887,956,943.00	19,629,558,217.00
Utang yang Belum Ditagihkan	C.22	3,084,057,850.00	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.23	-	1,091,528,298.00
Uang Muka dari KPPN	C.24	2,300,000,000.00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	683,000.00	4,236,316.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		77,272,697,793.00	20,725,322,831.00
JUMLAH KEWAJIBAN		77,272,697,793.00	20,725,322,831.00
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	3,177,547,825,518.00	3,208,549,866,357.00
JUMLAH EKUITAS		3,177,547,825,518.00	3,208,549,866,357.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,254,820,523,311.00	3,229,275,189,188.00

Jakarta, 29 Juli 2024

Dit. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Daryono Dwi Putranto

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	11,812,386,821.00	12,953,571,211.00
JUMLAH PENDAPATAN		11,812,386,821.00	12,953,571,211.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	219,655,965,595.00	198,111,463,150.00
Beban Persediaan	D.3	2,809,009,678.00	3,631,281,899.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	49,008,644,176.00	81,237,444,589.00
Beban Pemeliharaan	D.5	9,898,206,906.00	9,926,279,455.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	23,669,063,183.00	31,708,838,403.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	52,033,740,348.00	35,690,443,921.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(13,736,966.00)	6,760.00
JUMLAH BEBAN		357,060,892,920.00	360,305,758,177.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(345,248,506,099.00)	(347,352,186,966.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	D.9	(514,195,653.00)	264,326,374.00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(8,091,672.00)	1,748,821,511.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(522,287,325.00)	2,013,147,885.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(345,770,793,424.00)	(345,339,039,081.00)

URAIAN	CAT	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(345,770,793,424.00)	(345,339,039,081.00)

Jakarta, 29 Juli 2024
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Harsono Dwi Putranto

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
EKUITAS AWAL	E.1	3,208,549,866,357.00	3,173,325,597,443.00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(345,770,793,424.00)	(345,339,039,081.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.4	(1,596,978,911.00)	(750,702,663.00)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.4.3	-	(4,440,000.00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	(1,596,978,911.00)	(769,461,115.00)
Lain-Lain	E.4.6	-	23,198,452.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	316,365,731,496.00	293,021,456,023.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(31,002,040,839.00)	(53,068,285,721.00)
EKUITAS AKHIR	E.6	<b style="text-align: right;">3,177,547,825,518.00	<b style="text-align: right;">3,120,257,311,722.00

Jakarta, 29 Juli 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Harsono Dwi Putranto

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BKN bertugas untuk melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Manajemen Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, BKN berkomitmen dengan visi “**Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, BKN memiliki 5 (lima) pilar yang menjadi misi BKN yakni meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN, dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 26 ayat 2 menyebutkan BKN melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian Negara, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian, BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
2. Penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
3. Penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
4. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
5. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;

6. Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. Penyelenggaraan dan mengembangkan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
8. Penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
9. Pelaksanaan bantuan hukum;
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
11. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh BKN sebagai berikut:

1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN dalam bentuk:
 - a. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Mengimplementasikan Manajemen ASN Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) (minimal bernilai A dan B).
 - b. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima dalam bentuk:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan BKN.
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN dalam bentuk Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN dalam bentuk Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi (SI) ASN.
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN dalam bentuk Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN dalam bentuk Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti.
7. Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam bentuk:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN BKN,
 - b. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BKN,
 - c. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN,
 - d. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN, dan

e. Opini atas Laporan Keuangan BKN.

Adapun beberapa kebijakan teknis yang telah dibuat Kepala BKN pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
3. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara.
4. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Verifikasi Nomor Induk Kependudukan Dengan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara.
5. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga.
6. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi Dalam Rangka Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 57.3 Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BKN Semester I Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BKN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) berfungsi untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang menginformasikan terkait data aset dan persediaan. SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan BKN Semester I Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan BKN Tahun Anggaran 2024 ini memperoleh anggaran belanja yang berasal dari APBN sebesar sebesar Rp783.765.194.000,00 meliputi:

1. Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp572.393.714.000,00;
2. Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp211.371.480.000,00.

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup BKN adalah 16 (enam belas) satker yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN;
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kantor Regional II BKN Surabaya;
4. Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Kantor Regional IV BKN Makassar;
6. Kantor Regional V BKN Jakarta;
7. Kantor Regional VI BKN Medan;
8. Kantor Regional VII BKN Palembang;
9. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
10. Kantor Regional IX BKN Jayapura;
11. Kantor Regional X BKN Denpasar;
12. Kantor Regional XI BKN Manado;
13. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
14. Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh;
15. Kantor Regional XIV BKN Manokwari; dan
16. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Pusbangpeg ASN).

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BKN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan LRA disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BKN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada SAP serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BKN adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA **1. Pendapatan- LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **2. Pendapatan- LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BKN adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lainnya diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas/umur piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat menggunakan metode pencatatan *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Pada akhir tahun periode pelaporan nilai persediaan disajikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1) Tanah.
- 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- 1) ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 2) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 3) Dana yang dibatasi penggunaannya, merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan dan disajikan sebesar dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan pada batas akhir pengajuan tagihan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam LPE.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BKN telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Anggaran pada Semester I Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	SEMESTER I TA 2024		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,684,000,000.00	18,684,000,000.00	-
Penerimaan Hibah	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	18,684,000,000.00	18,684,000,000.00	-
BELANJA NEGARA			
Belanja Pemerintah Pusat	783,765,194,000.00	783,765,194,000.00	-
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	-	-
JUMLAH BELANJA NEGARA	783,765,194,000.00	783,765,194,000.00	-
PEMBIAYAAN			
JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu Belanja Barang sebesar Rp1.875.858.000,00 terdiri atas penurunan pada anggaran Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Persediaan dan Belanja Pemeliharaan. Penurunan atas Belanja Pemerintah Pusat tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Adapun rincian perubahan anggaran berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SEMESTER I TA 2024		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	
Belanja Pegawai	397,463,752,000.00	397,463,752,000.00	-
Belanja Barang	204,489,346,000.00	202,613,488,000.00	(1,875,858,000.00)
Belanja Modal	181,812,096,000.00	183,687,954,000.00	1,875,858,000.00
Total Belanja	783,765,194,000.00	783,765,194,000.00	-

Sedangkan apabila dilihat dari program BKN maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	SEMESTER I TA 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	43,561,432,000.00	43,537,870,000.00
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	666,248,856,000.00	666,272,418,000.00
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	10,703,907,000.00	11,519,448,000.00
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	2,646,429,000.00	1,830,888,000.00
Program Dukungan Manajemen (SBSN)	60,604,570,000.00	60,604,570,000.00
Total Belanja	783,765,194,000.00	783,765,194,000.00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp13.801.169.897,-

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak BKN berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Pendapatan PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp13.801.169.897,00 atau mencapai 73,87% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.684.000.000,00. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SEMESTER I TA 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	1,270,760,000.00	500,145,182.00	39.36
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	199,620,000.00	100,300,000.00	50.25
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	17,213,620,000.00	10,183,970,000.00	59.16
Pendapatan Denda	-	155,775,002.00	0.00
Pendapatan Lain - lain	-	2,860,979,713.00	0.00
Jumlah	18,684,000,000.00	13,801,169,897.00	73.87

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp13.801.169.897,00 berasal dari:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp500.145.182,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp88.199.500,00 yang berasal dari:

Tabel 2.5 Rincian Pendapatan Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional III BKN Bandung	55,656,000.00
2	Kantor Regional VI BKN Medan	32,543,500.00
	Jumlah	88,199,500.00

- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp23.889.889,00 yang berasal dari Kantor Regional XI BKN Manado berupa 1 Paket Barang Inventaris Kantor yang terdiri dari Alat Rumah Tangga Lainnya, *Notebook*, PC Unit, Printer dan lain-lain.
 - c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp388.055.793,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan rumah negara, rumah dinas pegawai, maupun ruangan kantor yang berasal dari:

Tabel 2.6 Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	238,892,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	12,831,600.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	3,931,948.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	4,687,980.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	2,893,164.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	580,025.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	16,099,140.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	11,774,556.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	7,903,586.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	19,471,800.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	15,819,256.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1,283,150.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	46,650,744.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	5,236,844.00
	Jumlah	388,055,793.00

2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp100.300.000,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN yang berasal dari pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya.
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp10.183.970.000,00 yang berasal dari:
 - a. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN berupa Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp1.125.485.000,00; dan
 - b. Kantor Pusat BKN berupa Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp9.058.485.000,00.
4. Pendapatan Denda sebesar Rp155.775.002,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN berupa:
 - a. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan untuk pengadaan *Walkthrough/ Portal Metal Detector* sebesar Rp31.638.425,00; dan
 - b. Pendapatan atas Denda Wanprestasi Pekerjaan pekerjaan jasa dukungan sarpras seleksi CASN sebesar Rp124.136.577,00.
5. Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp2.860.979.713,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp318.432.575,00 yang berasal dari:

Tabel 2.7 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	276,991,061.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,368,204.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	366,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,269.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	5,103,150.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,455,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1,191,200.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	35,150.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	14,052,447.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	3,786,674.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	190,000.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1,295,200.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,822,100.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	9,056,370.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,718,750.00
	Jumlah	318,432,575.00

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp2.291.293.461,00 yang berasal dari:

Tabel 2.8 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	39,789,249.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,600,000.00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	2,029,362,829.00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	785,500.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	208,800.00
6	Kantor Regional VII BKN Palembang	1,118,345.00
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	17,513,986.00
8	Kantor Regional IX BKN Jayapura	95,352,952.00
9	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	21,789,488.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	30,799,200.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	25,824,562.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,212,859.00
13	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	23,935,691.00
Jumlah		2,291,293,461.00

- c. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL Sebesar 249.953.677,00 yang berasal dari:

Tabel 2.9 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	190,596,980.00
2	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	13,884,755.00
3	Kantor Regional XI BKN Manado	16,318,400.00
4	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	29,153,542.00
Jumlah		249,953,677.00

- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Pensiunan PNS sebesar Rp450.000,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN.
- e. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp850.000,00 yang berasal dari Kantor Regional V BKN Jakarta.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Semester I TA 2024 dibandingkan dengan Semester I TA 2023 terdapat penurunan sebesar 2,80% dikarenakan terdapat penurunan pendapatan pada Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha sebesar 16,55%, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar 32,90%, dan Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebesar 11,65%.

Tabel 2.10 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	500,145,182.00	599,308,036.00	(16.55)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	100,300,000.00	149,475,000.00	(32.90)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	10,183,970,000.00	11,527,056,000.00	(11.65)
Pendapatan Denda	155,775,002.00	17,412,166.00	0.00
Pendapatan Lain - lain	2,860,979,713.00	1,905,523,975.00	50.14
Jumlah	13,801,169,897.00	14,198,775,177.00	(2.80)

Realisasi Belanja
Rp329.253.371.693,-

B.2 Belanja Pemerintah Pusat

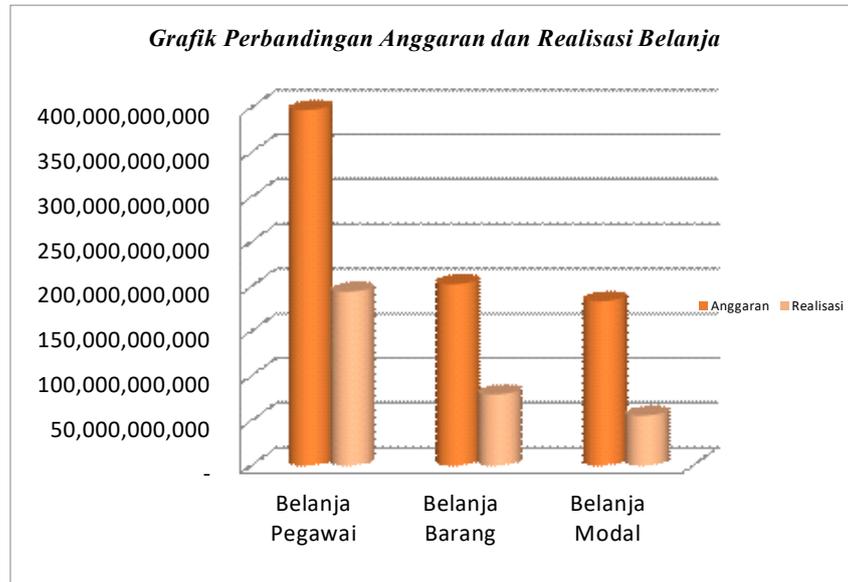
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat BKN pada Semester I TA 2024 sebesar Rp329.253.371.693,00 atau 42,01% dari anggaran belanja sebesar Rp783.765.194.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pemerintah pusat pada Semester I TA 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SEMESTER I TA 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Belanja Pegawai	397,463,752,000.00	194,335,786,749.00	48.89
Belanja Barang	202,613,488,000.00	79,495,288,715.00	39.23
Belanja Modal	183,687,954,000.00	55,764,722,057.00	30.36
Jumlah Belanja Kotor	783,765,194,000.00	329,595,797,521.00	42.05
Pengembalian	-	(342,425,828.00)	
Jumlah	783,765,194,000.00	329,253,371,693.00	42.01

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan program pada Semester I TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rincian Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Program
(Dalam Rupiah)

PROGRAM	SEMESTER I TA 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	43,537,870,000.00	15,073,597,771.00	34.62
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	666,272,418,000.00	301,880,284,492.00	45.31
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	11,519,448,000.00	2,798,957,016.00	24.30
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	1,830,888,000.00	781,734,980.00	42.70
Program Dukungan Manajemen (SBSN)	60,604,570,000.00	8,718,797,434.00	14.39
Total Belanja	783,765,194,000.00	329,253,371,693.00	42.01

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,73% dibandingkan Semester I TA 2023. Kenaikan realisasi belanja yang sangat signifikan terdapat pada Belanja Barang sebesar 11,05% dan Belanja Modal sebesar 233,85%. Hal ini dikarenakan pada tahun ini, BKN mendapatkan anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pekerjaan pembangunan Gedung Kantor UPT Gorontalo dan UPT Mataram.

Tabel 2.13 Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	194,290,916,221.00	174,954,293,708.00	11.05
Belanja Barang	79,197,733,415.00	113,975,142,319.00	(30.51)
Belanja Modal	55,764,722,057.00	16,703,348,039.00	233.85
Jumlah	329,253,371,693.00	305,632,784,066.00	7.73

Belanja Pegawai
Rp194.290.916.221,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp194.290.916.221,00 dan Rp174.954.293.708,00 atau terjadi kenaikan sebesar 11,05%. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai disebabkan adanya kenaikan yang cukup tinggi terhadap Realisasi Belanja Lembur sebesar 43,31%, dan seiring dengan penambahan pegawai BKN.

Tabel 2.14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	95,415,284,083.00	94,387,197,710.00	1.09
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3,239,475,095.00	-	0.00
5122	Belanja Lembur	527,329,000.00	367,963,000.00	43.31
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Pegawai Transito	95,153,698,571.00	80,432,261,748.00	18.30
	Jumlah Belanja Kotor	194,335,786,749.00	175,187,422,458.00	10.93
	Pengembalian Belanja Pegawai	(44,870,528.00)	(233,128,750.00)	
	Jumlah Belanja	194,290,916,221.00	174,954,293,708.00	11.05

Adapun Rincian Realisasi Belanja Pegawai BKN Semester I TA 2024 sebesar Rp194.290.916.221,00 berasal dari:

Tabel 2.15 Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	135,883,172,054.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	6,178,251,517.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	4,470,865,445.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	5,085,234,043.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	5,679,565,822.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	3,463,273,487.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	4,244,427,415.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3,938,544,957.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	4,374,249,626.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2,882,609,011.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	3,843,751,456.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2,888,902,493.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	4,119,008,613.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	2,503,602,895.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,419,972,177.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,315,485,210.00
Jumlah		194,290,916,221.00

Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp95.370.414.311,-

B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp95.370.414.311,00 dan Rp94.195.649.757,00 atau terjadi kenaikan sebesar 1,25%.

Tabel 2.16 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	66,779,177,330.00	65,061,018,340.00	2.64
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,077,727.00	1,092,450.00	(1.35)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,232,715,460.00	4,085,921,318.00	3.59
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,121,017,078.00	1,045,449,534.00	7.23
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,440,360,000.00	2,495,840,000.00	(2.22)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,513,346,000.00	8,966,912,000.00	(5.06)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,289,354,428.00	477,284,708.00	170.14
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,211,806,060.00	3,325,328,360.00	(3.41)
511129	Belanja Uang Makan PNS	6,519,395,000.00	7,284,936,000.00	(10.51)
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	346,825,000.00	347,175,000.00	(0.10)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	960,210,000.00	1,296,240,000.00	(25.92)
Jumlah Belanja Kotor		95,415,284,083.00	94,387,197,710.00	1.09
	Pengembalian Belanja	(44,869,772.00)	(191,547,953.00)	
Jumlah Belanja		95,370,414,311.00	94,195,649,757.00	1.25

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada Semester I TA 2024 sebesar Rp95.370.414.311,00 berasal dari:

Tabel 2.17 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	38,905,335,479.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	5,779,471,475.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	4,378,057,635.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	4,638,400,070.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	5,613,971,822.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	3,299,881,296.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	4,186,008,914.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3,704,841,001.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	4,289,795,960.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2,882,609,011.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	3,733,750,106.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2,833,369,863.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	4,012,493,697.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	2,408,226,879.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,402,930,993.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,301,270,110.00
Jumlah		95,370,414,311.00

Belanja Gaji dan
Tunjangan PPPK
Rp3.239.474.339,-

B.3.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.239.474.339,00 dan Rp0,00.

Tabel 2.18 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,369,390,400.00	-	0.00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	49,755.00	-	0.00
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	134,882,520.00	-	0.00
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	29,151,200.00	-	0.00
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	327,436,000.00	-	0.00
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	126,083,220.00	-	0.00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	251,207,000.00	-	0.00
511628	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	1,275,000.00	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor		3,239,475,095.00	-	0.00
	Pengembalian Belanja	(756.00)	-	
Jumlah Belanja		3,239,474,339.00	-	0.00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada Semester I TA 2024 sebesar Rp3.239.474.339,00 berasal dari:

Tabel 2.19 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	1,779,080,004.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	333,130,042.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	29,793,810.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	443,039,973.00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	127,657,191.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	58,418,501.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	110,851,956.00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	76,973,666.00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	77,120,350.00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	44,825,630.00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	64,950,916.00
12	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	62,376,016.00
13	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	17,041,184.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	14,215,100.00
	Jumlah	3,239,474,339.00

Belanja Lembur
Rp527.329.000,-

B.3.3 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp527.329.000,00 dan Rp367.963.000,00 atau terjadi kenaikan sebesar 43,31 %.

Tabel 2.20 Perbandingan Realisasi Belanja Lembur

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
512211	Belanja Uang Lembur	521,267,000.00	367,963,000.00	41.66
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	6,062,000.00	-	0.00
	Jumlah Belanja Kotor	527,329,000.00	367,963,000.00	43.31
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	527,329,000.00	367,963,000.00	43.31

Realisasi Belanja Uang Lembur pada Semester I TA 2024 sebesar Rp527.329.000,00 berasal dari:

Tabel 2.21 Rincian Belanja Lembur per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	45,058,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	65,650,000.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	63,014,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	3,794,000.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	65,594,000.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	35,735,000.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	122,852,000.00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	7,480,000.00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	32,881,000.00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	10,707,000.00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	41,564,000.00
12	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	33,000,000.00
	Jumlah	527,329,000.00

Belanja Tunjangan
Khusus dan Pegawai
Transito
Rp95.153.698.571,-

B.3.4 Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp95.153.698.571,00 dan Rp80.390.680.951,00 atau terjadi kenaikan sebesar 18,36%.

Tabel 2.22 Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	93,567,294,093.00	80,432,261,748.00	16.33
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPK)	1,586,404,478.00	-	0.00
	Jumlah Belanja Kotor	95,153,698,571.00	80,432,261,748.00	18.30
	Pengembalian Belanja	-	(41,580,797.00)	
	Jumlah Belanja	95,153,698,571.00	80,390,680,951.00	18.36

Belanja Barang
Rp79.197.733.415,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp79.197.733.415,00 dan Rp113.975.142.319,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 30,51%.

Tabel 2.23 Perbandingan Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
5211	Belanja Barang Operasional	23,532,467,266.00	22,304,653,581.00	5.50
5212	Belanja Barang Non Operasional	5,009,490,730.00	9,351,480,112.00	(46.43)
5218	Belanja Barang Persediaan	2,652,681,385.00	3,613,467,251.00	(26.59)
5221	Belanja Jasa	18,140,483,994.00	40,769,872,292.00	(55.51)
5231	Belanja Pemeliharaan	8,777,272,115.00	8,499,208,923.00	3.27
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21,132,938,180.00	29,472,973,104.00	(28.30)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	249,955,045.00	127,987,796.00	0.00
	Jumlah Belanja Kotor	79,495,288,715.00	114,139,643,059.00	(30.35)
	Pengembalian Belanja	(297,555,300.00)	(164,500,740.00)	
	Jumlah Belanja	79,197,733,415.00	113,975,142,319.00	(30.51)

Adapun Realisasi Belanja Barang BKN pada Semester I TA 2024 sebesar Rp79.197.733.415,00 berasal dari:

Tabel 2.24 Rincian Belanja Barang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	37,627,833,367.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	2,849,191,025.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,326,811,102.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2,568,467,795.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3,613,346,401.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	2,377,959,218.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	2,200,439,872.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3,554,432,302.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,949,498,742.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,767,016,520.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,549,960,461.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2,936,570,807.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,760,777,222.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1,693,790,572.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,039,542,984.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	5,382,095,025.00
	Jumlah	79,197,733,415.00

Belanja Barang
Operasional
Rp23.530.302.463,-

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.530.302.463,00 dan Rp22.302.498.981,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,51%.

Tabel 2.25 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	22,253,629,449.00	20,107,212,272.00	10.67
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	286,321,106.00	278,332,200.00	2.87
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	87,245,048.00	244,831,130.00	(64.37)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	670,238,900.00	1,368,581,190.00	(51.03)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	235,032,763.00	305,696,789.00	(23.12)
	Jumlah Belanja Kotor	23,532,467,266.00	22,304,653,581.00	5.50
	Pengembalian Belanja	(2,164,803.00)	(2,154,600.00)	
	Jumlah Belanja	23,530,302,463.00	22,302,498,981.00	5.51

Realisasi Belanja Barang Operasional Semester I TA 2024 sebesar Rp23.530.302.463,00 berasal dari:

Tabel 2.26 Rincian Belanja Barang Operasional per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	6,458,755,504.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,173,487,445.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	974,009,287.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,378,733,593.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1,700,440,508.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,123,205,881.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	811,224,794.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1,703,119,438.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1,296,847,325.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	671,548,000.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1,154,193,986.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1,099,330,014.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	976,462,714.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	425,985,200.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	618,105,574.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,964,853,200.00
	Jumlah	23,530,302,463.00

Belanja Barang Non
Operasional
Rp5.009.490.730,-

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.009.490.730,00 dan Rp9.351.452.612,00 atau mengalami penurunan sebesar 46,43%.

Tabel 2.27 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional
(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
521211	Belanja Bahan	3,380,826,407.00	5,320,753,642.00	(36.46)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	646,966,400.00	3,286,740,000.00	(80.32)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	810,691,480.00	520,715,000.00	55.69
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	169,341,443.00	216,666,970.00	(21.84)
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	1,665,000.00	6,604,500.00	(74.79)
	Jumlah Belanja Kotor	5,009,490,730.00	9,351,480,112.00	(46.43)
	Pengembalian Belanja	-	(27,500.00)	
	Jumlah Belanja	5,009,490,730.00	9,351,452,612.00	(46.43)

Realisasi Belanja Barang Non Operasional Semester I TA 2024 sebesar Rp5.009.490.730,00 berasal dari:

Tabel 2.28 Rincian Belanja Barang Non Operasional per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	3,743,419,031.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	102,289,060.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	29,281,400.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	3,420,500.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1,542,000.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	48,244,320.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	44,098,375.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	46,700,686.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	61,734,442.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	51,702,000.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	26,731,130.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	77,176,746.00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	12,770,000.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	68,971,040.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	691,410,000.00
	Jumlah	5,009,490,730.00

Belanja Barang
Persediaan
Rp2.652.681.385,-

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan pada Semester I TA 2024 dan Semester TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.652.681.385,00 dan Rp3.613.467.251,00 atau mengalami penurunan sebesar 26,59%.

Tabel 2.29 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,618,445,885.00	3,565,969,701.00	(26.57)
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	34,235,500.00	26,180,000.00	30.77
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	21,317,550.00	(100.00)
	Jumlah Belanja Kotor	2,652,681,385.00	3,613,467,251.00	(26.59)
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	2,652,681,385.00	3,613,467,251.00	(26.59)

Realisasi Belanja Barang Persediaan Semester I TA 2024 sebesar Rp2.652.681.385,00 berasal dari:

Tabel 2.30 Rincian Belanja Barang Persediaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	921,859,173.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	210,988,790.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	158,628,610.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	95,985,685.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	82,219,850.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	61,447,070.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	101,477,710.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	125,304,137.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	86,383,737.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	12,991,332.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	45,433,956.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	137,403,270.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	87,953,936.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	202,711,450.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	50,680,565.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	271,212,114.00
	Jumlah	2,652,681,385.00

Belanja Jasa
Rp18.140.483.994,-

B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18.140.483.994,00 dan Rp40.769.872.292,00 atau mengalami penurunan sebesar 55,51%.

Tabel 2.31 Perbandingan Realisasi Belanja Jasa

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
522111	Belanja Langganan Listrik	8,421,276,912.00	8,521,524,005.00	(1.18)
522112	Belanja Langganan Telepon	243,382,703.00	185,030,443.00	31.54
522113	Belanja Langganan Air	166,606,007.00	219,322,649.00	(24.04)
522131	Belanja Jasa Konsultan	861,564,150.00	728,984,800.00	18.19
522141	Belanja Sewa	6,945,289,592.00	27,407,012,988.00	(74.66)
522151	Belanja Jasa Profesi	677,300,000.00	506,075,000.00	33.83
522191	Belanja Jasa Lainnya	825,064,630.00	2,240,730,658.00	(63.18)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	961,191,749.00	(100.00)
	Jumlah Belanja Kotor	18,140,483,994.00	40,769,872,292.00	(55.51)
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	18,140,483,994.00	40,769,872,292.00	(55.51)

Realisasi Belanja Jasa Semester I TA 2024 sebesar Rp18.140.483.994,00 berasal dari:

Tabel 2.32 Rincian Belanja Jasa per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	11,536,209,339.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	385,516,884.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	346,758,698.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	434,077,126.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	565,960,013.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	441,009,481.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	359,907,416.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	539,138,458.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	334,357,723.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	241,517,019.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	339,164,297.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	399,081,380.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	667,677,332.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	414,831,528.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	306,694,329.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	828,582,971.00
	Jumlah	18,140,483,994.00

Belanja
Pemeliharaan
Rp8.777.272.115,-

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.777.272.115,00 dan Rp8.499.208.923,00 dengan kenaikan sebesar 3,27%.

Tabel 2.33 Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,618,322,752.00	3,195,614,083.00	13.23
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	255,417,057.00	220,025,051.00	16.09
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	90,282,731.00	62,396,955.00	0.00
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	284,612,251.00	548,279,175.00	(48.09)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,048,983,605.00	4,117,543,903.00	(1.67)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53,887,131.00	50,063,350.00	7.64
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,550,000.00	-	0.00
523132	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	148,412,550.00	-	0.00
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	4,983,000.00	20,481,000.00	(75.67)
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	14,795,423.00	12,972,989.00	14.05
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	-	-	#DIV/0!
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	250,025,615.00	271,832,417.00	(8.02)
	Jumlah Belanja Kotor	8,777,272,115.00	8,499,208,923.00	3.27
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	8,777,272,115.00	8,499,208,923.00	3.27

Realisasi Belanja Pemeliharaan Semester I TA 2024 sebesar Rp8.777.272.115,00 berasal dari:

Tabel 2.34 Rincian Belanja Pemeliharaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	3,302,367,263.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	379,960,149.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	357,339,342.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	276,570,040.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	422,550,692.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	286,257,786.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	430,795,895.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	348,091,458.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	464,440,281.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	24,776,253.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	351,319,621.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	497,271,901.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	292,715,725.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	59,391,304.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	198,233,709.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,085,190,696.00
	Jumlah	8,777,272,115.00

Belanja Perjalanan
Dalam Negeri
Rp20.837.547.683,-

B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.837.547.683,00 dan Rp29.310.654.464,00 atau mengalami penurunan sebesar 28,91%.

Tabel 2.35 Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
524111	Belanja Perjalanan Biasa	15,386,855,278.00	24,775,128,375.00	(37.89)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	279,795,201.00	334,772,893.00	(16.42)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,020,864,200.00	2,600,188,900.00	(60.74)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,445,423,501.00	1,762,882,936.00	152.17
	Jumlah Belanja Kotor	21,132,938,180.00	29,472,973,104.00	(28.30)
	Pengembalian Belanja	(295,390,497.00)	(162,318,640.00)	
	Jumlah Belanja	20,837,547,683.00	29,310,654,464.00	(28.91)

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Semester I TA 2024 sebesar Rp20.837.547.683,00 berasal dari:

Tabel 2.36 Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	11,415,268,012.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	596,948,697.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	460,793,765.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	379,680,851.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	840,633,338.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	417,794,680.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	452,935,682.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	792,078,125.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	705,735,234.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	816,183,916.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	608,146,601.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	776,753,112.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	658,790,769.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	578,101,090.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	796,857,767.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	540,846,044.00
	Jumlah	20,837,547,683.00

Belanja Perjalanan
Luar Negeri
Rp249.955.045,-

B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp249.955.045,00 dan Rp127.987.796,00. Belanja Perjalanan Luar Negeri BKN merupakan Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri terdapat pada Kantor Pusat BKN. Realisasi belanja perjalanan luar negeri pada Semester I TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 95,30% dibanding Semester I TA 2023.

Tabel 2.37 Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
524211	Belanja Perjalanan Biasa- Luar Negeri	249,955,045.00	127,987,796.00	95.30
	Jumlah Belanja Kotor	249,955,045.00	127,987,796.00	95.30
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	249,955,045.00	127,987,796.00	95.30

Belanja Modal
Rp55.764.722.057,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp55.764.722.057,00 dan Rp16.703.348.039,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 233,85%. Hal ini dikarenakan pada tahun ini, BKN mendapatkan anggaran yang bersumber dari SBSN untuk pekerjaan pembangunan Gedung Kantor UPT Gorontalo dan UPT Mataram.

Tabel 2.38 Perbandingan Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45,130,273,175.00	14,981,661,471.00	201.24
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,634,448,882.00	1,687,936,568.00	530.03
5361	Belanja Modal Lainnya	-	33,750,000.00	0.00
	Jumlah Belanja Kotor	55,764,722,057.00	16,703,348,039.00	233.85
	Pengembalian	-	-	
	Jumlah Belanja	55,764,722,057.00	16,703,348,039.00	233.85

Realisasi Belanja Modal pada Semester I TA 204 sebesar Rp55.764.722.057,00 berasal dari:

Tabel 2.39 Rincian Belanja Modal per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	52,858,262,913.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	401,968,484.00
3	Kantor Regional VII BKN Palembang	99,052,914.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	174,972,380.00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,007,689,600.00
6	Kantor Regional X BKN Denpasar	333,567,363.00
7	Kantor Regional XI BKN Manado	51,414,200.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	445,528,753.00
9	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	86,380,000.00
10	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	80,968,950.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	224,916,500.00
	Jumlah	55,764,722,057.00

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp45.130.273.175,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp45.130.273.175,00 dan Rp14.981.661.471,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Semester I TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 201,24% dibandingkan dengan Semester I TA 2023.

Tabel 2.40 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,051,534,200.00	14,981,661,471.00	187.36
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,078,738,975.00	-	0.00
	Jumlah Belanja Kotor	45,130,273,175.00	14,981,661,471.00	201.24
	Pengembalian	-	-	
	Jumlah Belanja	45,130,273,175.00	14,981,661,471.00	201.24

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Semester I TA 2024 sebesar Rp45.130.273.175,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan kode akun 532111 sebesar Rp43.051.534.200,00, berasal dari:

Tabel 2.41 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	42,060,726,504.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	150,561,220.00
3	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	104,999,380.00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	168,733,941.00
5	Kantor Regional XI BKN Manado	51,414,200.00
6	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	272,283,505.00
7	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	80,968,950.00
8	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	161,846,500.00
	Jumlah	43,051,534,200.00

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin dengan kode akun 532121 sebesar Rp2.078.738.975,00, berasal dari Kantor Pusat BKN.

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp10.634.448.882,-

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.634.448.882,00 dan Rp1.687.936.568,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester I TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 530,03%.

Tabel 2.42 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,031,093,596.00	331,534,614.00	2624.03
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,603,355,286.00	1,356,401,954.00	18.21
	Jumlah Belanja Kotor	10,634,448,882.00	1,687,936,568.00	530.03
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah Belanja	10,634,448,882.00	1,687,936,568.00	530.03

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester I TA 2024 sebesar Rp10.634.448.882,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan kode akun 533111 sebesar Rp9.031.093.596,00 berasal dari:

Tabel 2.43 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	8,718,797,434.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	39,998,000.00
3	Kantor Regional VII BKN Palembang	99,052,914.00
4	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	173,245,248.00
	Jumlah	9,031,093,596.00

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan kode akun 533121 sebesar Rp1.603.355.286,00 berasal dari:

Tabel 2.44 Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional II BKN Surabaya	211,409,264.00
2	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	69,973,000.00
3	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,007,689,600.00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	164,833,422.00
5	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	86,380,000.00
6	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	63,070,000.00
	Jumlah	1,603,355,286.00

Belanja Modal
Lainnya Rp0,-

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp33.750.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Semester I TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan Semester I TA 2023.

Tabel 2.45 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	SEMESTER I TA 2024	SEMESTER I TA 2023	NAIK (TURUN) %
536111	Belanja Modal Lainnya	-	3,750,000.00	(100.00)
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	30,000,000.00	(100.00)
	Jumlah Belanja Kotor	-	33,750,000.00	(100.00)
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
	Jumlah Belanja	-	33,750,000.00	(100.00)

Prioritas Nasional

B.6 PENGUNGKAPAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET DAN REALISASI OUTPUT PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah bertema “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik”. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, BKN memiliki tugas pada **Prioritas Nasional (PN) VII : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas nasional yang menjadi tugas BKN adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN;
2. Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN;
3. Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah; dan
4. Layanan Data ASN Terintegrasi.

Pagu Anggaran untuk proyek prioritas nasional yang menjadi tugas BKN adalah Rp11.000.000.000,00 dengan Total Realisasi Anggaran hingga Semester I TA 2024 sebesar Rp1.814.366.276,00. Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Proyek Prioritas Nasional BKN dalam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46 Rincian Capaian Output Prioritas Nasional

(Dalam Rupiah)

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	% Output
1	Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	2,000,000,000.00	4,092,000.00	0.20	NSPK	1	0	0.00
2	Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	5,500,000,000.00	1,025,340,642.00	18.64	Orang	60,000	18,112	30.19
3	Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah	1,000,000,000.00	297,161,944.00	29.72	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0.00
4	Layanan Data ASN Terintegrasi	2,500,000,000.00	298,209,983.00	11.93	Layanan	1	0	0.00
Jumlah		11,000,000,000.00	1,624,804,569.00	14.77				

Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN

B.6.1 Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN

Tahun 2024, BKN akan mengembangkan sebuah alat ukur berbasis digital dengan target asesi adalah pejabat pimpinan tinggi. Hal ini perlu dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/Lembaga. Instruksi ini dikeluarkan untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kinerja fisik dan keuangan serta pelayanan publik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Target kinerja kegiatan pada Semester I pada program prioritas ini adalah membuat alat ukur penilaian kompetensi dengan tahapan:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan substansi instrumen. Instrumen disusun untuk Jabatan pimpinan Tinggi, capaian kegiatan pada Semester I adalah dalam proses seleksi vendor hal ini dikarenakan terdapat proses tender ulang pada penyusunan alat ukur Jabatan Pimpinan Tinggi dan Berakhlak.
2. Penyusunan Instrumen. Kinerja yang telah dicapai sampai dengan Semester I adalah:
 - a. Pembuatan Aplikasi Virtual Assessment Center dimulai pada 1 Juli 2024;
 - b. Melakukan proses tender ulang pengadaan alat ukur untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - c. Melakukan Input alat ukur smart governance (total durasi tes 3 jam) dengan persentase capaian 70%;
 - d. Melakukan proses tender ulang pengadaan alat ukur BerAkhlak

Penyerapan anggaran pada program prioritas ini sampai dengan Semester I pada program prioritas ini adalah sebesar Rp4.092.000,00 atau sebesar 0,20% dari target anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.

*Pemetaan/Penilaian
Potensi dan
Kompetensi ASN*

B.6.2 Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN

Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diamanatkan bahwa Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas Membina dan Menyelenggarakan Penilaian Kompetensi serta Mengevaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai ASN oleh instansi pemerintah. Usaha dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2024 ini merencanakan melaksanakan kegiatan Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi bagi PNS pada instansi pusat Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020 s.d 2024 diantaranya melalui pembangunan manajemen talenta nasional untuk sistem merit. Kegiatan Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi bagi PNS pada Instansi Pusat K/L yang bekerja pada Pusat Pemerintahan dilaksanakan dengan tahapan untuk menyesuaikan sarana/prasarana dan pendukungnya yang tersedia.

Penyerapan anggaran pada program prioritas ini sampai dengan Semester I adalah sebesar Rp1.025.340.642,00 atau sebesar 18,64% dari Pagu Rp5.500.000.000,00. Target tahunan program prioritas nasional penilaian potensi dan kompetensi ASN adalah terlaksananya pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi ASN sebanyak 60.000 orang pada Instansi Pusat dan Daerah penyangga dengan capaian output sampai dengan Semester I sebanyak 18.112 orang yang berasal dari 37 Instansi Pusat.

*Rekomendasi
Kebijakan Tentang
Sistem Penggajian
Pegawai ASN pada
Instansi Pemerintah*

B.6.3 Rekomendasi Kebijakan Tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah

BKN sebagai lembaga penyelenggara manajemen PNS yang salah satu tugasnya melakukan manajemen kompensasi penggajian mempunyai peran strategis untuk merancang (*design*) sistem penggajian PNS sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN tersebut. Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN diperlukan untuk membangun regulasi/aturan yang berkaitan dengan pemberian gaji dan tunjangan ASN. Rekomendasi Kebijakan ini sistem penggajian ASN ini tujuannya dapat memberikan alternatif dan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan sistem penggajian ASN.

Pada Tahun 2024, Direktorat Kompensasi ASN mendapatkan amanat dari Kementerian PPN/Bappenas untuk melaksanakan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sistem Penggajian ASN pada Instansi Pemerintah. Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah merupakan salah satu program prioritas nasional Badan Kepegawaian Negara. Melalui kegiatan PN ini, Direktorat Kompensasi ASN merumuskan kajian awal/naskah akademik tentang sistem penggajian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan/kebutuhan kedepan.

Penyerapan anggaran pada program prioritas ini sampai dengan Semester I pada program prioritas ini adalah sebesar Rp297.161.944,00 atau sebesar 29,72% dari target anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00.

Layanan Data ASN
Terintegrasi

B.6.4 Layanan Data ASN Terintegrasi

BKN melalui Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, memiliki kewenangan dalam mengelola data ASN, dan diberikan tanggung jawab melaksanakan salah satu Program Nasional untuk mewujudkan layanan data dan informasi ASN yang terintegrasi, akurat dan terkini. Program ini dijalankan dengan mengukur dan meningkatkan kualitas data ASN melalui kegiatan:

1. Penyiapan instrumen (alat ukur) dan melakukan pengukuran tingkat kualitas data ASN;
2. Penyusunan serta sosialisasi kamus data ASN dan standar data ASN;
3. Pelaksanaan pengukuran dan peningkatan kualitas data serta pemantauan disparitas data ASN.

Pada periode Semester I tahun 2024, program prioritas ini terealisasi melalui kegiatan penyediaan *prototype* instrumen kualitas data, uji coba instrumen pengukuran kualitas data internal, penyusunan rancangan kamus data ASN, pembangunan *dashboard* disparitas data ASN dan penyusunan tabel referensi dan rancangan pengelolaannya. Kelima kegiatan ini diwujudkan dengan capaian anggaran sebesar Rp298.209.983,00 atau sebesar 11,93% dari target anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp2.300.000.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja. Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BKN per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.300.000.000,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
Uang Tunai	258,853,845.00	-
Uang muka/persekot pada BPP	312,057,133.00	-
Uang di Bank	1,024,012,631.00	-
Kuitansi UP yg belum SP2D	705,076,391.00	-
Jumlah	2,300,000,000.00	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.300.000.000,00 berasal dari Uang Persediaan per Satker, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
Kantor Pusat BKN	500,000,000.00	-
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	120,000,000.00	-
Kantor Regional II BKN Surabaya	120,000,000.00	-
Kantor Regional III BKN Bandung	120,000,000.00	-
Kantor Regional IV BKN Makassar	120,000,000.00	-
Kantor Regional V BKN Jakarta	120,000,000.00	-
Kantor Regional VI BKN Medan	60,000,000.00	-
Kantor Regional VII BKN Palembang	150,000,000.00	-
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	120,000,000.00	-
Kantor Regional IX BKN Jayapura	120,000,000.00	-
Kantor Regional X BKN Denpasar	150,000,000.00	-
Kantor Regional XI BKN Manado	120,000,000.00	-
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	150,000,000.00	-
Kantor Regional XIII BKN Aceh	120,000,000.00	-
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	120,000,000.00	-
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	90,000,000.00	-
Jumlah	2,300,000,000.00	-

Bendahara Pengeluaran mengelola Kas di rekening bank. Rincian rekening bank yang dikelola oleh masing-masing satker di BKN disajikan pada Lampiran Utama A1.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa PNPB. Bendahara Penerimaan BKN terdapat pada satker Kantor Pusat Jakarta dengan Nomor Rekening 0340-01-002735-30-2 pada Bank Rakyat Indonesia dan satker Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN 1224-01-000123-30-4 pada Bank Rakyat Indonesia.

Mekanisme penerimaan PNPB dilakukan dengan penyetoran langsung ke kas negara dan tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan sampai dengan 30 Juni 2024.

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp114.490.399,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas dan setara kas lainnya, merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp114.490.399,00 dan Rp4.587.816,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	114,490,399.00	4,587,816.00
Jumlah	114,490,399.00	4,587,816.00

Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp114.490.399,00 berasal dari:

Tabel 3.4 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	105,998,999.00	-
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	-	4,236,316.00
3	Kantor Regional XI BKN Manado	-	351,500.00
4	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	683,000.00	-
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	7,808,400.00	-
	Jumlah	114,490,399.00	4,587,816.00

Adapun rincian Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp114.490.399,00 terdiri dari:

1. LS Bendahara yang belum diserahkan kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp113.807.399,00
2. Utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp683.000,00 pada tanggal 30 Juni 2024;

Belanja Dibayar di Muka Rp0,-

C.4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp131.199.742,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka

(Dalam Rupiah)

Jenis	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
Pembayaran Sewa Gedung Bangunan	-	9,543,716.00
Biaya Langganan Lisensi	-	121,656,026.00
Jumlah	-	131,199,742.00

Uang Muka Belanja (Prepayment) (Rp850.000,-)

C.5 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (*prepayment*) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing adalah sebesar (Rp850.000,00) dan Rp0,00. Uang Muka Belanja (*prepayment*) adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian Uang Muka Belanja (*prepayment*) sebesar (Rp850.000,00) merupakan kesalahan penggunaan akun atas pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang seharusnya menggunakan

akun 425911 namun menggunakan akun 425991 yaitu uang muka persekot gaji yang berasal dari Kantor Regional V BKN Jakarta dan sudah dilakukan koreksi pada Bulan Juli 2023.

Piutang Bukan Pajak
Rp16.894.305,-

C.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing - masing adalah sebesar Rp16.894.305,00 dan Rp2.747.393.181,00. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
Piutang PNPB	-	-
Piutang Lainnya	16,894,305.00	2,747,393,181.00
Jumlah	16,894,305.00	2,747,393,181.00

Saldo Piutang PNPB per 30 Juni 2024 sebesar Rp16.894.305,00 berasal dari piutang lainnya merupakan piutang atas sewa rumah dinas dan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dari SPM Gaji bulan Juli 2024 dengan rincian per Satker sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
Kantor Pusat BKN	-	433,473,386.00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	556,400.00	1,368,040.00
Kantor Regional II BKN Surabaya	449,526.00	2,600,000.00
Kantor Regional III BKN Bandung	781,330.00	-
Kantor Regional IV BKN Makassar	482,194.00	2,034,084,835.00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	91,910.00	1,455,000.00
Kantor Regional VI BKN Medan	2,670,408.00	1,191,200.00
Kantor Regional VII BKN Palembang	1,962,426.00	-
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1,284,885.00	45,450,641.00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	3,245,300.00	96,691,976.00
Kantor Regional X BKN Denpasar	2,406,628.00	30,799,200.00
Kantor Regional XI BKN Manado	243,200.00	25,194,262.00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,373,624.00	1,681,500.00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	-	13,643,600.00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	-	6,688,350.00
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	346,474.00	53,071,191.00
Jumlah	16,894,305.00	2,747,393,181.00

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
Rp0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing - masing sebesar Rp0,00 dan Rp13.736.966,00. Adapun rincian atas penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak adalah sebagai berikut:

Persediaan
Rp7.095.120.866,-

C.8 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.095.120.866,00 dan Rp7.106.175.160,00.

Tabel 3.8 Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

Persediaan	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
Barang Konsumsi	6,644,635,858.00	6,722,383,660.00
Bahan untuk Pemeliharaan	450,485,008.00	383,791,500.00
Suku cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	7,095,120,866	7,106,175,160

Adapun rincian persediaan per satker sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rincian Persediaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2023
Kantor Pusat BKN	2,278,190,465.00	2,232,335,274.00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	609,603,996.00	579,302,866.00
Kantor Regional II BKN Surabaya	288,327,357.00	292,376,448.00
Kantor Regional III BKN Bandung	130,303,393.00	170,052,545.00
Kantor Regional IV BKN Makassar	213,403,450.00	181,080,450.00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	248,166,137.00	278,279,760.00
Kantor Regional VI BKN Medan	283,072,502.00	322,797,442.00
Kantor Regional VII BKN Palembang	180,667,646.00	201,179,129.00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	469,306,157.00	449,486,840.00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	440,825,998.00	499,488,799.00
Kantor Regional X BKN Denpasar	413,513,243.00	471,799,088.00
Kantor Regional XI BKN Manado	207,010,561.00	229,634,298.00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	882,537,149.00	882,110,788.00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	213,468,200.00	138,853,430.00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	60,882,524.00	44,708,946.00
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	175,842,088.00	132,689,057.00
Jumlah	7,095,120,866.00	7,106,175,160.00

Terdapat persediaan dalam kondisi usang sebesar Rp262.931.190,00 yang tidak disajikan dalam neraca. Persediaan dengan keadaan usang tersebut berasal dari:

Tabel 3.10 Rincian Persediaan Usang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Kantor Regional VII BKN Palembang	62,425,000.00	Toner Printer HP dan Laser Jet sebanyak 52 buah
2	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	15,511,450.00	ATK dan Toner Printer sebanyak 45 buah
3	Kantor Regional X BKN Denpasar	49,538,740.00	Buku Tulis, Formulir Model D-II.c dan Toner HP dan Fuji Xerox
4	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	135,456,000.00	Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian sebanyak 498 buah
Jumlah		262,931,190.00	

Persediaan yang Belum Diregister Rp10.000,-

C.9 Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan yang Belum Diregister adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang belum dilakukan register. Nilai persediaan yang belum diregister per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp10.000,00 dan Rp0,00. Saldo persediaan yang belum diregister per 30 Juni 2024 merupakan kesalahan pencatatan atas pembelian e-materai yang tercatat dengan BAST Juni namun dihapus di bulan Juli oleh Kantor Pusat BKN pada Aplikasi SAKTI.

Tanah Rp2.331.580.054.368,-

C.10 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BKN yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.331.580.054.368,00 dan Rp2.330.666.524.668,00

Tabel 3.11 Mutasi Tanah Per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2,330,666,524,668.00
Mutasi Tambah:	913,529,700.00
Hibah Masuk	913,529,700.00
Saldo per 30 Juni 2024	2,331,580,054,368.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	2,331,580,054,368.00

Adapun rincian mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah sebesar Rp913.529.700,00 atas transaksi Tanah berupa Hibah (Masuk) yang berasal dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 000.2.3.2/0159/PUPR-PERKIM/SETDA dan Nomor 14/PL.03.04/BA/A/2023 Tanggal 15 Januari 2024.

Adapun Rincian Tanah per satker adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Rincian Tanah Per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	790,911,774,000.00	790,911,774,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	150,838,792,000.00	150,838,792,000.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	351,559,532,000.00	351,559,532,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	50,955,787,080.00	50,955,787,080.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	90,756,538,500.00	90,756,538,500.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	62,663,190,000.00	62,663,190,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	164,724,060,000.00	164,724,060,000.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	264,364,323,238.00	264,364,323,238.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	18,198,878,840.00	17,285,349,140.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	40,113,517,000.00	40,113,517,000.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	166,626,748,000.00	166,626,748,000.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	48,274,100,310.00	48,274,100,310.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	25,270,525,400.00	25,270,525,400.00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	18,461,628,000.00	18,461,628,000.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,624,710,000.00	4,624,710,000.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	83,235,950,000.00	83,235,950,000.00
	Jumlah	2,331,580,054,368.00	2,330,666,524,668.00

Pada tahun 2024, terdapat perubahan status tanah yang berlokasi di Bekasi yang sebelumnya berstatus sebagai Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya menjadi Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II yang direncanakan akan dimanfaatkan dan disewakan sebagai Promart BKN.

Terdapat Tanah BKN yang dikuasai pihak lain dengan uraian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat BKN. Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat seluas 4.060 m² senilai Rp77.478.342.000,00.
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Tanah dihuni pensiunan pegawai di lokasi sebagai berikut:
 - a. Kampung Sapen GK.I/445 seluas 619 m² senilai Rp3.037.866.000,00.
 - b. Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1.869 m² senilai Rp7.906.640.000,00.

Atas pemanfaatan BMN di kedua lokasi tersebut, masih belum ada kontribusi yang diterima oleh BKN. Pada Tahun 2021 telah ada persetujuan tarif sewa tanah atas sebagian tanah pada Kanreg I BKN Yogyakarta sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Nomor: S-40/MK.6/WKN.09/KNL.06/2021 tanggal 5 Maret 2021, namun belum ada tindak lanjut dari BKN untuk melakukan pungutan sewa dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut. Para penyewa mengajukan keberatan atas tarif sewa dengan mengajukan keringanan tarif kepada BKN. Pengajuan keringanan tarif dilakukan pada bulan Maret 2023, dan masih dalam proses persetujuan di KPKNL.

Selain kedua tanah yang dikuasai pensiunan pegawai tersebut, terdapat juga tanah yang berlokasi di perumahan BKN telah dibangun oleh pihak ketiga berupa bangunan permanen yang dimanfaatkan sebagai Musholla di luar lingkungan BKN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rejowinangun, Kota Gede seluas 48 m² senilai Rp342.853.000,00
 - b. Sedangadi, Mlati, Sleman seluas 104 m² senilai Rp683.456.000,00
3. Kantor Regional II BKN Surabaya. Tanah milik BKN yang berlokasi di belakang kantor yaitu Desa Waru, Sidoarjo seluas 97,44 m² telah dibangun bangunan permanen dan difungsikan oleh pihak ketiga sebagai garasi mobil.

Selain itu, terdapat Tanah yang telah diterbitkan pelepasan hak atas tanahnya oleh Kementerian PUPR namun belum mengurangi luasan pada Sertifikat Tanah Kantor Regional II BKN Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan atas nama 7 orang, seluas 844,82 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor 7730047.
- b. Surat Keputusan atas nama 6 orang, seluas 733,70 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor B 2511581.

4. Kantor Regional III BKN Bandung. Tanah milik BKN yang berlokasi di Muararajen Lama, Cihaurgeulis seluas 1.118 m² senilai Rp20.215.074.000,00 yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha oleh pihak ketiga.

Atas pemanfaatan BMN di lokasi tersebut, telah dilakukan pungutan sewa sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-192/MK.06/WKN.08/KNL01/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Kepegawaian Negara RI c.q. Kantor Regional III BKN. Pada tahun 2022, terjadi penyesuaian tarif sewa dan pergantian lima orang penyewa berdasarkan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-252/MK.6/KNL.0801/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, namun BKN belum dapat melakukan pungutan sewa dengan tarif baru tersebut dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut.

Atas permintaan penyesuaian tarif tersebut, melalui Surat KPKNL Bandung Nomor S-229/MK.6/KNL.0801/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, permintaan penyesuaian tarif oleh penyewa telah disesuaikan dengan nilai yang sewa baru namun tarif tersebut masih belum dapat disetujui para penyewa sehingga mengajukan keberatan kembali kepada BKN pada tanggal 2 Maret 2024 dan masih dalam proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan tarif sewa yang baru

Dari aset tanah BKN seluas 537,313 m², terdapat tanah yang belum bersertifikat yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN sebanyak 2 bidang tanah yang berlokasi di:
 - a. Perumahan Citra Gran Blok Q5 Nomor 10, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan luas tanah 92 m² senilai Rp1.021.623.000,00 dan sudah dalam proses pengajuan sertifikat.
 - b. Jalan Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah 244 m² senilai Rp9.385.290.000,00.
2. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebanyak 1 bidang tanah yang berlokasi di Jalan Adinegoro Padang, Ganting, Koto Tengah, Kota Padang. dengan luas tanah 2.000 m² senilai Rp400.000.000,00

Peralatan dan Mesin
Rp774.657.579.537,-

C.11 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp774.657.579.537,00 dan Rp704.398.035.892,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 3.13 Mutasi Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	704,398,035,892.00
Mutasi Tambah:	79,302,401,700.00
Pembelian	77,224,726,700.00
Pengembangan Nilai Aset	2,077,675,000.00
Mutasi Kurang:	(9,042,858,055.00)
Koreksi Pencatatan	(263,300,000.00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(8,779,558,055.00)
Saldo per 30 Juni 2024	774,657,579,537.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(561,150,175,346.00)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	213,507,404,191.00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp79.302.401.700,00 berupa:

1. Pembelian menggunakan akun 532111 sebesar Rp77.224.726.700,00 berupa:

Tabel 3.14 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	25,752,000.00
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7,270,500.00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,041,113,836.00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	287,315,609.00
5	Komputer	72,779,805,755.00
6	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	64,269,000.00
7	Peralatan Olahraga	19,200,000.00
	Jumlah	77,224,726,700.00

Pembelian Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.15 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	76,230,219,004.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	150,561,220.00
3	Kantor Regional IV BKN Makassar	3,700,000.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	104,999,380.00
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	168,733,941.00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	51,414,200.00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	272,283,505.00
8	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	80,968,950.00
9	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	161,846,500.00
	Jumlah	77,224,726,700.00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.051.534.200,00, sedangkan Penambahan Peralatan dan Mesin dari Pembelian sebesar Rp77.224.726.700,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp34.173.192.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar yang merupakan pembelian berupa Peralatan Komputer dimana proses pembayaran atas pembelian aset tersebut dilakukan pada bulan Juli sebesar Rp30.965.242.500,00 pada Kantor Pusat BKN;
 - b. Pembelian berupa *Walkthrough/ Portal Metal Detector* yang merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya dimana pembayarannya telah dilakukan melalui Dana Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada Tahun 2023 sebesar Rp3.204.250.000,00 pada Kantor Pusat BKN;
 - c. Utang yang Belum Diterima Tagihannya sebesar Rp3.700.000,00 yang merupakan pembelian berupa Sound System yang belum diajukan pembayarannya pada Kantor Regional IV BKN Makasar.
2. Pengembangan Nilai Aset menggunakan akun 532121 sebesar Rp2.077.675.000,00 merupakan penambahan nilai aset pada Kantor Pusat BKN berupa:
 - a. Penambahan nilai PC Unit yang merupakan biaya penambahan kapasitas *Storage Existing* pada Data Center sebesar Rp1.980.950.000,00;
 - b. Penambahan nilai PC Unit yang merupakan Biaya jasa ongkos pengiriman Komputer CAT sebesar Rp96.725.000,00;

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.078.738.975,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.063.975,00. Selisih tersebut merupakan selisih nilai kuitansi pembayaran dengan perhitungan biaya pajak (PPN) atas pembayaran biaya jasa ongkos kirim pengiriman Komputer CAT yang belum dikapitalisasi.

Mutasi Kurang transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.042.858.055,00 berupa:

1. Koreksi Pencatatan berupa Peralatan Komputer sebesar Rp263.300.000,00 atas pembelian Walkthrough/Portal Metal Detector yang sebagian barangnya sudah diterima pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kantor UPT BKN Serang sebesar Rp87.750.000,00;
 - b. Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp87.950.000,00;
 - c. Kantor Regional V BKN Jakarta sebesar Rp87.600.000,00.
2. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp8.779.558.055,00 berupa:

Tabel 3.16 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	541,480,000.00
2	Alat Angkutan	207,609,200.00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2,950,821,028.00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	608,870,812.00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	13,209,000.00
6	Alat Laboratorium	374,835,947.00
7	Komputer	4,082,732,068.00
	Jumlah	8,779,558,055.00

Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.17 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional III BKN Bandung	(207,609,200.00)
2	Kantor Regional VI BKN Medan	(1,206,038,091.00)
3	Kantor Regional VII BKN Palembang	(2,903,931,669.00)
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	(2,312,000,435.00)
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	(2,149,978,660.00)
	Jumlah	(8,779,558,055.00)

Rincian Peralatan dan Mesin per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.18 Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	406,582,882,425.00	342,160,941,921.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	24,957,456,441.00	24,657,156,441.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	17,094,858,140.00	16,707,646,920.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	19,924,163,147.00	19,979,772,347.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	37,039,168,898.00	34,229,568,898.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	24,132,261,023.00	22,854,992,523.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	20,470,908,993.00	19,719,157,084.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	35,921,552,264.00	35,588,018,933.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	24,562,442,152.00	26,224,463,207.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	20,282,190,739.00	20,125,790,739.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	21,077,718,384.00	22,166,473,103.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	25,806,558,456.00	25,336,074,256.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	28,300,604,315.00	26,801,800,810
14	Kantor Regional XIII Banda Aceh	7,530,002,256.00	7,402,732,256.00
15	Kantor Regional XIV Manokwari	13,790,100,694.00	13,420,581,744.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	47,184,711,210.00	47,022,864,710.00
	Jumlah	774,657,579,537.00	704,398,035,892.00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya Per 30 Juni 2024 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Gedung dan Bangunan
Rp870.549.881.368,-

C.12 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp870.549.881.368,00 dan Rp868.849.348.970,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Mutasi Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	868,849,348,970.00
Mutasi Tambah:	1,716,850,798.00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	139,050,914.00
Pengembangan Nilai Aset Langsung	1,577,799,884.00
Mutasi Kurang:	(16,318,400.00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(16,318,400.00)
Saldo per 30 Juni 2024	870,549,881,368.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(179,048,856,695.00)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	691,501,024,673.00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pegurangan nilai aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.716.850.798,00 berupa:

1. Penyelesaian Pembangunan Langsung menggunakan akun 533111 sebesar Rp139.050.914,00 berupa:

Tabel 3.20 Rincian Penyelesaian Pembangunan Langsung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	39,998,000.00
2	Gedung Pos Jaga Permanen	99,052,914.00
	Jumlah	139,050,914.00

Penyelesaian Pembangunan Langsung berasal dari:

Tabel 3.21 Rincian Penyelesaian Pembangunan Langsung per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional II BKN Surabaya	39,998,000.00
2	Kantor Regional VII BKN Palembang	99,052,914.00
	Jumlah	139,050,914.00

2. Pengembangan Nilai Aset Langsung menggunakan akun 533111 sebesar Rp173.245.248,00 dan akun 533121 sebesar Rp1.404.554.636,00 berupa:

Tabel 3.22 Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1,449,233,903.00
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	128,565,981.00
	Jumlah	1,577,799,884.00

Pengembangan Nilai Aset Langsung berasal dari:

Tabel 3.23 Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional II BKN Surabaya	151,430,414.00
2	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	69,973,000.00
3	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,018,317,800.00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	164,833,422.00
5	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	173,245,248.00
	Jumlah	1,577,799,884.00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.634.448.882,00, sedangkan Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan (Langsung) dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp1.716.850.798,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.917.598.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp203.898.850,00;
- b. Pengembangan KDP sebesar Rp8.726.427.434,00;
- c. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar yang merupakan pembayaran jasa pengawas atas pekerjaan renovasi kantor dimana proses pembayaran atas pengembangan nilai aset tersebut dilakukan pada bulan Juli sebesar (Rp10.628.200,00) pada Kantor Regional IX BKN Jayapura;
- d. Utang yang Belum Diterima Tagihannya sebesar (Rp2.100.000,00) yang merupakan honorarium tim tenaga pengelola teknis pembangunan UPT Gorontalo dan UPT Mataram yang belum diajukan pembayarannya pada Kantor Pusat BKN.

Mutasi Kurang transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.318.400,00 berupa koreksi nilai berkurang atas kekurangan volume pekerjaan yang berasal dari Kantor Regional XI BKN Manado.

Pada tahun 2024, terdapat perubahan status gedung yang berlokasi di Bekasi yang sebelumnya berstatus sebagai Rumah Negara Golongan II menjadi Bangunan Lainnya yang direncanakan akan dimanfaatkan dan disewakan sebagai Promart BKN.

Rincian Gedung dan Bangunan per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.24 Rincian Gedung dan Bangunan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	368,299,042,861.00	368,299,042,861.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	39,134,021,945.00	39,134,021,945.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	26,646,677,096.00	26,455,248,682.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	33,921,491,035.00	33,921,491,035.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	45,351,715,358.00	45,351,715,358.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	31,523,050,297.00	31,523,050,297.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	36,003,945,025.00	36,003,945,025.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	45,809,690,840.00	45,710,637,926.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	22,766,261,832.00	22,696,288,832.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	23,343,246,349.00	22,324,928,549.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	30,975,255,236.00	30,810,421,814.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	28,334,674,241.00	28,350,992,641.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	30,547,136,767.00	30,373,891,519.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	6,084,633,004.00	6,084,633,004.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	499,327,000.00	499,327,000.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	101,309,712,482.00	101,309,712,482.00
	Jumlah	870,549,881,368.00	868,849,348,970.00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya Per 30 Juni 2024 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp24.716.999.940,-

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.716.999.940,00 dan Rp24.716.999.940,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	24,716,999,940.00
Mutasi Tambah:	-
Hibah Masuk	-
Saldo per 30 Juni 2024	24,716,999,940.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(19,280,706,123.00)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	5,436,293,817.00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	56,071,000.00	56,071,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	925,565,400.00	925,565,400.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	20,000,000.00	20,000,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	290,456,867.00	290,456,867.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	7,399,412,500.00	7,399,412,500.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	127,455,000.00	127,455,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	2,540,823,780.00	2,540,823,780.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	2,879,491,700.00	2,879,491,700.00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2,942,634,000.00	2,942,634,000.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,062,182,000.00	2,062,182,000.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	2,064,521,123.00	2,064,521,123.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	308,174,570.00	308,174,570.00
13	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	3,100,212,000.00	3,100,212,000.00
	Jumlah	24,716,999,940.00	24,716,999,940.00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya Per 30 Juni 2024 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Aset Tetap Lainnya
Rp13.253.848.057,-

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp13.253.848.057,00

dan Rp13.874.987.099,00 . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	13,874,987,099.00
Mutasi Tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	(621,139,042.00)
Hibah Keluar	(434,314,820.00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(186,824,222.00)
Saldo per 30 Juni 2024	13,253,848,057.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(633,102,045.00)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	12,620,746,012.00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Mutasi Kurang transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp621.139.042,00 yang terdiri dari:

1. Hibah Keluar sebesar Rp434.314.820,00 pada Kantor Regional V BKN Jakarta berupa Penghapusan nilai Aset Tetap Renovasi atas transaksi pinjam pakai untuk UPT Pontianak.
2. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp186.824.222,00 berupa Bahan Perpustakaan yang berasal dari:
 - a. Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp173.193.222,00;
 - b. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp13.631.000,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28 Rincian Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap Renovasi	11,626,062,154.00
2	Bahan Perpustakaan	1,463,066,803.00
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	164,719,100.00
	Jumlah	13,253,848,057.00

Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) pada BKN merupakan aset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik BKN. Nilai ATR tersebut masih tercatat dalam laporan keuangan BKN karena kerja sama pinjam pakai yang masih berlaku. Adapun rincian aset tetap renovasi sebesar Rp11.626.062.154,00 terdiri dari:

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp330.933.500,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Semarang dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2026.
2. Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp385.659.850,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Serang dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2025.
3. Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp1.340.813.225,00 terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Ambon sebesar Rp491.127.225,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2027.
 - b. Kantor UPT BKN Mamuju Rp849.686.000,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2028.
4. Kantor Regional V BKN Jakarta sebesar Rp296.942.500,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Lampung yang berakhir sampai dengan April 2027.
5. Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp818.738.074,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Pangkal Pinang sebesar Rp398.897.674,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Februari 2024.
 - b. Kantor UPT BKN Jambi sebesar Rp419.840.400,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2026.
6. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp1.921.038.381,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Palangkaraya sebesar Rp442.521.200,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan April 2028.
 - b. Kantor UPT BKN Balikpapan sebesar Rp994.989.900,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Februari 2024.
 - c. Kantor UPT BKN Tarakan sebesar Rp483.527.281,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Juli 2024.
7. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp1.191.495.203,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Mataram sebesar Rp432.104.317,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Desember 2025.
 - b. Kantor UPT BKN Kupang sebesar Rp759.390.886,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan November 2025.

8. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp1.175.607.217,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Padang sebesar Rp372.780.267,00 yang akan dihibahkan kembali ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Kantor UPT BKN Batam sebesar Rp802.826.950,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan April 2028.
9. Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp4.164.834.204,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Sorong sebesar Rp1.661.582.588,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2025.
 - b. Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp2.503.251.616,00 yang sudah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan telah bersertifikat atas nama BKN namun proses atas pengesahan hibahnya masih dalam proses.

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.29 Rincian Aset Tetap Lainnya Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	482,070,963.00	482,070,963.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	376,956,817.00	376,956,817.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	50,566,000.00	56,392,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	451,498,900.00	451,498,900.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	1,381,738,022.00	7,123,574,475.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	296,942,500.00	731,257,320.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	-	173,193,222.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	838,912,644.00	838,912,644.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1,930,288,381.00	1,930,288,381.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	9,999,550.00	9,999,550.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1,191,495,203.00	1,205,126,203.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	99,972,695.00	99,972,695.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,185,150,817.00	2,940,763,800.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,164,834,204.00	2,636,880,092.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	793,421,361.00	793,421,361.00
	Jumlah	13,253,848,057.00	19,850,308,423.00

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya Per 30 Juni 2024 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Rp9.099.203.348,-

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.099.203.348,00 dan Rp168.877.064,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai dan belum digunakan sampai dengan tanggal neraca. Mutasi transaksi terhadap KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	168,877,064.00
Mutasi Tambah:	8,930,326,284.00
Perolehan/Penambahan KDP	203,898,850.00
Pengembangan KDP	8,726,427,434.00
Mutasi Kurang:	-
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-
Saldo per 30 Juni 2024	9,099,203,348.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	9,099,203,348.00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai KDP adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp160.452.975,00 berupa:

1. Perolehan/Penambahan KDP Gedung dan Bangunan menggunakan akun 533121 sebesar Rp203.898.850,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. KDP atas Biaya Jasa Konsultan Perencana untuk pekerjaan pemasangan ACP gedung kantor sebesar Rp59.978.850,00 pada Kantor Regional II BKN Surabaya;
 - b. KDP atas Biaya Jasa Konsultan Perencana untuk pekerjaan renovasi perluasan gedung kantor sebesar Rp83.980.000,00 pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh;
 - c. KDP atas Biaya Jasa Konsultan Perencana untuk pekerjaan renovasi gedung asrama sebesar Rp59.940.000,00 pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN;
2. Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.726.427.434,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan menggunakan akun 533111 untuk pekerjaan pembangunan UPT Gorontalo dan UPT Mataram sebesar Rp8.720.897.434,00 pada Kantor Pusat BKN.

- b. Biaya Honorarium Tim Tenaga Pengelola Teknis pembangunan renovasi gedung kantor menggunakan akun 533121 sebesar Rp2.400.000,00 pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh;
- c. Biaya Honorarium Tim Tenaga Pengelola Teknis pembangunan renovasi gedung asrama menggunakan akun 533121 sebesar Rp3.130.000,00 pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN;

Rincian KDP per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.31 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	8,889,774,498.00	168,877,064.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	59,978,850.00	-
3	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	86,380,000.00	-
4	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	63,070,000.00	-
Jumlah		9,099,203,348.00	168,877,064.00

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp789.226.419.037,-

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp789.226.419.037,00 dan Rp746.282.602.430,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2024. Rincian Akumulasi Penyusutan pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.32 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	774,657,579,537.00	590,263,754,174.00	184,393,825,363.00
2	Gedung dan Bangunan	870,549,881,368.00	179,048,856,695.00	691,501,024,673.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,716,999,940.00	19,280,706,123.00	5,436,293,817.00
4	Aset Tetap Lainnya	13,253,848,057.00	633,102,045.00	12,620,746,012.00
Jumlah		1,683,178,308,902.00	789,226,419,037.00	893,951,889,865.00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 disajikan dalam Lampiran Utama A2.

Aset Tak Berwujud
Rp135.615.931.787,-

C.17 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp135.615.931.787,00 dan Rp125.741.319.487,00. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi ATB pada BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Mutasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	125,741,319,487.00
Mutasi tambah:	11,033,498,000.00
Pembelian	10,723,050,000.00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	16,550,000.00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	293,898,000.00
Mutasi kurang:	(1,158,885,700.00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1,158,885,700.00)
Saldo per 30 Juni 2024	135,615,931,787.00
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(125,292,442,425.00)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	10,323,489,362.00

Berdasarkan LRA, BKN belum merealisasikan Belanja Modal Lainnya, sedangkan Penambahan dari Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp10.739.600.000,00. Adapun selisih tersebut berasal dari Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar dimana pengajuan tagihan sudah dilakukan namun SP2D atas tagihan tersebut terealisasi pada bulan Juli.

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai ATB adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi ATB sebesar Rp11.033.498.000,00 berasal dari Kantor Pusat BKN dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian sebesar Rp10.723.050.000,00 berupa *Software* Komputer;
2. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp16.550.000,00 berupa *Software* Komputer;
3. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp293.898.000,00.

Mutasi Kurang transaksi ATB sebesar Rp1.158.885.700,00 berupa Penghentian Aset Dari Penggunaan atas *Software* Komputer berasal dari:

1. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp651.566.250,00;
2. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp507.319.450,00.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 3.34 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Hak Cipta	500,000.00	500,000.00
2	Software Komputer	135,420,431,787.00	125,545,819,487.00
3	Lisensi	-	-
4	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000.00	195,000,000.00
Jumlah Nilai Perolehan		135,615,931,787.00	125,741,319,487.00
Amortisasi ATB		(125,292,442,425)	(124,210,061,367)
Jumlah		10,323,489,362.00	1,531,258,120.00

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.35 Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	130,653,975,457.00	119,620,477,457.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	409,397,750.00	409,397,750.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	22,000,000.00	22,000,000.00
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	713,533,250.00	713,533,250.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	767,754,180.00	767,754,180.00
6	Kantor Regional VII BKN Palembang	886,661,700.00	886,661,700.00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	729,484,450.00	729,484,450.00
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	-	651,566,250.00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	651,566,250.00	651,566,250.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	740,391,250.00	740,391,250.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	41,167,500.00	548,486,950.00
Jumlah		135,615,931,787.00	125,741,319,487.00

Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Per 30 Juni 2024 disajikan pada Lampiran Utama A3.

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0,-

C.18 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan. Dana yang dibatasi penggunaannya pada BKN adalah dana pada rekening penampungan sementara yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang penyelesaian pekerjaannya diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp21.071.862.270,00. Mutasi transaksi terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36 Mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai per 31 Desember 2023	21,071,862,270.00
Mutasi Kurang:	(21,071,862,270.00)
Pembayaran RPATA	(20,892,754,629.00)
Penihilan RPATA	(179,107,641.00)
Saldo per 30 Juni 2024	-

Adapun rincian dana yang dibatasi penggunaannya per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37 Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	-	20,674,809,270.00
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	-	200,880,000.00
3	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	-	147,555,000.00
4	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	48,618,000.00
	Jumlah	-	21,071,862,270.00

Aset Lain-Lain
Rp28.056.844.713,-

C.19 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp28.056.844.713,00 dan Rp21.362.783.827,00. Aset Lain-lain berupa reklasifikasi atas Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 3.38 Mutasi Aset Lain-Lain per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	21,362,783,827.00
Mutasi Tambah:	10,125,267,977.00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	10,125,267,977.00
Mutasi Kurang:	(3,431,207,091.00)
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(293,898,000.00)
Pencatatan barang yang telah dihapuskan	(3,137,309,091.00)
Saldo per 30 Juni 2024	28,056,844,713.00
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2024	(27,716,623,915.00)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	340,220,798.00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Aset Lain-Lain berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp10.125.267.977,00 berupa:

Tabel 3.39 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	541,480,000.00
2	Alat Angkutan	207,609,200.00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2,950,821,028.00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	608,870,812.00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	13,209,000.00
6	Alat Laboratorium	374,835,947.00
7	Komputer	4,082,732,068.00
8	Bahan Perpustakaan	186,824,222.00
9	Aset Tak Berwujud	1,158,885,700.00
	Jumlah	10,125,267,977.00

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berasal dari:

Tabel 3.40 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional III BKN Bandung	207,609,200.00
2	Kantor Regional VI BKN Medan	1,379,231,313.00
3	Kantor Regional VII BKN Palembang	2,903,931,669.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,312,000,435.00
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,815,175,910.00
6	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	507,319,450.00
	Jumlah	10,125,267,977.00

Mutasi Kurang transaksi Aset Lain-Lain sebesar Rp3.431.207.091,00 yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp293.898.000,00 berasal dari Kantor Pusat BKN berupa *Software Komputer*.
2. Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan sebesar Rp3.137.309.091,00 berupa:

Tabel 3.41 Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Angkutan	207,609,200.00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,434,688,842.00
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4,004,000.00
4	Komputer	810,494,377.00
5	Bahan Perpustakaan	173,193,222.00
6	Aset Tak Berwujud	507,319,450.00
	Jumlah	3,137,309,091.00

Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan berasal dari:

Tabel 3.42 Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional III BKN Bandung	207,609,200.00
2	Kantor Regional VI BKN Medan	1,270,731,313.00
3	Kantor Regional VII BKN Palembang	1,151,649,128.00
4	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	507,319,450.00
	Jumlah	3,137,309,091.00

Rincian Aset Lain-lain Per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.43 Rincian Aset Lain-lain per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	16,980,441,189.00	17,274,339,189.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	784,761,700.00	784,761,700.00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	574,138,000.00	574,138,000.00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	252,674,000.00	144,174,000.00
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	2,426,269,041.00	673,986,500.00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,574,939,325.00	262,938,890.00
7	Kantor Regional IX Jayapura	582,370,747.00	582,370,747.00
8	Kantor Regional XIBKN Denpasar	2,815,175,910.00	-
9	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	362,578,247.00	362,578,247.00
10	Kantor Regional XIII BKN Aceh	83,705,650.00	83,705,650.00
11	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	619,790,904.00	619,790,904.00
	Jumlah	28,056,844,713.00	21,362,783,827.00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku Per 30 Juni 2024 tersaji pada Lampiran Utama A2 dan A3.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp153.009.066.340,-

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp153.009.066.340,00 dan Rp145.268.566.532,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.44 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	500,000.00	67,850.00	432,150.00
2	Software Komputer	135,420,431,787.00	125,292,374,575.00	10,128,057,212.00
3	Lisensi	-	-	-
4	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000.00	-	195,000,000.00
	Jumlah	135,615,931,787.00	125,292,442,425.00	10,323,489,362.00
B	Aset Lain-lain	28,056,844,713.00	27,716,623,915.00	340,220,798.00
	Jumlah	163,672,776,500.00	153,009,066,340.00	10,663,710,160.00

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan Per 30 Juni 2024 dalam Lampiran Utama A2 dan A3.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp71.887.956.943,-

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp71.887.956.943,00 dan Rp19.629.558.217,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sampai dengan 30 Juni 2024, BKN memiliki utang kepada pihak ketiga yang terdiri dari:

Tabel 3.45 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	25,458,548,884.00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4,662,550,660.00
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	41,653,050,000.00
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	113,807,399.00
	Jumlah	71,887,956,943.00

Rincian utang pada pihak ketiga per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp25.458.548.884,00 merupakan pembayaran atas SPP/SPM Belanja Pegawai dengan penerbitan SP2D pada bulan Juli. Adapun rincian per satker, yaitu:

Tabel 3.46 Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	18,756,282,799.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	701,513,266.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	488,621,411.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	631,802,860.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	639,728,766.00
6	Kantor Regional V DKI Jakarta	401,178,146.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	481,394,517.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	450,920,999.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	490,475,851.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	346,676,583.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	423,998,228.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	330,245,443.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	469,812,310.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	289,968,990.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	290,976,926.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	264,951,789.00
	Jumlah	25,458,548,884.00

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp4.662.550.660,00 merupakan pembayaran atas SPP/SPM Belanja Barang dengan penerbitan SP2D pada bulan Juli. Adapun rincian per satker, yaitu:

Tabel 3.47 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	2,457,919,685.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	144,860,000.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	127,200,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	193,100,000.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	232,049,800.00
6	Kantor Regional V DKI Jakarta	161,935,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	120,526,000.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	226,932,750.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	177,460,000.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	167,056,000.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	155,987,425.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	144,650,000.00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	55,857,000.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	297,017,000.00
	Jumlah	4,662,550,660.00

3. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp41.653.050.000,00 merupakan pembayaran atas SPP/SPM Belanja Modal dengan penerbitan SP2D pada bulan Juli yang berasal dari Kantor Pusat BKN.
4. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp113.807.399,00 merupakan LS Bendahara yang Belum Disetorkan ke Pegawai yang berasal dari:

Tabel 3.48 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	105,998,999.00
2	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	7,808,400.00
	Jumlah	113,807,399.00

Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp3.084.057.850,-

C.22 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.084.057.850,00 dan Rp0,00. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut. Utang yang Belum Ditagihkan berupa Kuitansi UP yang belum di SPM/SPBy kan dan BAST Barang/Jasa yang belum ditagihkan. Berikut rincian Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 per satker:

Tabel 3.49 Rincian Utang yang Belum Ditagihkan per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	2,435,063,306.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	73,045,002.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	4,974,393.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	106,968,629.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	85,286,772.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	22,312,703.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	71,674,424.00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	4,265,002.00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	102,111,924.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	13,107,370.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	62,697,807.00
12	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	52,677,107.00
13	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	21,144,611.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	28,728,800.00
	Jumlah	3,084,057,850.00

Pendapatan Diterima di
Muka Rp0,-

C.23 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.091.528.298,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum diserahkan kepada Pihak Ketiga. Pendapatan diterima dimuka pada BKN bersumber dari sewa tanah, gedung dan bangunan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun anggaran.

Tabel 3.50 Perbandingan Pendapatan Diterima di Muka

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	-	989,641,310.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	-	1,429,301.00
3	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	-	28,996,835.00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	-	3,482,110.00
5	Kantor Regional XI BKN Manado	-	54,157,333.00
6	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	-	-
7	Pusat Pengembangan ASN	-	13,821,409.00
	Jumlah	-	1,091,528,298.00

Uang Muka dari KPPN

Rp2.300.000.000,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.300.000.000,00 dan Rp0,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Tabel 3.51 Perbandingan Uang Muka dari KPPN

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	500,000,000.00	-
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	120,000,000.00	-
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	120,000,000.00	-
4	Kantor Regional III BKN Bandung	120,000,000.00	-
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	120,000,000.00	-
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	120,000,000.00	-
7	Kantor Regional VI BKN Medan	60,000,000.00	-
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	150,000,000.00	-
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	120,000,000.00	-
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	120,000,000.00	-
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	150,000,000.00	-
12	Kantor Regional XI BKN Manado	120,000,000.00	-
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	150,000,000.00	-
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	120,000,000.00	-
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	120,000,000.00	-
16	Pusat Pengembangan ASN	90,000,000.00	-
	Jumlah	2,300,000,000.00	-

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp683.000,-

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp683.000,00 dan Rp4.236.316,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara yang berasal dari Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh.

Tabel 3.52 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
Kantor Regional IV BKN Makassar	-	4,236,316.00
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	683,000.00	-
Jumlah	683,000.00	4,236,316.00

Ekuitas
Rp3.177.547.825.518,-

C.26 Ekuitas

Ekuitas per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.177.547.825.518,00 dan Rp3.208.549.866.357,00 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp11.812.386.821,-

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah PNPB pada BKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.812.386.821,00 dan Rp12.953.571.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Rincian PNPB

(Dalam Rupiah)

URAIAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,496,478,396.00	1,230,228,045.00	21.64
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusnya	-	29,400,000.00	(100.00)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	100,300,000.00	149,475,000.00	(32.90)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1,125,485,000.00	1,124,052,000.00	0.13
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	9,058,485,000.00	10,403,004,000.00	(12.92)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	31,638,425.00	17,412,166.00	81.70
TOTAL	11,812,386,821.00	12,953,571,211.00	(8.81)

Pendapatan Operasional pada BKN mengalami penurunan sebesar 8,81% dari tahun anggaran sebelumnya disebabkan belum banyaknya yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN untuk menyelenggarakan pelatihan. Adapun Pendapatan Operasional BKN per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Operasional per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	10,418,956,735.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	14,817,301.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	4,381,474.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	5,469,310.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3,375,358.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	29,668,770.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	18,769,548.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	13,736,982.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	9,188,471.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	22,717,100.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	21,707,994.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	55,683,683.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	49,024,368.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,144,889,727.00
	Jumlah	11,812,386,821.00

Beban Pegawai
Rp219.655.965.595,-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp219.655.965.595,00 dan Rp198.111.463.150,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan aset.

Tabel 4.3 Perbandingan Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	106,144,702,806.00	104,097,716,575.00	1.97
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	3,829,703,747.00	-	100.00
Beban Lembur	534,259,000.00	359,818,000.00	48.48
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	109,147,300,042.00	93,653,928,575.00	16.54
JUMLAH	219,655,965,595.00	198,111,463,150.00	10.87

Adapun Beban Pegawai BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Beban Pegawai per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	154,620,839,876.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	6,878,160,903.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	4,959,486,856.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	5,711,106,664.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	6,293,362,413.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	3,863,509,003.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	4,725,821,932.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	4,389,465,956.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	4,854,226,195.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	3,207,876,288.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	4,266,014,684.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	3,218,523,936.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	4,587,630,923.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	2,793,571,885.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,710,949,103.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,575,418,978.00
	Jumlah	219,655,965,595.00

Beban Persediaan
Rp2.809.009.678,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.809.009.678,00 dan Rp3.631.281.899,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 4.5 Perbandingan Rincian Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2,809,009,678.00	3,601,269,010.00	(22.00)
Beban Persediaan Lainnya	-	30,012,889.00	(100.00)
JUMLAH	2,809,009,678.00	3,631,281,899.00	(22.64)

Adapun Beban Persediaan BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Persediaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	1,020,336,290.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	189,479,386.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	168,974,257.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	139,940,737.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	73,875,549.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	89,147,543.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	189,034,232.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	123,991,224.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	90,798,312.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	62,994,801.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	73,499,535.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	159,008,767.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	71,541,986.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	116,292,130.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	36,765,979.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	203,328,950.00
	Jumlah	2,809,009,678.00

Beban Barang dan Jasa
Rp49.008.644.176,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp49.008.644.176,00 dan Rp81.237.444.589,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang

timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 4.7 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	26,731,656,096.00	25,298,374,741.00	5.67
Beban Barang Non Operasional	5,067,726,740.00	10,288,760,101.00	(50.75)
Beban Langganan Daya dan Jasa	17,031,672,277.00	45,426,117,943.00	(62.51)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	175,924,063.00	217,587,304.00	(19.15)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	1,665,000.00	6,604,500.00	(74.79)
JUMLAH	49,008,644,176.00	81,237,444,589.00	(39.67)

Adapun Beban Barang dan Jasa BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Beban Barang dan Jasa per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	22,536,907,881.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,738,718,078.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1,406,608,859.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2,026,603,528.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	2,518,460,255.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	1,730,835,515.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1,274,997,496.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	2,438,581,634.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1,813,404,428.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	874,936,527.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1,659,062,748.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1,594,475,271.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,803,597,523.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	898,889,283.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	978,367,455.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	3,714,197,695.00
	Jumlah	49,008,644,176.00

Beban Pemeliharaan
Rp9.898.206.906,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.898.206.906,00 dan Rp9.926.279.455,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 4.9 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,012,370,855.00	3,867,706,481.00	3.74
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	90,282,731.00	62,396,955.00	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	275,013,653.00	489,615,186.00	(43.83)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,608,940,801.00	4,595,459,567.00	0.29
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,550,000.00	-	100.00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	148,412,550.00	-	100.00
Beban Pemeliharaan Irigasi	4,983,000.00	20,481,000.00	(75.67)
Beban Pemeliharaan Jaringan	12,936,823.00	12,972,989.00	(0.28)
Beban Pemeliharaan Lainnya	266,747,895.00	298,984,468.00	(10.78)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	470,968,598.00	572,799,309.00	(17.78)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	924,000.00	(100.00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	4,939,500.00	(100.00)
JUMLAH	9,898,206,906.00	9,926,279,455.00	(0.28)

Adapun Beban Pemeliharaan BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rincian Beban Pemeliharaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	4,234,499,031.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	421,105,814.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	355,742,786.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	297,991,340.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	428,599,722.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	288,670,936.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	382,964,313.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	406,940,754.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	444,471,391.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	42,935,585.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	339,601,147.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	552,967,293.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	308,701,314.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	82,146,134.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	200,119,717.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,110,749,629.00
	Jumlah	9,898,206,906.00

Beban Perjalanan Dinas
Rp23.669.063.183,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.669.063.183,00 dan Rp31.708.838.403,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

Tabel 4.11 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,105,569,706.00	25,638,545,358.00	(37.18)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	309,625,201.00	364,782,893.00	(15.12)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,551,052,200.00	2,850,348,900.00	(45.58)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,452,861,031.00	2,727,173,456.00	99.95
Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	249,955,045.00	127,987,796.00	95.30
JUMLAH	23,669,063,183.00	31,708,838,403.00	(25.35)

Adapun Beban Perjalanan Dinas BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rincian Beban Perjalanan Dinas per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	14,013,220,589.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	610,318,571.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	460,793,765.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	404,041,351.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	840,633,338.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	438,107,383.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	452,935,682.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	820,036,609.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	705,735,234.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	894,989,640.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	613,371,401.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	781,719,512.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	658,790,769.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	619,827,917.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	813,695,378.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	540,846,044.00
	Jumlah	23,669,063,183.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp52.033.740.348,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52.033.740.348,00 dan Rp35.690.443.921,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36,396,629,694.00	20,627,772,272.00	76.44
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13,327,770,366.00	13,199,395,405.00	0.97
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	222,486,313.00	239,721,313.00	(7.19)
Beban Penyusutan Irigasi	55,380,930.00	56,202,355.00	(1.46)
Beban Penyusutan Jaringan	57,703,882.00	57,703,883.00	(0.00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	30,142,916.00	232,603,849.00	(87.04)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	15,034,489.00	13,845,489.00	8.59
Jumlah Penyusutan	50,105,148,590.00	34,427,244,566.00	45.54
Beban Amortisasi			
Beban Amortisasi Software	1,928,588,187.00	1,247,508,284.00	54.60
Beban Amortisasi Hak Cipta	3,571.00	3,571.00	0.00
Beban Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan	-	15,687,500.00	0.00
Jumlah Amortisasi	1,928,591,758.00	1,263,199,355.00	52.68
JUMLAH	52,033,740,348.00	35,690,443,921.00	45.79

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp(13.736.966),-

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(13.736.966,00) dan Rp6.760,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.14 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPN	-	6,760.00	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(13,736,966.00)	-	100.00
JUMLAH	(13,736,966.00)	6,760.00	0.00

Kegiatan Non
Operasional
Rp(522.287.325) ,-

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(522.287.325,00) dan Rp2.013.147.885,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15 Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional

(Dalam Rupiah)

URAIAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(514,195,653.00)	264,326,374.00	(294.53)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	112,089,389.00	271,733,499.00	(58.75)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	626,285,042.00	7,407,125.00	8355.17
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	(8,091,672.00)	1,748,821,511.00	(100.46)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	41,447,068.00	1,898,993,056.00	(97.82)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	49,538,740.00	150,171,545.00	(67.01)
Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	(522,287,325.00)	2,013,147,885.00	(125.94)

Defisit Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2024 sebesar Rp(522.287.325,00) berasal dari:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp112.089.389,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp88.199.500,00 yang berasal dari:

Tabel 4.16 Rincian Pendapatan dari Penjualan
Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional III BKN Bandung	55,656,000.00
2	Kantor Regional VI BKN Medan	32,543,500.00
Jumlah		88,199,500.00

b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp23.889.889,00 yang berasal dari Kantor Regional XI BKN Manado.

2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp626.285.042,00 yang merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset yang berasal dari:

Tabel 4.17 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional V BKN Jakarta	434,314,820.00
2	Kantor Regional VI BKN Medan	173,193,222.00
3	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	18,777,000.00
Jumlah		626,285,042.00

3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp41.447.068,00 yang terdiri atas:

a. Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp7.799.740,00 yang berasal dari:

Tabel 4.18 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	2,514,340.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	164.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	366,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,269.00
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	35,150.00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	547.00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	455,150.00
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	190,000.00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	1,295,200.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	140,600.00
11	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,368,020.00
12	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	433,300.00
Jumlah		7,799,740.00

- b. Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp33.197.328,00 yang berasal dari:

Tabel 4.19 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	16,418,500.00
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	381,144.00
3	Kantor Regional V BKN Jakarta	785,500.00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	208,800.00
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	1,118,345.00
6	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,992,500.00
7	Kantor Regional XI BKN Manado	630,300.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,212,859.00
9	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	8,145,888.00
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,303,492.00
	Jumlah	33,197,328.00

- c. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp450.000,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN.
4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp49.538.740,00 berupa Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar yang berasal dari Kantor Regional X BKN Denpasar.

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp3.208.549.866.357,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.208.549.866.357,00 dan Rp3.173.325.597.443,00.

Surplus (Defisit) LO
(Rp345.770.793.424,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar (Rp345.770.793.424,00) dan (Rp345.339.039.081,00). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0,-

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas
(Rp1.596.978.911,-)

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar (Rp1.596.978.911,00). Sedangkan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah Koreksi yang mengurangi Ekuitas sebesar (Rp750.702.663,00). Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan antara Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dan Koreksi Lainnya. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

(Dalam Rupiah)

URAIAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Koreksi atas Reklasifikasi	-	(4,440,000.00)	(100.00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(1,596,978,911.00)	(769,461,115.00)	107.55
Koreksi Lain-Lain	-	23,198,452.00	(100.00)
JUMLAH	(1,596,978,911.00)	(750,702,663.00)	112.73

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,-*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,-*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,-*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi yang merupakan bagian dari pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (391151) yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN. Koreksi atas Reklasifikasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp4.440.000,00).

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan, jembatan dan bangunan air.

*Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp1.596.978.911,-)*

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar (Rp1.596.978.911,00) dan (Rp769.461.115,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 5.2 Rincian Nilai Koreksi Aset Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Jenis Penyesuaian	Koreksi		Total
	Debit	Kredit	
A. Aset Tetap			
Tanah			-
Peralatan dan Mesin	2,076,123,000.00	11,132,456,630.00	(9,056,333,630.00)
Gedung dan Bangunan	953,244,600.00	1,977,252,600.00	(1,024,008,000.00)
Jalan dan Jembatan			-
Irigasi			-
Aset Tetap Lainnya	-	186,824,222.00	(186,824,222.00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	953,244,600.00	-	953,244,600.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	8,742,212,430.00	1,596,656,680.00	7,145,555,750.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	741,744.00	-	741,744.00
Piutang Lainnya	43,038,297.00	43,038,297.00	-
B. Aset Lainnya			
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8,966,382,277.00	-	8,966,382,277.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	8,742,212,430.00	(8,742,212,430.00)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	293,898,000.00	(293,898,000.00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	293,898,000.00	-	293,898,000.00
C. Lain-Lain			
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	263,300,000.00	-	263,300,000.00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	66,856,600.00	-	66,856,600.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	16,318,400.00	-	16,318,400.00
Jumlah	22,375,359,948.00	23,972,338,859.00	(1,596,978,911.00)

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari:

Tabel 5.3 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	1,597,720,655.00
2	Kantor Regional XI BKN Manado	(741,744.00)
	Jumlah	1,596,978,911.00

Koreksi Lain-lain Rp0,-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp23.198.452,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp316.365.731.496,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp316.365.731.496,00 dan Rp293.021.456.023,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 5.4 Rincian Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
1. Ditagihkan ke Entitas Lain	329,253,371,693.00
2. Diterima dari Entitas Lain	(13,801,169,897.00)
3. Transfer Keluar	(12,303,171,470.00)
4. Transfer Masuk	12,303,171,470.00
5. Pengesahan Hibah Langsung	913,529,700.00
Jumlah	316,365,731,496.00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 30 Juni 2024, Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp329.253.371.693,00.

2. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 30 Juni 2024, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp13.801.169.897,00).

3. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar (Rp12.303.171.470,00) merupakan transaksi perpindahan aset antar entitas yang terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Transfer Keluar Per Satker

(Dalam Rupiah)

Entitas Asal	Uraian	Nilai
Kantor Pusat BKN Jakarta	Barang Konsumsi	2,985,900.00
	Peralatan dan Mesin	13,622,653,500.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,322,467,930.00)
JUMLAH		12,303,171,470.00

4. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp12.303.171.470,00 merupakan transaksi perpindahan aset antar entitas yang terdiri dari:

Tabel 5.6 Rincian Transfer Masuk Per Satker

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Uraian	Nilai
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Peralatan dan Mesin	300,300,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,550,000.00)
Kantor Regional II BKN Surabaya	Peralatan dan Mesin	236,650,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,421,250.00)
Kantor Regional III BKN Bandung	Barang Konsumsi	1,875,900.00
	Peralatan dan Mesin	152,000,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,000,000.00)
Kantor Regional IV BKN Makasar	Peralatan dan Mesin	2,805,900,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(292,007,500.00)
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	Peralatan dan Mesin	1,277,268,500.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(123,802,500.00)
Kantor Regional VI BKN Medan	Peralatan dan Mesin	1,957,790,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(233,736,250.00)
Kantor Regional VII BKN Palembang	Peralatan dan Mesin	3,237,465,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(360,254,430.00)

Entitas Tujuan	Uraian	Nilai
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Peralatan dan Mesin	544,980,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(21,375,000.00)
Kantor Regional IX BKN Jayapura	Peralatan dan Mesin	156,400,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,125,000.00)
Kantor Regional X BKN Denpasar	Peralatan dan Mesin	892,490,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(77,452,500.00)
Kantor Regional XI BKN Manado	Peralatan dan Mesin	419,070,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(16,625,000.00)
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Peralatan dan Mesin	1,226,520,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(119,493,500.00)
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Peralatan dan Mesin	127,270,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,750,000.00)
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Barang Konsumsi	1,110,000.00
	Peralatan dan Mesin	288,550,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11,875,000.00)
JUMLAH		12,303,171,470.00

5. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp913.529.700,00. Pengesahan Hibah Langsung berasal dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp913.529.700,00, yaitu berupa pengesahan hibah atas Tanah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Perjanjian Naskah Hibah Nomor 100.3.7/0150/PUPR-PERKIM/GUB dan Nomor 43/HM.04.01/2023 Tanggal 15 Januari 2024.

6. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00.

Ekuitas Akhir
Rp3.177.547.825.518,-

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing – masing sebesar Rp3.177.547.825.518,00 dan Rp3.120.257.311.722,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Gedung dan Bangunan Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Melalui Surat Nomor 149/1/KR/III/1/2017 tanggal 9 Februari 2017, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara telah membuat surat permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala BKN. Selain surat tersebut, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara juga mengajukan surat kepada Menteri Keuangan dengan Nomor K26-30/V21-10/06 tanggal 9 Februari 2017 permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Berdasar informasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, Tanah seluas 7.390,5 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 27.400 m² dimana pencatatannya ada dalam LBKP Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat berdasar pada PMK nomor 59 tanggal 20 Juli 2005, yang berlokasi di Jl. Surapati No. 10 merupakan tanah negara bekas tanah *Rech van Eigendom* No.11582 dengan surat hak tanah nomor 257 tgl. 15 April 1950 dan bekas tanah *Rech van Eigendom* No.11577 dengan surat hak tanah nomor 273 tgl. 20 April 1950. Selain diklaim oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan dasar naskah serah terima aset-aset eks Dana Pensiun Indonesia tanah tersebut juga diklaim oleh Pemerintah Kota Bandung dengan dasar kepemilikan bukti jual beli tanah.

Berdasarkan penuturan dari KPKNL Bandung, terdapat dua pengajuan atas permintaan sertifikat tanah yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui surat nomor 408/1/1992 tanggal 27 Agustus 1992, yang diajukan oleh Kepala Kantor Regional III BKN dan melalui surat Nomor S-1310/A.954/0896 tanggal 15 Agustus 1996, yang diajukan oleh Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran Departemen Keuangan. Sampai saat ini tanah tersebut masih dalam proses penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga dari pihak Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, pihak Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat, maupun pihak Kantor Regional III BKN belum ada satu pun yang memiliki sertifikat tanah tersebut.

2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di ibu kota seluruh Indonesia. Pembentukan Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN ini dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian khususnya layanan penyelenggara seleksi calon dan kompetensi Aparatur Sipil Negara serta mempercepat perbaikan kualitas sistem seleksi dan SDM ASN, BKN mendorong terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memfasilitasi pemanfaatan *Computer Assisted Test* (CAT) dan *Assesment* yang berkaitan

dengan sistem rekrutmen dan pemetaan kompetensi pegawai ASN di daerah-daerah yang tidak terdapat Kantor Regional BKN.

Adapun Rincian *Memorandum of Understanding* (MoU) Pinjam Pakai antara BKN dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rincian MoU Pinjam Pakai Sejak Tahun 2015

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Proses
1	Mataram	900/3824.9/BPKAD/2015 06/K/KS/1/2016 21 Desember 2015	Mataram Barat, Selarapang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pinjam Pakai s/d 2025
2	Semarang	030/000639 04/A/KS/1/2016 12 Januari 2016	Jalan Soekarno Hatta KM. 29 Bergas, Kebonan Randugunting Bergas, Semarang, Jawa Tengah, 50552	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Pinjam Pakai s/d 2026
3	Jambi	3228/BAST/BPKPD-7.2/2021 47/HM.05/01/2021 30 Desember 2021	Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361	Kantor Regional VII BKN Palembang	Pinjam Pakai s/d 2026
4	Serang	032/764-BPKAD/2023 2/HM.04.01/2023 03 Maret 2023	Jalan KH. Sokhari No. 40, Cipare Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten	Kantor Regional III BKN Bandung	Pinjam Pakai s/d Maret 2025
5	Ambon	011-26 Tahun 2022 7/HM.05.01/2022 8 Maret 2022	Jl. A.I.S Nasution No. 8, Karang Panjang, Kel. Amantelu Sirimau, Kota Ambon, Maluku	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pinjam Pakai s/d Maret 2027
6	Sorong	030/449/2017 01/SDJ/V/2017 23 Mei 2017	Jl. Pemda Kompleks Kantor Pemda Kelurahan Airmas Distrik Airmas Km. 24 Kabupaten Sorong	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Pinjam Pakai s/d Mei 2022
7	Mamuju	B-800/512/2023 11/HM.04.01/2023 06 Maret 2023	Jl. Martadinata Simboro Kec. Simboro Dan Kepulauan Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, 91512	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pinjam Pakai s/d Maret 2028
8	Palangkaraya	900/146/BPKAD/2023 5/HM.04.01/2023 22 Februari 2023	Jl. W. Sudirohusodo No. 20 Langkai Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah 74874	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pinjam Pakai s/d April 2028
9	Lampung	415.4/1753/VI.02/2022 15/HM.05.01/2022 18 Mei 2022	Jl. Nusa Indah 1 No 02A Sumur Batu Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 35214	Kantor Regional V BKN Jakarta	Pinjam Pakai s/d April 2027
10	Batam	124/900.1.4.3/IV/2023 13/HM.04.01/2023 03 April 2023	Gedung Bersama Pemko Belian Batam Kota Batam Kepulauan Riau	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pinjam Pakai s/d April 2028
11	Balikpapan	032/0186/BKAD 3/HM.04.01/2024 01 Februari 2024	Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 11 No. 3 Sepinggan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pinjam Pakai s/d Februari 2029

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Proses
12	Pangkal Pinang	01/PP/BAKEUDA/II/2019 06/K/KS/II/2019 28 Februari 2019	Jl. M Saleh Zaimudin, Air Salemba, Pangkalpinang, Bangka Belitung	Kantor Regional VII BKN Palembang	Pinjam Pakai s/d Februari 2024
13	Tarakan	032/ASET-III/003/2024 10/HM.04.01/2024 07 Maret 2024	Jl. Kalimantan No. 1 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pinjam Pakai s/d Juni 2029
14	Kupang	BU.028/1635/BPKAD/XI/2020 37.1/A/KS/XI/2020 02 November 2020	Jl. Timor Raya Km.36-Oelamasi	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pinjam Pakai s/d November 2025

Berdasarkan MOU Pinjam Pakai antara BKN dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor: 030/448/2017 dan 22/A/KS/2017 tanggal 23 Mei 2017, perjanjian pinjam pakai tanah, gedung dan bangunan UPT Sorong telah berakhir pada Mei 2022. Sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Sorong Nomor: 800/281/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemda Kabupaten Sorong Papua Barat, UPT Sorong masih diperbolehkan menempati Tanah, Gedung dan Bangunan tersebut selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2022-2025.

Berdasarkan MOU Pinjam Pakai antara BKN dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor: 01/PP/BAKEUDA/II/2019 dan 06/K/KS/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, perjanjian pinjam pakai tanah, gedung dan bangunan UPT Pangkalpinang telah berakhir pada Februari 2024. Sesuai dengan Surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 032/049/BAKEUDA/I/2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, UPT Pangkalpinang masih diperbolehkan menempati Tanah, Gedung dan Bangunan tersebut selama 5 (tiga) tahun dari tahun 2024-2029.

Dari 21 UPT yang dimiliki BKN sampai dengan tahun 2024, terdapat 6 UPT yang telah tercatat mempunyai kepemilikan atas Tanah dan Gedung Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2 Rincian Kepemilikan UPT sampai dengan Tahun 2024

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Proses
1	Kendari	028/947 KR.IV.K.26-25/P.7-44/2018 15 Februari 2018	Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93122	Kantor Regional IV BKN Makassar	Hibah TA 2018
2	Gorontalo	900/BKPG/2946/IX/2022 23/PL.03.04/KE/K/2022 22 Agustus 2022	Jl. H.D.I Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Gorontalo 96181	Kantor Regional XI BKN Manado	Hibah TA 2022
3	Padang	030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 03/HM.04.01/BA/A/2023 27 Februari 2023	Jl. Adinegoro No 6-7, Kota Padang	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Hibah TA 2023

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Proses
4	Bengkulu	43/PPA/Roum/VII/2016 29 Juli 2016	Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu 38119	Kantor Regional VII BKN Palembang	Tanah dan Gedung Bangunan sendiri
5	Donggala	011/231/BPKAD/2018 42/A/KS/2018 17 Desember 2018	Jl. Bantilan No. 20 Lere Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah 94111	Kantor Regional IV BKN Makassar	Hibah TA 2021
6	Ternate	800/101/SETDA/2018 01/K/KS/2019 04 Januari 2019	Jl. Jato no. 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	Kantor Regional XI BKN Manado	Hibah TA 2021

3. Terdapat penerimaan Hibah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan sebagai pengganti atas MoU Pinjam Pakai untuk penggunaan Kantor Regional XIV BKN Manokwari sesuai dengan BAST Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada BKN dengan Nomor: 032/508/GPB/2021 dan Nomor: 9/HM.05.01/2021, Tanggal 15 Maret 2021. Atas penerimaan hibah tersebut, Tanah seluas 7.893 m² telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. BKN dan Pengesahan atas Hibah Tanah, Gedung dan Bangunan tersebut masih dalam proses kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kantor Wilayah Kemenkeu setempat.
4. Terdapat penerimaan barang berupa Pojok Baca Digital (POCADI) yang diterima oleh 2 (dua) satker dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kantor Pusat BKN menerima Transfer (Masuk) dari Perpustakaan Nasional berupa 1 set Pojok Baca Digital (POCADI) dengan nomor Berita Acara Serah Terima Nomor 5708/4.2/PLK.03.07/2022 tanggal 1 Desember 2022 senilai Rp171.971.079,00. Namun, ADK transfer masuk belum dikirim oleh pihak Perpustakaan Nasional. Sehingga sampai T.A. 2022 berakhir, POCADI belum dapat dicatat pada aset BKN.
 - b. Kantor Regional IV BKN Makasar menerima Hibah (Masuk) dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah ditempatkan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sesuai Naskah Perjanjian Bantuan Hibah antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan BKN Regional IV Makasar Tahun Anggaran 2023 Nomor 041/171/Dispu.Arsip, tanggal 31 Januari 2023 berupa Pojok Baca Digital (POCADI) dan kelengkapannya sebesar Rp151.910.000,00 dan Buku Siap Layan sebesar Rp18.135.000,00 atas Bantuan Perpustakaan Nasional Tahun 2021.
5. Terdapat perbedaan pencatatan aset pada aplikasi berdasarkan dokumen sumber dan kondisi fisik di lapangan berupa Gedung dan Bangunan pada UPT Kendari yang berasal dari penerimaan hibah pada tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.3 Perbandingan Rincian Pencatatan Aset dengan Dokumen Sumber dan Cek Fisik di Lapangan

No	Aset BMN	Dokumen Sumber Surat Pengesahan Hibah No. 001/SP3HL-BJB/KR.IV/I/2019		Dokumen Sumber Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) No. 219 Tahun 2018		Dokumen Sumber Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) No. 996/007		Hasil Cek Fisik Tim Khusus Kantot Regional IV BKN Makasar	
		Luas (M2)	Nilai (Rp)	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Luas (M2)	Ket
1	Tanah, Gedung dan Bangunan, Pembawa Air Kotor					2,137	2,508,967,583		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	115	79,639,000			118.63	Lebih Besar
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	402	26,502,458			418.93	Lebih Kecil
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	442	997,941,000			432.29	Lebih Kecil
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	170	47,698,000	170	47,698,000			170	Sama
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	75	44,900,000			77.95	Lebih Besar
7	Bangunan Gedung Kantor Lain lain	-	-	407	29,778,750			405.60	Lebih Kecil
8	Bagunan Gedung tempat pertemuan	-	-	200	382,359,250			189.66	Lebih Kecil
9	Pagar	610	167,825,625	610	167,825,625				
10	Bangunan air kotor	132	16,428,500	132	16,428,500				
11	Tanah	2,137	715,895,000	2,137	715,895,000			2,159	Lebih Besar
TOTAL			947,847,125		2,508,967,583		2,508,967,583		

Selain adanya selisih perhitungan luas pada saat cek fisik, tim khusus yang dibentuk oleh Kantor Regional IV BKN Makasar dan tim monev dari Biro Keuangan menemukan adanya 4 Gedung/Bangunan semi permanen yang belum dilakukan pencatatan secara dokumen karena tidak ada dokumen sumber, yaitu 3 Gedung Semi Permanen Tanpa Atap dan 1 Gedung Semi Permanen untuk Genset. Adapun hasil diskusi dan kordinasi dengan Pembina Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI pada saat penyelenggaraan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah dengan melaksanakan Sensus BMN di seluruh wilayah satuan kerja BKN untuk menginventarisir ulang status kepemilikan barang/aset milik negara yang dikelola oleh BKN sebagai tindak lanjut dari kegiatan penatausahaan dan pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

6. Terdapat setoran pendapatan oleh PT. Taspen (Persero) pada Kantor Pusat BKN yang berasal dari potongan pegawai BKN yang telah pensiun. Dasar dari setoran tersebut adalah masih adanya kewajiban pengembalian dana ke negara oleh para pegawai BKN hingga masa pensiun. Sistem pemotongannya adalah PT. Taspen (Persero) selaku pengelola dana pensiun memotong setiap bulan (sistem cicilan) gaji para pegawai tersebut kemudian menyetorkan ke BKN tiap bulannya. Pendapatan tersebut di BKN muncul sebagai Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931). Pada Semester I Tahun Anggaran 2024, jumlah Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931) senilai Rp450.000,00 atas nama Adhika Pranaya, SE.

Jakarta, 29 Juli 2024

Pt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Hayomo Dwi Putranto

LAMPIRAN UTAMA

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAFTAR REKENING BENDAHARA SATKER BKN
PER 30 JUNI 2024**

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	SALDO 30 JUNI 2024	REKENING			
			NOMOR	NOMOR IZIN	NAMA	BANK & CABANG
REKENING PENGELUARAN						
1	Kantor Pusat BKN	-	652320172201000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA	BRI KC JAKARTA OTISTA
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	110,215,681.00	8100120172411000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 030 KANREG I BKN YOGYA	MANDIRI KC YOGYAKARTA SUDIRMAN
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	118,124,859.00	652324504541000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 165 KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	BRI KC JEMURSARI SURABAYA
4	Kantor Regional III BKN Bandung	12,847,929.00	9890840172371000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 095 KANTOR REGIONAL III BKN	BNI KCP PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	56,897,657.00	9890845606351000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 136 KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	BNI KC MATTOANGIN
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	61,928,430.00	9890846062541000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 KANREG V BKN JAKARTA	BNI KC JATINEGARA
7	Kantor Regional VI BKN Medan	56,736,570.00	8100126062611000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 004 KANREG VI BKN	MANDIRI KC MEDAN IMAM BONJOL
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	62,262,772.00	9890846223721000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 014 KANREG VII BKN PLG	BNI KC. PALEMBANG SUDIRMAN
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	115,186,452.00	9890846223861000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 045 BKN KANREG VIII BANJARMASIN	BNI KCP DEPARTEMEN KEUANGAN PECENONGAN
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	-	030701001118309	S-890/WPB.30/KP.063/2015	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
		-	652326223901000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	127,610,341.00	9890846678821000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 037 KANREG X BKN DENPASAR	BNI KC 1946
12	Kantor Regional XI BKN Manado	57,297,201.00	9890846678961000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 049 KANREG XI BKN MANADO	BNI KCP JATINEGARA BKN
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	141,320,145.00	652326679011000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 008 KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	BRI KC Jakarta Gatot Subroto
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	31,831,111.00	8100996677521000	S-3029/WPB.12/KP.03/2020	BPG 001 BKN KANTOR REGIONAL XIII BKN BA	BRI SYARIAH
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	-	652326676521000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 065 KANREG XIV BKN MKW 667652	BRI KC Manokwari
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	79,561,883.00	654500205051000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KC Otista
REKENING PENERIMAAN						
17	Kantor Pusat BKN	-	034001002735302	S-6002/WPB.12/KP.03/2019	BPN 088 BKN 017220	BRI KC JAKARTA OTISTA
18	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000123304	S-389/WPB.13/KP.04/2018	BPN 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KCP KPPN BOGOR
REKENING LAINNYA						
19	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000127308	S-678/WPB.13/KP.04/2018	RPL 023 KS PUSBANG ASN UTK DIKLAT	BRI KCP KPPN BOGOR

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	9=4-8
131111	Tanah	585,438.00	2,331,580,054,368.00	-	2,331,580,054,368.00
20101	TANAH PERSIL	585,438.00	2,331,580,054,368.00	-	2,331,580,054,368.00
20103	LAPANGAN	-	-	-	-
132111	Peralatan dan Mesin	67,130.00	774,657,579,537.00	(590,263,754,174.00)	184,393,825,363.00
30101	ALAT BESAR DARAT	-	-	-	-
30103	ALAT BANTU	218.00	38,549,943,821.00	(30,201,053,848.00)	8,348,889,973.00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	215.00	40,478,527,720.00	(31,969,497,314.00)	8,509,030,406.00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	108.00	222,531,720.00	(212,561,720.00)	9,970,000.00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29.00	6,062,155,711.00	(5,702,052,670.00)	360,103,041.00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	40.00	126,802,050.00	(116,297,990.00)	10,504,060.00
30303	ALAT UKUR	8.00	109,795,050.00	(67,112,400.00)	42,682,650.00
30401	ALAT PENGOLAHAN	6.00	49,107,300.00	(49,107,300.00)	-
30501	ALAT KANTOR	9,789.00	83,542,632,264.00	(78,615,532,645.00)	4,927,099,619.00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,830.00	148,523,753,596.00	(133,081,680,000.00)	15,442,073,596.00
30601	ALAT STUDIO	1,183.00	40,248,652,454.00	(27,072,314,829.00)	13,176,337,625.00
30602	ALAT KOMUNIKASI	603.00	5,020,848,910.00	(4,930,794,208.00)	90,054,702.00
30603	PERALATAN PEMANCAR	12.00	1,440,181,793.00	(1,177,995,555.00)	262,186,238.00
30701	ALAT KEDOKTERAN	325.00	939,504,794.00	(847,819,722.00)	91,685,072.00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14.00	120,200,625.00	(81,703,963.00)	38,496,662.00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	84.00	5,420,216,017.00	(5,186,763,802.00)	233,452,215.00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1.00	18,616,500.00	(4,964,400.00)	13,652,100.00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17.00	87,670,000.00	(40,637,130.00)	47,032,870.00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1.00	4,284,000.00	(1,071,000.00)	3,213,000.00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2.00	2,400,000.00	(1,500,000.00)	900,000.00
31001	KOMPUTER UNIT	10,707.00	154,202,871,031.00	(101,173,580,148.00)	53,029,290,883.00
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,819.00	246,713,587,767.00	(167,231,505,907.00)	79,482,081,860.00
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6.00	64,269,000.00	(2,142,300.00)	62,126,700.00
31503	ALAT SAR	57.00	2,169,719,500.00	(2,169,719,500.00)	-
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	12.00	218,556,314.00	(52,895,574.00)	165,660,740.00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8.00	54,978,600.00	(42,623,675.00)	12,354,925.00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27.00	143,815,000.00	(140,868,574.00)	2,946,426.00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	9.00	121,958,000.00	(89,958,000.00)	32,000,000.00
133111	Gedung dan Bangunan	496.00	870,549,881,368.00	(179,048,856,695.00)	691,501,024,673.00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	171.00	750,449,649,432.00	(156,486,557,898.00)	593,963,091,534.00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	296.00	104,674,567,706.00	(20,021,525,506.00)	84,653,042,200.00
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1.00	45,569,000.00	(6,509,854.00)	39,059,146.00
40401	TUGU/TANDA BATAS	28.00	15,380,095,230.00	(2,534,263,437.00)	12,845,831,793.00
134111	Jalan dan Jembatan	58,771.00	16,468,966,800.00	(16,053,832,888.00)	415,133,912.00
50101	JALAN	58,761.00	16,466,806,800.00	(16,053,445,200.00)	413,361,600.00
50102	JEMBATAN	10.00	2,160,000.00	(387,688.00)	1,772,312.00

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	9=4-8
134112	Irigasi	27.00	2,980,446,163.00	(843,416,697.00)	2,137,029,466.00
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2.00	257,076,600.00	(35,417,302.00)	221,659,298.00
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2.00	159,020,000.00	(27,052,788.00)	131,967,212.00
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1.00	16,428,500.00	(16,428,500.00)	-
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11.00	1,757,299,063.00	(576,058,765.00)	1,181,240,298.00
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4.00	440,714,000.00	(107,328,735.00)	333,385,265.00
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7.00	349,908,000.00	(81,130,607.00)	268,777,393.00
134113	Jaringan	32.00	5,267,586,977.00	(2,383,456,538.00)	2,884,130,439.00
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2.00	335,572,500.00	(209,137,040.00)	126,435,460.00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4.00	1,783,479,940.00	(280,422,084.00)	1,503,057,856.00
50310	INSTALASI LAIN	7.00	951,173,820.00	(951,173,820.00)	-
50401	JARINGAN AIR MINUM	1.00	103,840,700.00	(62,304,416.00)	41,536,284.00
50402	JARINGAN LISTRIK	16.00	2,028,728,367.00	(832,712,964.00)	1,196,015,403.00
50403	JARINGAN TELEPON	2.00	64,791,650.00	(47,706,214.00)	17,085,436.00
135111	Aset Tetap Renovasi	24.00	11,626,062,154.00	(583,982,495.00)	11,042,079,659.00
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1.00	3,998,500.00	-	3,998,500.00
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	22.00	11,541,825,254.00	(583,982,495.00)	10,957,842,759.00
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1.00	80,238,400.00	-	80,238,400.00
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	-	-	-	-
135121	Aset Tetap Lainnya	9,239.00	1,627,785,903.00	(49,119,550.00)	1,578,666,353.00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,996.00	764,611,803.00	-	764,611,803.00
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1.00	21,500,000.00	-	21,500,000.00
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211.00	676,955,000.00	-	676,955,000.00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29.00	84,719,100.00	(49,119,550.00)	35,599,550.00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	887.00	21,948,433,338.00	(21,798,412,540.00)	150,020,798.00
30103	ALAT BANTU	1.00	541,480,000.00	(541,480,000.00)	-
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	-	-	-
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	-	-	-
30303	ALAT UKUR	-	-	-	-
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	-	-	-
30501	ALAT KANTOR	28.00	723,910,086.00	(721,833,286.00)	2,076,800.00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	311.00	1,190,462,852.00	(1,186,177,252.00)	4,285,600.00
30601	ALAT STUDIO	15.00	1,536,038,409.00	(1,536,038,409.00)	-
30602	ALAT KOMUNIKASI	23.00	557,654,610.00	(557,654,610.00)	-
30701	ALAT KEDOKTERAN	4.00	13,209,000.00	(11,750,400.00)	1,458,600.00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	5.00	811,021,841.00	(811,021,841.00)	-
31001	KOMPUTER UNIT	220.00	3,464,660,669.00	(3,456,388,169.00)	8,272,500.00
31002	PERALATAN KOMPUTER	67.00	12,952,190,871.00	(12,943,658,209.00)	8,532,662.00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3.00	144,174,000.00	(32,410,364.00)	111,763,636.00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	210.00	13,631,000.00	-	13,631,000.00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	-	-	-
JUMLAH		722,044.00	4,036,706,796,608.00	(811,024,831,577.00)	3,225,681,965,031.00

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PER 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8=5+6+7</i>	<i>9=4-8</i>
162121	Hak Cipta	1	500,000.00	(67,850.00)	432,150.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000.00	(67,850.00)	432,150.00
162151	Software	209	135,420,431,787.00	(125,292,374,575.00)	10,128,057,212.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	209	135,420,431,787.00	(125,292,374,575.00)	10,128,057,212.00
162161	Lisensi	-	-	-	-
80101	ASET TAK BERWUJUD	-	-	-	-
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1	195,000,000.00	-	195,000,000.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	195,000,000.00	-	195,000,000.00
166113	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	29	6,108,411,375.00	(5,918,211,375.00)	190,200,000.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	29	6,108,411,375.00	(5,918,211,375.00)	190,200,000.00
JUMLAH		240	141,724,343,162.00	(131,210,653,800.00)	10,513,689,362.00

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG/JASA
PER 30 JUNI 2024**

(Dalam Rupiah)

NO	PEMBERI HIBAH	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	SUDAH DISAHKAN	KET
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Barang	DN	913,529,700.00	913,529,700.00	<i>Tanah</i>
Jumlah				913,529,700.00	913,529,700.00	

**LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kementerian / Lembaga : (088) Badan Kepegawaian Negara
 Fungsi : (01) Pelayanan Umum
 Sub Fungsi : (0101) Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CO								
	3644								
	AFA 001	148,145,000.00	10,669,000.00	7.20	4.00	1.00	NSPK	25.00	
	BAB 001	232,200,000.00	24,010,000.00	10.34	520.00	215.00	Lembaga	41.35	
	FAC 001	319,655,000.00	85,961,321.00	26.89	1,000.00	257.00	Orang	25.70	
	3655								
	AFA 001	150,000,000.00	12,072,000.00	8.05	1.00	-	NSPK	0.00	
	AFA 002	200,000,000.00	6,219,000.00	3.11	2.00	-	Standar	0.00	
	BAA 002	6,960,327,000.00	1,608,009,240.00	23.10	157,129.00	22,667.00	Orang	14.43	
	FAB 001	200,000,000.00	12,553,000.00	6.28	1.00	-	Sistem Informasi	0.00	
	3663								
	PFA 001	2,000,000,000.00	4,092,000.00	0.20	1.00	-	NSPK	0.00	
	UAC 001	5,500,000,000.00	1,025,340,642.00	18.64	60,000.00	18,112.00	Orang	30.19	
	ADE 001	561,607,000.00	56,211,231.00	10.01	15.00	5.00	Lembaga	33.33	
	BAA 001	2,368,403,000.00	754,191,572.00	31.84	750.00	535.00	Orang	71.33	
	3664								
	FAC 003	1,930,011,000.00	380,544,973.00	19.72	720.00	278.00	Orang	38.61	
	FAC 002	632,200,000.00	261,616,000.00	41.38	640.00	256.00	Orang	40.00	
	ABQ 001	50,000,000.00	-	0.00	1.00	-	Rekomendasi Kebijakan	0.00	
	FAC 001	2,000,000,000.00	466,615,951.00	23.33	168.00	135.00	Orang	80.36	
	FAC 004	334,350,000.00	169,920,500.00	50.82	200.00	134.00	Orang	67.00	
	4845								
	BDB 002	380,910,000.00	227,267,752.00	59.66	624.00	402.00	Lembaga	64.42	
	BDB 003	86,160,000.00	21,213,660.00	24.62	8.00	2.00	Lembaga	25.00	
	BDB 005	225,700,000.00	29,200,200.00	12.94	20.00	12.00	Lembaga	60.00	
	BDB 006	725,000,000.00	132,777,935.00	18.31	33.00	16.00	Lembaga	48.48	
	PBQ 001	1,000,000,000.00	297,161,944.00	29.72	1.00	-	Rekomendasi Kebijakan	0.00	
	AAH 001	800,000,000.00	261,622,736.00	32.70	10.00	3.00	peraturan	30.00	
	ABQ 002	163,840,000.00	101,171,902.00	61.75	1.00	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	ABQ 004	200,000,000.00	149,015,830.00	74.51	2.00	-	Rekomendasi Kebijakan	0.00	
	ABQ 005	118,490,000.00	71,558,000.00	60.39	1.00	-	Rekomendasi Kebijakan	0.00	
	ABQ 006	300,600,000.00	42,056,980.00	13.99	1.00	-	Rekomendasi Kebijakan	0.00	
	AFA 001	250,000,000.00	84,157,390.00	33.66	1.00	-	Rancangan Standar	0.00	

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BDB 001	324,300,000.00	174,392,681.00	53.78	628.00	-	Lembaga	0.00	
	4846								
	AEA 001	365,000,000.00	179,929,748.00	49.30	2.00	1.00	kegiatan	50.00	
	AEA 002	381,670,000.00	178,576,781.00	46.79	2.00	1.00	kegiatan	50.00	
	AEA 003	369,698,000.00	61,397,334.00	16.61	2.00	1.00	kegiatan	50.00	
	AEA 004	2,675,000,000.00	-	0.00	1.00	-	kegiatan	0.00	
	BAB 001	745,629,000.00	364,771,647.00	48.92	620.00	491.00	Lembaga	79.19	
	BAB 002	1,464,165,000.00	696,390,833.00	47.56	1,315.00	918.80	Lembaga	69.87	
	BAB 003	1,337,909,000.00	600,271,717.00	44.87	1,301.00	744.40	Lembaga	57.22	
	BAB 004	341,204,000.00	224,011,636.00	65.65	743.00	355.00	Lembaga	47.78	
	BAB 008	381,929,000.00	158,608,150.00	41.53	1,045.00	877.20	Lembaga	83.94	
	BAB 009	92,740,000.00	10,756,400.00	11.60	71.00	25.00	Lembaga	35.21	
	BAB 010	211,858,000.00	57,443,940.00	27.11	916.00	458.00	Lembaga	50.00	
	4847								
	BMA 001	250,000,000.00	172,057,711.00	68.82	1.00	-	layanan	0.00	
	FAA 002	2,853,843,000.00	1,257,910,447.00	44.08	2,285,624.27	1,293,898.43	Dokumen	56.61	
	FAB 001	1,075,000,000.00	428,895,517.00	39.90	1.00	-	Sistem Informasi	0.00	
	QMA 001	2,500,000,000.00	298,209,983.00	11.93	1.00	-	layanan	0.00	
	4848								
	AEA 001	2,000,000,000.00	1,950,623,616.00	97.53	1.00	1.00	kegiatan	100.00	
	BIC 001	2,149,703,000.00	1,678,156,880.00	78.06	177.00	145.00	Lembaga	81.92	
	BIC 002	2,065,491,000.00	583,089,675.00	28.23	162.00	41.00	Lembaga	25.31	
	BIC 003	518,244,000.00	84,747,351.00	16.35	162.00	18.00	Lembaga	11.11	
	BIC 004	582,501,000.00	358,844,399.00	61.60	115.00	30.00	Lembaga	26.09	
	BIC 005	906,400,000.00	614,070,816.00	67.75	397.00	177.00	Lembaga	44.58	
	BIC 006	1,127,000,000.00	557,425,822.00	49.46	321.00	151.00	Lembaga	47.04	
	BIC 007	1,296,866,000.00	611,558,989.00	47.16	302.00	100.00	Lembaga	33.11	
	BIC 008	1,203,570,000.00	537,082,133.00	44.62	216.00	52.68	Lembaga	24.39	
	WA								
	3630								
	EBA 958	789,693,000.00	275,727,654.00	34.92	14.00	3.00	Layanan	21.43	-
	EBA 959	1,195,428,000.00	675,702,883.00	56.52	4.00	-	Layanan	0.00	
	3635								
	EBD 961	155,402,000.00	10,221,000.00	6.58	2.00	-	Dokumen	0.00	
	EBD 965	944,598,000.00	259,385,720.00	27.46	50.00	5.00	Dokumen	10.00	
	3639								
	BCE 001	680,934,000.00	361,045,306.00	53.02	255.00	117.00	Perkara	45.88	
	BCE 002	169,066,000.00	31,412,920.00	18.58	20.00	11.00	Perkara	55.00	
	3648								
	CBT 001	118,261,651,000.00	43,930,236,851.00	37.15	3,565.00	334.00	Unit	9.37	
	CCL 001	952,950,000.00	335,614,050.00	35.22	179.00	9.00	Unit	5.03	
	CDS 001	1,080,830,000.00	452,935,500.00	41.91	265.00	96.00	Unit	36.23	

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EBA 962	1,199,999,000.00	284,175,922.00	23.68	1.00	-	Layanan	0.00	
	3662								
	EBA 963	200,000,000.00	33,914,833.00	16.96	1.00	-	Layanan	0.00	
	4842								
	EBA 960	366650000	217580880	59.34	1	-	Layanan	0.00	
	EBC 954	4,645,370,000.00	1,115,078,531.00	24.00	4,011.00	2,306.00	Orang	57.49	
	EBC 996	2,141,220,000.00	647,037,872.00	30.22	491.00	313.00	Orang	63.75	
	EBD 961	437895000	206847530	47.24	1	-	Dokumen	0.00	
	4843								
	EBA 956	260,297,000.00	159,053,489.00	61.10	12.00	3.00	Layanan	25.00	
	EBA 962	512,448,000.00	143,357,045.00	27.97	4.00	-	Layanan	0.00	
	EBA 994	516,386,348,000.00	246,897,062,781.00	47.81	18.00	4.00	Layanan	22.22	
	EBB 951	11,638,516,000.00	1,464,035,496.00	12.58	185.00	96.00	Unit	51.89	
	EBB 971	58,632,694,000.00	10,785,010,102.00	18.39	14.00	8.00	Unit	57.14	
	EBD 952	863,392,000.00	344,421,750.00	39.89	43.00	20.00	Dokumen	46.51	
	EBD 953	1,733,352,000.00	569,095,136.00	32.83	53.00	23.00	Dokumen	43.40	
	EBD 955	2,337,705,000.00	857,220,517.00	36.67	20.00	7.00	Dokumen	35.00	
	EBD 961	2,134,607,000.00	675,363,238.00	31.64	8.00	1.00	Dokumen	12.50	
	EBD 974	270,000,000.00	61,627,060.00	22.82	12.00	5.00	Dokumen	41.67	
	FAB 002	170,000,000.00	-	0.00	1.00	-	Sistem Informasi	0.00	
	4844								
	EBA 957	46,831,000.00	1,500,000.00	3.20	1.00	-	Layanan	0.00	
	EBA 969	500,000,000.00	270,523,351.00	54.10	24.00	8.00	Layanan	33.33	
	SUBTOTAL	783,765,194,000.00	329,199,642,382.00		2,525,235.27	1,344,886.51			

LAMPIRAN PENDUKUNG

LAMPIRAN I

Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 088

Tgl Data : 19/07/24 12:24 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:07 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	783,765,194,000	329,253,371,693	(454,511,822,307)	42	690,840,150,000	305,632,784,066	385,207,365,934	44
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/07/24 1:22 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
51	BELANJA PEGAWAI	397,463,752,000	397,463,752,000	194,335,786,749	44,870,528	194,290,916,221	48.88	203,172,835,779
52	BELANJA BARANG	204,489,346,000	202,613,488,000	79,495,288,715	297,555,300	79,197,733,415	39.09	123,415,754,585
53	BELANJA MODAL	181,812,096,000	183,687,954,000	55,764,722,057	0	55,764,722,057	30.36	127,923,231,943
	JUMLAH BELANJA (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	783,765,194,000	783,765,194,000	329,595,797,521	342,425,828	329,253,371,693	42.05	454,511,822,307
	JUMLAH BELANJA	783,765,194,000	783,765,194,000	329,595,797,521	342,425,828	329,253,371,693	42.05	454,511,822,307

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 19/07/24 1:22 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	114,795,541,000	114,253,773,000	66,779,177,330	6,263,736	66,772,913,594	58.45	47,480,859,406
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,339,000	2,206,000	1,077,727	74,304	1,003,423	48.85	1,202,577
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,465,672,000	7,479,111,000	4,232,715,460	5,370,360	4,227,345,100	56.59	3,251,765,900
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,968,876,000	1,961,021,000	1,121,017,078	5,892	1,121,011,186	57.16	840,009,814
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,847,133,000	4,547,468,000	2,440,360,000	11,340,310	2,429,019,690	53.66	2,118,448,310
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,794,155,000	16,002,589,000	8,513,346,000	9,856,120	8,503,489,880	53.2	7,499,099,120
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	427,414,000	1,379,739,000	1,289,354,428	0	1,289,354,428	93.45	90,384,572
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,824,720,000	5,788,789,000	3,211,806,060	362,100	3,211,443,960	55.48	2,577,345,040
511129	Belanja Uang Makan PNS	21,965,807,000	20,154,950,000	6,519,395,000	315,750	6,519,079,250	32.35	13,635,870,750
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	726,000,000	726,000,000	346,825,000	0	346,825,000	47.77	379,175,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,927,167,000	1,823,819,000	960,210,000	11,281,200	948,928,800	52.65	874,890,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	175,744,824,000	174,119,465,000	95,415,284,083	44,869,772	95,370,414,311	54.8	78,749,050,689
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,489,589,000	6,760,133,000	2,369,390,400	0	2,369,390,400	35.05	4,390,742,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	378,000	427,000	49,755	756	48,999	11.65	378,001
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	797,538,000	846,699,000	134,882,520	0	134,882,520	15.93	711,816,480
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	363,476,000	370,247,000	29,151,200	0	29,151,200	7.87	341,095,800
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,448,865,000	1,594,023,000	327,436,000	0	327,436,000	20.54	1,266,587,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	747,491,000	835,272,000	126,083,220	0	126,083,220	15.09	709,188,780
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,935,540,000	2,178,535,000	251,207,000	0	251,207,000	11.53	1,927,328,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	3,825,000	1,275,000	0	1,275,000	33.33	2,550,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	51,548,000	51,548,000	0	0	0	0	51,548,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	10,834,425,000	12,640,709,000	3,239,475,095	756	3,239,474,339	25.63	9,401,234,661
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,656,238,000	1,592,554,000	521,267,000	0	521,267,000	32.73	1,071,287,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	156,600,000	39,359,000	6,062,000	0	6,062,000	15.4	33,297,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,812,838,000	1,631,913,000	527,329,000	0	527,329,000	32.31	1,104,584,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	201,347,238,000	201,347,238,000	93,567,294,093	0	93,567,294,093	46.47	107,779,943,907
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,724,427,000	7,724,427,000	1,586,404,478	0	1,586,404,478	20.54	6,138,022,522
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	209,071,665,000	209,071,665,000	95,153,698,571	0	95,153,698,571	45.51	113,917,966,429
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	397,463,752,000	397,463,752,000	194,335,786,749	44,870,528	194,290,916,221	48.89	203,172,835,779
52	BELANJA BARANG							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 19/07/24 1:22 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	54,093,324,000	48,806,452,000	22,253,629,449	2,164,803	22,251,464,646	45.6	26,554,987,354
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	723,200,000	773,780,000	286,321,106	0	286,321,106	37	487,458,894
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,021,700,000	317,796,000	87,245,048	0	87,245,048	27.45	230,550,952
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,060,296,000	1,927,492,000	670,238,900	0	670,238,900	34.77	1,257,253,100
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	780,172,000	812,262,000	235,032,763	0	235,032,763	28.94	577,229,237
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	58,678,692,000	52,637,782,000	23,532,467,266	2,164,803	23,530,302,463	44.71	29,107,479,537
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	11,284,106,000	13,392,148,000	3,380,826,407	0	3,380,826,407	25.24	10,011,321,593
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,787,682,000	4,027,622,000	646,966,400	0	646,966,400	16.06	3,380,655,600
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,750,437,000	2,339,885,000	810,691,480	0	810,691,480	34.65	1,529,193,520
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	398,518,000	452,446,000	169,341,443	0	169,341,443	37.43	283,104,557
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	12,000,000	3,000,000	1,665,000	0	1,665,000	55.5	1,335,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	17,232,743,000	20,215,101,000	5,009,490,730	0	5,009,490,730	24.78	15,205,610,270
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,693,715,000	7,487,692,000	2,618,445,885	0	2,618,445,885	34.97	4,869,246,115
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	55,200,000	79,700,000	34,235,500	0	34,235,500	42.96	45,464,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,748,915,000	7,567,392,000	2,652,681,385	0	2,652,681,385	35.05	4,914,710,615
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	18,626,164,000	18,838,472,000	8,421,276,912	0	8,421,276,912	44.7	10,417,195,088
522112	Belanja Langganan Telepon	617,024,000	609,224,000	243,382,703	0	243,382,703	39.95	365,841,297
522113	Belanja Langganan Air	556,260,000	513,996,000	166,606,007	0	166,606,007	32.41	347,389,993
522131	Belanja Jasa Konsultansi	5,436,842,000	5,099,164,000	861,564,150	0	861,564,150	16.9	4,237,599,850
522141	Belanja Sewa	13,474,951,000	13,758,096,000	6,945,289,592	0	6,945,289,592	50.48	6,812,806,408
522151	Belanja Jasa Profesi	2,840,300,000	3,005,200,000	677,300,000	0	677,300,000	22.54	2,327,900,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,902,488,000	5,656,385,000	825,064,630	0	825,064,630	14.59	4,831,320,370
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	46,454,029,000	47,480,537,000	18,140,483,994	0	18,140,483,994	38.21	29,340,053,006
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,992,366,000	9,665,478,000	3,618,322,752	0	3,618,322,752	37.44	6,047,155,248
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	537,603,000	564,028,000	255,417,057	0	255,417,057	45.28	308,610,943
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	91,200,000	91,200,000	90,282,731	0	90,282,731	98.99	917,269
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	913,214,000	1,006,437,000	284,612,251	0	284,612,251	28.28	721,824,749
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,101,266,000	13,886,961,000	4,048,983,605	0	4,048,983,605	29.16	9,837,977,395
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299,576,000	284,016,000	53,887,131	0	53,887,131	18.97	230,128,869
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	15,000,000	7,550,000	0	7,550,000	50.33	7,450,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 19/07/24 1:22 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	198,000,000	148,423,000	148,412,550	0	148,412,550	99.99	10,450
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	5,000,000	4,983,000	0	4,983,000	99.66	17,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	32,508,000	40,008,000	14,795,423	0	14,795,423	36.98	25,212,577
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	4,000,000	0	0	0	0	0	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,667,538,000	1,185,890,000	250,025,615	0	250,025,615	21.08	935,864,385
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	27,842,271,000	26,892,441,000	8,777,272,115	0	8,777,272,115	32.64	18,115,168,885
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35,447,037,000	34,221,055,000	15,386,855,278	85,655,027	15,301,200,251	44.96	18,919,854,749
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	872,750,000	1,008,786,000	279,795,201	0	279,795,201	27.74	728,990,799
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,509,158,000	3,409,304,000	1,020,864,200	170,000	1,020,694,200	29.94	2,388,609,800
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,534,950,000	8,795,339,000	4,445,423,501	209,565,470	4,235,858,031	50.54	4,559,480,969
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	46,363,895,000	47,434,484,000	21,132,938,180	295,390,497	20,837,547,683	44.55	26,596,936,317
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	168,801,000	385,751,000	249,955,045	0	249,955,045	64.8	135,795,955
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	168,801,000	385,751,000	249,955,045	0	249,955,045	64.8	135,795,955
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	204,489,346,000	202,613,488,000	79,495,288,715	297,555,300	79,197,733,415	39.23	123,415,754,585
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88,754,347,000	107,137,639,000	43,051,534,200	0	43,051,534,200	40.18	64,086,104,800
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,435,000,000	2,749,206,000	2,078,738,975	0	2,078,738,975	75.61	670,467,025
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	91,189,347,000	109,886,845,000	45,130,273,175	0	45,130,273,175	41.07	64,756,571,825
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61,031,110,000	52,496,096,000	9,031,093,596	0	9,031,093,596	17.2	43,465,002,404
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,326,279,000	5,784,040,000	1,603,355,286	0	1,603,355,286	27.72	4,180,684,714
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	67,357,389,000	58,280,136,000	10,634,448,882	0	10,634,448,882	18.25	47,645,687,118
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	22,015,360,000	14,749,973,000	0	0	0	0	14,749,973,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1,250,000,000	771,000,000	0	0	0	0	771,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	23,265,360,000	15,520,973,000	0	0	0	0	15,520,973,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	181,812,096,000	183,687,954,000	55,764,722,057	0	55,764,722,057	30.36	127,923,231,943
	JUMLAH BELANJA	783,765,194,000	783,765,194,000	329,595,797,521	342,425,828	329,253,371,693	42.05	454,511,822,307

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 19/07/24 1:21 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_fsfpkg_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	1,400,000,000	1,400,000,000	241,280,642	0	241,280,642	17.23	1,158,719,358
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi	15,216,172,000	15,020,654,000	3,277,706,480	0	3,277,706,480	21.82	11,742,947,520
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	18,269,020,000	20,860,020,000	3,679,670,890	0	3,679,670,890	17.64	17,180,349,110
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	10,657,522,000	9,893,122,000	2,557,394,848	2,800,000	2,554,594,848	25.82	7,338,527,152
4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN	4,575,000,000	4,575,000,000	1,591,597,010	170,000	1,591,427,010	34.79	2,983,572,990
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	8,390,032,000	8,366,802,000	2,532,158,186	41,167,793	2,490,990,393	29.77	5,875,811,607
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	7,109,532,000	6,678,843,000	2,157,073,658	652,000	2,156,421,658	32.29	4,522,421,342
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	11,419,418,000	11,849,775,000	6,975,599,681	218,510,385	6,757,089,296	57.02	5,092,685,704
	JUMLAH PROGRAM Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	77,036,696,000	78,644,216,000	23,012,481,395	263,300,178	22,749,181,217	29.26	55,895,034,783
WA	Program Dukungan Manajemen							
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	3,962,242,000	3,970,242,000	1,902,861,074	0	1,902,861,074	47.93	2,067,380,926
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	2,200,000,000	2,200,000,000	539,213,440	0	539,213,440	24.51	1,660,786,560
3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	1,700,000,000	1,700,000,000	784,916,452	0	784,916,452	46.17	915,083,548
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	242,990,860,000	242,990,860,000	90,005,924,646	0	90,005,924,646	37.04	152,984,935,354
3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN	400,000,000	400,000,000	67,829,666	0	67,829,666	16.96	332,170,334
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	7,678,635,000	7,591,135,000	2,186,544,813	5,885,052	2,180,659,761	28.73	5,410,475,239
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	595,643,838,000	594,939,359,000	262,352,401,753	74,640,598	262,277,761,155	44.08	332,661,597,845
4844	Legislasi dan Litigasi	550,831,000	546,831,000	272,023,351	0	272,023,351	49.75	274,807,649
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	855,126,406,000	854,338,427,000	358,111,715,195	80,525,650	358,031,189,545	41.92	496,307,237,455
	JUMLAH SUBFUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	932,163,102,000	932,982,643,000	381,124,196,590	343,825,828	380,780,370,762	40.85	552,202,272,238
	JUMLAH FUNGSI PELAYANAN UMUM	932,163,102,000	932,982,643,000	381,124,196,590	343,825,828	380,780,370,762	40.85	552,202,272,238

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/07/24 1:21 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
088010100KD	kanreg V BKN							
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	11,962,460,000	11,962,460,000	5,845,474,359	4,241,654	5,841,232,705	48.83	6,121,227,295
	JUMLAH BELANJA kanreg V BKN	11,962,460,000	11,962,460,000	5,845,474,359	4,241,654	5,841,232,705	48.87	6,121,227,295
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA							
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	572,393,714,000	572,393,714,000	226,671,714,640	302,446,306	226,369,268,334	39.55	346,024,445,666
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	572,393,714,000	572,393,714,000	226,671,714,640	302,446,306	226,369,268,334	39.6	346,024,445,666
088010200KD	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT							
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	16,154,432,000	16,154,432,000	7,656,202,621	2,500,783	7,653,701,838	47.38	8,500,730,162
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	16,154,432,000	16,154,432,000	7,656,202,621	2,500,783	7,653,701,838	47.39	8,500,730,162
088010400KD	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA							
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	16,968,778,000	16,968,778,000	9,028,927,092	1,484,550	9,027,442,542	53.2	7,941,335,458
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	16,968,778,000	16,968,778,000	9,028,927,092	1,484,550	9,027,442,542	53.21	7,941,335,458
088010500KD	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR							
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	13,665,161,000	13,665,161,000	7,199,828,957	183,926	7,199,645,031	52.69	6,465,515,969
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	13,665,161,000	13,665,161,000	7,199,828,957	183,926	7,199,645,031	52.69	6,465,515,969
088010600KD	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	9,958,719,000	9,958,719,000	4,284,145,602	372,135	4,283,773,467	43.02	5,674,945,533
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	9,958,719,000	9,958,719,000	4,284,145,602	372,135	4,283,773,467	43.02	5,674,945,533
088010700KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA							
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	13,454,430,000	13,454,430,000	6,446,044,534	1,177,247	6,444,867,287	47.9	7,009,562,713
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	13,454,430,000	13,454,430,000	6,446,044,534	1,177,247	6,444,867,287	47.91	7,009,562,713
088010900KD	BA(088) ES1(01) RIAU							
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	14,682,611,000	14,682,611,000	7,325,647,711	333,123	7,325,314,588	49.89	7,357,296,412
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) RIAU	14,682,611,000	14,682,611,000	7,325,647,711	333,123	7,325,314,588	49.89	7,357,296,412
088011100KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN							
622372	KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	14,738,808,000	14,738,808,000	7,597,851,360	5,821,187	7,592,030,173	51.51	7,146,777,827
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	14,738,808,000	14,738,808,000	7,597,851,360	5,821,187	7,592,030,173	51.55	7,146,777,827
088011500KD	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN							
622386	KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	14,277,716,000	14,277,716,000	7,499,149,696	428,948	7,498,720,748	52.52	6,778,995,252
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	14,277,716,000	14,277,716,000	7,499,149,696	428,948	7,498,720,748	52.52	6,778,995,252
088011700KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/07/24 1:21 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
667896	KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	11,505,818,000	11,505,818,000	5,883,709,548	6,822,048	5,876,887,500	51.08	5,628,930,500
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	11,505,818,000	11,505,818,000	5,883,709,548	6,822,048	5,876,887,500	51.14	5,628,930,500
088011900KD 560635	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	18,773,542,000	18,773,542,000	9,296,857,576	3,945,353	9,292,912,223	49.5	9,480,629,777
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	18,773,542,000	18,773,542,000	9,296,857,576	3,945,353	9,292,912,223	49.52	9,480,629,777
088012200KD 667882	BA(088) ES1(01) BALI KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	13,025,818,000	13,025,818,000	6,737,733,320	10,454,040	6,727,279,280	51.65	6,298,538,720
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) BALI	13,025,818,000	13,025,818,000	6,737,733,320	10,454,040	6,727,279,280	51.73	6,298,538,720
088012500KD 622390	BA(088) ES1(01) PAPUA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	12,225,192,000	12,225,192,000	5,657,315,131	0	5,657,315,131	46.28	6,567,876,869
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA	12,225,192,000	12,225,192,000	5,657,315,131	0	5,657,315,131	46.28	6,567,876,869
088013300KD 667652	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	9,564,979,000	9,564,979,000	4,540,736,278	252,167	4,540,484,111	47.47	5,024,494,889
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	9,564,979,000	9,564,979,000	4,540,736,278	252,167	4,540,484,111	47.47	5,024,494,889
null 020505	Kode UAPPAW Tidak Ada PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	20,413,016,000	20,413,016,000	7,924,459,096	1,962,361	7,922,496,735	38.81	12,490,519,265
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	20,413,016,000	20,413,016,000	7,924,459,096	1,962,361	7,922,496,735	38.82	12,490,519,265
	JUMLAH BELANJA 01	783,765,194,000	783,765,194,000	329,595,797,521	342,425,828	329,253,371,693	42.05	454511822307
	JUMLAH BELANJA	783,765,194,000	783,765,194,000	329,595,797,521	342,425,828	329,253,371,693	42.05	454,511,822,307

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	700,000,000	700,000,000	120,640,321	0	120,640,321	17.23	579,359,679
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	550,000,000	550,000,000	30,844,000	0	30,844,000	5.61	519,156,000
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	7,800,900,000	7,800,900,000	1,029,432,642	0	1,029,432,642	13.2	6,771,467,358
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	3,016,550,000	3,016,550,000	898,152,451	1,400,000	896,752,451	29.73	2,119,797,549
4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN	4,575,000,000	4,575,000,000	1,591,597,010	170,000	1,591,427,010	34.79	2,983,572,990
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	8,390,032,000	8,366,802,000	2,532,158,186	41,167,793	2,490,990,393	689.4	5,875,811,607
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	7,109,532,000	6,678,843,000	2,157,073,658	652,000	2,156,421,658	700.55	4,522,421,342
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	11,419,418,000	11,849,775,000	6,975,599,681	218,510,385	6,757,089,296	823.36	5,092,685,704
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	43,561,432,000	43,537,870,000	15,335,497,949	261,900,178	15,073,597,771	35.223	28,464,272,229
WA	Program Dukungan Manajemen							
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1,981,121,000	1,985,121,000	951,430,537	0	951,430,537	413.61	1,033,690,463
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1,100,000,000	1,100,000,000	269,606,720	0	269,606,720	24.51	830,393,280
3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	850,000,000	850,000,000	392,458,226	0	392,458,226	46.17	457,541,774
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	121,495,430,000	121,495,430,000	45,002,962,323	0	45,002,962,323	37.04	76,492,467,677
3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN	200,000,000	200,000,000	33,914,833	0	33,914,833	16.96	166,085,167
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	7,678,635,000	7,591,135,000	2,186,544,813	5,885,052	2,180,659,761	895.25	5,410,475,239
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	532,392,839,000	532,503,901,000	252,851,869,339	74,640,598	252,777,228,741	783.8	279,726,672,259
4844	Legislasi dan Litigasi	550,831,000	546,831,000	272,023,351	0	272,023,351	49.75	274,807,649

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	666,248,856,000	666,272,418,000	301,960,810,142	80,525,650	301,880,284,492	45.321	364,392,133,508
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	709,810,288,000	709,810,288,000	317,296,308,091	342,425,828	316,953,882,263	44.702	392,856,405,737
04	PNBP							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	7,058,086,000	6,960,327,000	1,608,009,240	0	1,608,009,240	23.1	5,352,317,760
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	1,333,610,000	2,629,110,000	810,402,803	0	810,402,803	30.82	1,818,707,197
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	2,312,211,000	1,930,011,000	380,544,973	0	380,544,973	19.72	1,549,466,027
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	10,703,907,000	11,519,448,000	2,798,957,016	0	2,798,957,016	24.298	8,720,490,984
WA	Program Dukungan Manajemen							
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,646,429,000	1,830,888,000	781,734,980	0	781,734,980	85.14	1,049,153,020
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,646,429,000	1,830,888,000	781,734,980	0	781,734,980	42.697	1,049,153,020
	JUMLAH BELANJA PNPB	13,350,336,000	13,350,336,000	3,580,691,996	0	3,580,691,996	26.821	9,769,644,004
20	SBSN							
WA	Program Dukungan Manajemen							
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	60,604,570,000	60,604,570,000	8,718,797,434	0	8,718,797,434	14.39	51,885,772,566
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	60,604,570,000	60,604,570,000	8,718,797,434	0	8,718,797,434	14.386	51,885,772,566
	JUMLAH BELANJA SBSN	60,604,570,000	60,604,570,000	8,718,797,434	0	8,718,797,434	14.386	51,885,772,566
	JUMLAH	783,765,194,000	783,765,194,000	329,595,797,521	342,425,828	329,253,371,693	42.05	454,511,822,307

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	114,795,541,000	114,253,773,000	66,779,177,330	6,263,736	66,772,913,594	58.45	47,480,859,406
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,339,000	2,206,000	1,077,727	74,304	1,003,423	48.85	1,202,577
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,465,672,000	7,479,111,000	4,232,715,460	5,370,360	4,227,345,100	56.59	3,251,765,900
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,968,876,000	1,961,021,000	1,121,017,078	5,892	1,121,011,186	57.16	840,009,814
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,847,133,000	4,547,468,000	2,440,360,000	11,340,310	2,429,019,690	53.66	2,118,448,310
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,794,155,000	16,002,589,000	8,513,346,000	9,856,120	8,503,489,880	53.2	7,499,099,120
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	427,414,000	1,379,739,000	1,289,354,428	0	1,289,354,428	93.45	90,384,572
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,824,720,000	5,788,789,000	3,211,806,060	362,100	3,211,443,960	55.48	2,577,345,040
511129	Belanja Uang Makan PNS	21,965,807,000	20,154,950,000	6,519,395,000	315,750	6,519,079,250	32.35	13,635,870,750
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	726,000,000	726,000,000	346,825,000	0	346,825,000	47.77	379,175,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,927,167,000	1,823,819,000	960,210,000	11,281,200	948,928,800	52.65	874,890,200
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,489,589,000	6,760,133,000	2,369,390,400	0	2,369,390,400	35.05	4,390,742,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	378,000	427,000	49,755	756	48,999	11.65	378,001
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	797,538,000	846,699,000	134,882,520	0	134,882,520	15.93	711,816,480
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	363,476,000	370,247,000	29,151,200	0	29,151,200	7.87	341,095,800
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,448,865,000	1,594,023,000	327,436,000	0	327,436,000	20.54	1,266,587,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	747,491,000	835,272,000	126,083,220	0	126,083,220	15.09	709,188,780
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,935,540,000	2,178,535,000	251,207,000	0	251,207,000	11.53	1,927,328,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	3,825,000	1,275,000	0	1,275,000	33.33	2,550,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	51,548,000	51,548,000	0	0	0	0	51,548,000
512211	Belanja Uang Lembur	1,656,238,000	1,592,554,000	521,267,000	0	521,267,000	32.73	1,071,287,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	156,600,000	39,359,000	6,062,000	0	6,062,000	15.4	33,297,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	201,347,238,000	201,347,238,000	93,567,294,093	0	93,567,294,093	46.47	107,779,943,907
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,724,427,000	7,724,427,000	1,586,404,478	0	1,586,404,478	20.54	6,138,022,522
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	397,463,752,000	397,463,752,000	194,335,786,749	44,870,528	194,290,916,221	48.89	203,172,835,779
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	53,893,324,000	48,724,372,000	22,253,629,449	2,164,803	22,251,464,646	45.67	26,472,907,354
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	723,200,000	773,780,000	286,321,106	0	286,321,106	37	487,458,894
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,021,700,000	317,796,000	87,245,048	0	87,245,048	27.45	230,550,952
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,032,000,000	1,899,196,000	658,448,900	0	658,448,900	34.67	1,240,747,100
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	780,172,000	812,262,000	235,032,763	0	235,032,763	28.94	577,229,237
521211	Belanja Bahan	9,069,112,000	10,307,473,000	2,722,032,855	0	2,722,032,855	26.41	7,585,440,145
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,073,962,000	2,272,202,000	436,426,400	0	436,426,400	19.21	1,835,775,600
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,650,437,000	2,173,985,000	810,691,480	0	810,691,480	37.29	1,363,293,520
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	398,518,000	432,199,000	151,073,443	0	151,073,443	34.95	281,125,557
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	12,000,000	3,000,000	1,665,000	0	1,665,000	55.5	1,335,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,588,715,000	7,383,669,000	2,618,445,885	0	2,618,445,885	35.46	4,765,223,115
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	52,200,000	76,700,000	33,235,500	0	33,235,500	43.33	43,464,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	18,626,164,000	18,838,472,000	8,421,276,912	0	8,421,276,912	44.7	10,417,195,088
522112	Belanja Langganan Telepon	617,024,000	609,224,000	243,382,703	0	243,382,703	39.95	365,841,297
522113	Belanja Langganan Air	556,260,000	513,996,000	166,606,007	0	166,606,007	32.41	347,389,993
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,386,842,000	5,099,164,000	861,564,150	0	861,564,150	16.9	4,237,599,850
522141	Belanja Sewa	11,233,390,000	11,516,535,000	6,631,775,252	0	6,631,775,252	57.58	4,884,759,748
522151	Belanja Jasa Profesi	2,120,600,000	2,054,200,000	472,300,000	0	472,300,000	22.99	1,581,900,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,452,488,000	5,585,585,000	801,889,630	0	801,889,630	14.36	4,783,695,370
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,992,366,000	9,665,478,000	3,618,322,752	0	3,618,322,752	37.44	6,047,155,248
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	537,603,000	564,028,000	255,417,057	0	255,417,057	45.28	308,610,943
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	91,200,000	91,200,000	90,282,731	0	90,282,731	98.99	917,269
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	913,214,000	1,006,437,000	284,612,251	0	284,612,251	28.28	721,824,749
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,604,266,000	13,645,253,000	4,048,983,605	0	4,048,983,605	29.67	9,596,269,395
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299,576,000	284,016,000	53,887,131	0	53,887,131	18.97	230,128,869
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	15,000,000	7,550,000	0	7,550,000	50.33	7,450,000
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	148,423,000	148,412,550	0	148,412,550	99.99	10,450
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	5,000,000	4,983,000	0	4,983,000	99.66	17,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	32,508,000	40,008,000	14,795,423	0	14,795,423	36.98	25,212,577
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	4,000,000	0	0	0	0	0	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,667,538,000	1,185,890,000	250,025,615	0	250,025,615	21.08	935,864,385
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,992,145,000	32,271,354,000	14,386,680,466	85,655,027	14,301,025,439	44.58	17,970,328,561
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,470,000	885,386,000	251,250,201	0	251,250,201	28.38	634,135,799
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,264,208,000	3,162,834,000	1,018,934,200	170,000	1,018,764,200	32.22	2,144,069,800
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,084,436,000	8,394,172,000	4,130,624,728	209,565,470	3,921,059,258	49.21	4,473,112,742
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	168,801,000	335,751,000	238,527,506	0	238,527,506	71.04	97,223,494
	JUMLAH BELANJA BARANG	193,785,439,000	191,094,040,000	76,696,331,699	297,555,300	76,398,776,399	40.14	114,695,263,601
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,019,918,000	97,326,954,000	42,367,588,195	0	42,367,588,195	43.53	54,959,365,805
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,435,000,000	2,641,308,000	1,980,950,000	0	1,980,950,000	75	660,358,000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	426,540,000	515,021,000	312,296,162	0	312,296,162	60.64	202,724,838
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5,414,279,000	5,268,240,000	1,603,355,286	0	1,603,355,286	30.43	3,664,884,714
536111	Belanja Modal Lainnya	22,015,360,000	14,729,973,000	0	0	0	0	14,729,973,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1,250,000,000	771,000,000	0	0	0	0	771,000,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	118,561,097,000	121,252,496,000	46,264,189,643	0	46,264,189,643	38.16	74,988,306,357
	JUMLAH RUPIAH MURNI	709,810,288,000	709,810,288,000	317,296,308,091	342,425,828	316,953,882,263	44.7	392,856,405,737
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	200,000,000	82,080,000	0	0	0	0	82,080,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	28,296,000	28,296,000	11,790,000	0	11,790,000	41.67	16,506,000
521211	Belanja Bahan	2,214,994,000	3,084,675,000	658,793,552	0	658,793,552	21.36	2,425,881,448

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,713,720,000	1,755,420,000	210,540,000	0	210,540,000	11.99	1,544,880,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100,000,000	165,900,000	0	0	0	0	165,900,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	20,247,000	18,268,000	0	18,268,000	90.23	1,979,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	105,000,000	104,023,000	0	0	0	0	104,023,000
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	3,000,000	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	33.33	2,000,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	0	0	0	0	0	0
522141	Belanja Sewa	2,241,561,000	2,241,561,000	313,514,340	0	313,514,340	13.99	1,928,046,660
522151	Belanja Jasa Profesi	719,700,000	951,000,000	205,000,000	0	205,000,000	21.56	746,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	450,000,000	70,800,000	23,175,000	0	23,175,000	32.73	47,625,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	497,000,000	241,708,000	0	0	0	0	241,708,000
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	198,000,000	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,454,892,000	1,949,701,000	1,000,174,812	0	1,000,174,812	51.3	949,526,188
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,280,000	123,400,000	28,545,000	0	28,545,000	23.13	94,855,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	244,950,000	246,470,000	1,930,000	0	1,930,000	0.78	244,540,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	450,514,000	401,167,000	314,798,773	0	314,798,773	78.47	86,368,227
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	50,000,000	11,427,539	0	11,427,539	22.86	38,572,461
	JUMLAH BELANJA BARANG	10,703,907,000	11,519,448,000	2,798,957,016	0	2,798,957,016	24.3	8,720,490,984
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,734,429,000	1,187,190,000	683,946,005	0	683,946,005	57.61	503,243,995
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	107,898,000	97,788,975	0	97,788,975	90.63	10,109,025
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	912,000,000	515,800,000	0	0	0	0	515,800,000
536111	Belanja Modal Lainnya	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,646,429,000	1,830,888,000	781,734,980	0	781,734,980	42.7	1,049,153,020
	JUMLAH PNPB	13,350,336,000	13,350,336,000	3,580,691,996	0	3,580,691,996	26.82	9,769,644,004
20	SBSN							
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	8,623,495,000	0	0	0	0	8,623,495,000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60,604,570,000	51,981,075,000	8,718,797,434	0	8,718,797,434	16.77	43,262,277,566
	JUMLAH BELANJA MODAL	60,604,570,000	60,604,570,000	8,718,797,434	0	8,718,797,434	14.39	51,885,772,566
	JUMLAH SBSN	60,604,570,000	60,604,570,000	8,718,797,434	0	8,718,797,434	14.39	51,885,772,566
	TOTAL	783,765,194,000	783,765,194,000	329,595,797,521	342,425,828	329,253,371,693	42.05	454,511,822,307

LAMPIRAN II

Neraca

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak 19/07/24 2:07 PM

Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,300,000,000	0	2,300,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	114,490,399	4,587,816	109,902,583	2,395.53
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	131,199,742	(131,199,742)	(100.00)
Uang Muka Belanja (prepayment)	(850,000)	0	(850,000)	0.00
Piutang Bukan Pajak	16,894,305	2,747,393,181	(2,730,498,876)	(99.39)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(13,736,966)	13,736,966	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	16,894,305	2,733,656,215	(2,716,761,910)	(99.38)
Persediaan	7,095,120,866	7,106,175,160	(11,054,294)	(0.16)
Persediaan yang Belum Diregister	10,000	0	10,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	9,525,665,570	9,975,618,933	(449,953,363)	(4.51)
ASET TETAP				
Tanah	2,331,580,054,368	2,330,666,524,668	913,529,700	0.04
Peralatan dan Mesin	774,657,579,537	704,398,035,892	70,259,543,645	9.97
Gedung dan Bangunan	870,549,881,368	868,849,348,970	1,700,532,398	0.20
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,716,999,940	24,716,999,940	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	13,253,848,057	13,874,987,099	(621,139,042)	(4.48)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9,099,203,348	168,877,064	8,930,326,284	5,288.06
AKUMULASI PENYUSUTAN	(789,226,419,037)	(746,282,602,430)	(42,943,816,607)	5.75
JUMLAH ASET TETAP	3,234,631,147,581	3,196,392,171,203	38,238,976,378	1.20
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	135,615,931,787	125,741,319,487	9,874,612,300	7.85
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	21,071,862,270	(21,071,862,270)	(100.00)
Aset Lain-lain	28,056,844,713	21,362,783,827	6,694,060,886	31.34
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(153,009,066,340)	(145,268,566,532)	(7,740,499,808)	5.33
JUMLAH ASET LAINNYA	10,663,710,160	22,907,399,052	(12,243,688,892)	(53.45)
JUMLAH ASET	3,254,820,523,311	3,229,275,189,188	25,545,334,123	0.79
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	71,887,956,943	19,629,558,217	52,258,398,726	266.22
Utang Yang Belum Ditagihkan	3,084,057,850	0	3,084,057,850	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	1,091,528,298	(1,091,528,298)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	2,300,000,000	0	2,300,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	683,000	4,236,316	(3,553,316)	(83.88)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	77,272,697,793	20,725,322,831	56,547,374,962	272.84
JUMLAH KEWAJIBAN	77,272,697,793	20,725,322,831	56,547,374,962	272.84
EKUITAS				

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak 19/07/24 2:07 PM

Halaman 2

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS				
Ekuitas	3,177,547,825,518	3,208,549,866,357	(31,002,040,839)	(0.97)
JUMLAH EKUITAS	3,177,547,825,518	3,208,549,866,357	(31,002,040,839)	(0.97)
JUMLAH EKUITAS	3,177,547,825,518	3,208,549,866,357	(31,002,040,839)	(0.97)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,254,820,523,311	3,229,275,189,188	25,545,334,123	0.79

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN III

Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:06 PM

Halaman : 1

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,812,386,821	12,953,571,211	(1,141,184,390)	(8.81)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	11,812,386,821	12,953,571,211	(1,141,184,390)	(8.81)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	11,812,386,821	12,953,571,211	(1,141,184,390)	(8.81)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	219,655,965,595	198,111,463,150	21,544,502,445	10.875
Beban Persediaan	2,809,009,678	3,631,281,899	(822,272,221)	(22.644)
Beban Barang dan Jasa	49,008,644,176	81,237,444,589	(32,228,800,413)	(39.672)
Beban Pemeliharaan	9,898,206,906	9,926,279,455	(28,072,549)	(0.283)
Beban Perjalanan Dinas	23,669,063,183	31,708,838,403	(8,039,775,220)	(25.355)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:06 PM

Halaman : 2

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	52,033,740,348	35,690,443,921	16,343,296,427	45.792
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(13,736,966)	6,760	(13,743,726)	(203,30 9.556)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	357,060,892,920	360,305,758,177	(3,244,865,257)	(0.901)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(345,248,506,099)	(347,352,186,966)	2,103,680,867	(0.606)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(514,195,653)	264,326,374	(778,522,027)	(294.53 1)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	112,089,389	271,733,499	(159,644,110)	(58.75)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	626,285,042	7,407,125	618,877,917	8,355.1 7
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(8,091,672)	1,748,821,511	(1,756,913,183)	(100.46 3)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,447,068	1,898,993,056	(1,857,545,988)	(97.817)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	49,538,740	150,171,545	(100,632,805)	(67.012)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(522,287,325)	2,013,147,885	(2,535,435,210)	(125.94 4)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(345,770,793,424)	(345,339,039,081)	(431,754,343)	0.125
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(345,770,793,424)	(345,339,039,081)	(431,754,343)	0.125

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN IV

Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:07 PM

Halaman : 1

lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,208,549,866,357	3,173,325,597,443	35,224,268,914	1.11
SURPLUS/DEFISIT-LO	(345,770,793,424)	(345,339,039,081)	(431,754,343)	0.125
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,596,978,911)	(750,702,663)	(846,276,248)	112.731
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(4,440,000)	4,440,000	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,596,978,911)	(769,461,115)	(827,517,796)	107.545
LAIN-LAIN	0	23,198,452	(23,198,452)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	316,365,731,496	293,021,456,023	23,344,275,473	7.967
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(31,002,040,839)	(53,068,285,721)	22,066,244,882	(41.581)
EKUITAS AKHIR	3,177,547,825,518	3,120,257,311,722	57,290,513,796	1.836

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN V

Neraca Percobaan

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 19/07/2024
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,587,816	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	131,199,742	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,747,393,181	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	13,736,966
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,722,383,660	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	383,791,500	0
0.0	131111	Tanah	2,330,666,524,668	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	704,398,035,892	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	868,849,348,970	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800	0
0.0	134112	Irigasi	2,980,446,163	0
0.0	134113	Jaringan	5,267,586,977	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	12,060,376,974	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,814,610,125	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	168,877,064	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	561,012,680,230
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	165,721,828,073
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	15,831,346,575
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	788,035,767
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,325,752,656
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	602,959,129
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	125,545,819,487	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	21,071,862,270	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15,612,040,702	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5,750,743,125	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	15,497,962,040
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	64,279
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	124,209,997,088
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	5,560,543,125
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	93,499,510
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	1,583,902,578
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	17,952,156,129
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,091,528,298
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	4,236,316
0.0	391111	Ekuitas	0	3,208,549,866,357
JUMLAH			4,120,840,095,116	4,120,840,095,116

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:06 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,300,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	114,490,399	0
0.0	114211	uang muka belanja pegawai (prepayment)	0	850,000
0.0	115212	Piutang Lainnya	16,894,305	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,644,635,858	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	450,485,008	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	10,000	0
0.0	131111	Tanah	2,331,580,054,368	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	774,657,579,537	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	870,549,881,368	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800	0
0.0	134112	Irigasi	2,980,446,163	0
0.0	134113	Jaringan	5,267,586,977	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	11,626,062,154	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,627,785,903	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	9,099,203,348	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	590,263,754,174
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	179,048,856,695
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	16,053,832,888
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	843,416,697
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,383,456,538
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	633,102,045
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	135,420,431,787	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	21,948,433,338	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	6,108,411,375	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	21,798,412,540
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	67,850
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	125,292,374,575
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	5,918,211,375
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	25,458,548,884
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	4,662,550,660
0.0	212113	Beban modal yang masih harus dibayar	0	41,653,050,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	113,807,399
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	3,084,057,850
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	2,300,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	683,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:06 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	329,253,371,693
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,801,169,897	0
0.0	313211	Transfer Keluar	12,303,171,470	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	12,303,171,470
0.0	391111	Ekuitas	0	3,208,549,866,357
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,596,978,911	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	913,529,700
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	88,199,500
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	23,889,889
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,496,478,396
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	100,300,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	1,125,485,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	9,058,485,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	31,638,425
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	7,799,740
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang	0	33,197,328
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	450,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	74,977,295,999	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,107,838	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,750,434,410	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,260,338,926	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2,728,509,690	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,516,445,880	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,316,128,933	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,610,028,080	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	6,519,079,250	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	405,100,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,060,233,800	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,840,490,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	58,311	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	160,901,960	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	34,862,776	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	390,678,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	150,995,700	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	250,017,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	1,700,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	528,197,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	6,062,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:06 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	106,957,955,483	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,189,344,559	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	25,410,123,429	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	315,840,106	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	83,681,048	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	670,238,900	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	251,772,613	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,610,068,860	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	646,966,400	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	810,691,480	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	175,924,063	0
3.0	521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	1,665,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	6,981,845,947	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	215,773,199	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	131,584,014	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	981,712,400	0
3.0	522141	Beban Sewa	7,148,852,437	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	693,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	878,004,280	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,012,370,855	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	90,282,731	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	275,013,653	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,608,940,801	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,550,000	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	148,412,550	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	4,983,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	12,936,823	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	266,747,895	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,105,569,706	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	309,625,201	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,551,052,200	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,452,861,031	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	249,955,045	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36,396,629,694	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13,327,770,366	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	222,486,313	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	55,380,930	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	57,703,882	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:06 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	30,142,916	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	3,571	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,928,588,187	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	15,034,489	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,809,009,678	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	470,968,598	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	13,736,966
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	626,285,042	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	49,538,740	0
JUMLAH			4,582,508,632,634	4,582,508,632,634

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:07 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	329,253,371,693
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,801,169,897	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	88,199,500
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	23,889,889
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	388,055,793
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	100,300,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	1,125,485,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	9,058,485,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	155,775,002
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	318,432,575
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	2,291,293,461
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	249,953,677
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	450,000
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	850,000
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	6,263,736
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	66,779,177,330	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,077,727	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	74,304
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	5,370,360
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,232,715,460	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	5,892
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,121,017,078	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	11,340,310
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,440,360,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,513,346,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	9,856,120
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,289,354,428	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	362,100
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,211,806,060	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	6,519,395,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	315,750
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	346,825,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	11,281,200
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	960,210,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,369,390,400	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	756
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	49,755	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	134,882,520	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:07 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	29,151,200	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	327,436,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	126,083,220	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	251,207,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	1,275,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	521,267,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	6,062,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	93,567,294,093	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,586,404,478	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	22,253,629,449	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	2,164,803
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	286,321,106	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	87,245,048	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	670,238,900	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	235,032,763	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,380,826,407	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	646,966,400	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	810,691,480	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	169,341,443	0
3.0	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	1,665,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,618,445,885	0
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	34,235,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	8,421,276,912	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	243,382,703	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	166,606,007	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	861,564,150	0
3.0	522141	Belanja Sewa	6,945,289,592	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	677,300,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	825,064,630	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,618,322,752	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	255,417,057	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	90,282,731	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	284,612,251	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,048,983,605	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	53,887,131	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,550,000	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	148,412,550	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	4,983,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 2:07 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	14,795,423	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	250,025,615	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	85,655,027
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,386,855,278	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	279,795,201	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,020,864,200	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	170,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,445,423,501	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	209,565,470
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	249,955,045	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,051,534,200	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,078,738,975	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,031,093,596	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,603,355,286	0
JUMLAH			343,396,967,418	343,396,967,418

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN VI

Laporan Realisasi Pendapatan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	35,000,000	88,199,500	0	88,199,500	252
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	23,889,889	0	23,889,889	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,082,760,000	388,055,793	0	388,055,793	35.84
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	153,000,000	0	0	0	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	199,620,000	100,300,000	0	100,300,000	50.25
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,689,770,000	1,125,485,000	0	1,125,485,000	41.84
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	14,523,850,000	9,058,485,000	0	9,058,485,000	62.37
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	155,775,002	0	155,775,002	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	318,432,575	0	318,432,575	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,291,293,461	0	2,291,293,461	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	249,953,677	0	249,953,677	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	450,000	0	450,000	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	850,000	0	850,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	18,684,000,000	13,801,169,897	0	13,801,169,897	73.87
	JUMLAH PENDAPATAN	18,684,000,000	13,801,169,897	0	13,801,169,897	73.87

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	35,000,000	88,199,500	0	88,199,500	252
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	23,889,889	0	23,889,889	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,082,760,000	388,055,793	0	388,055,793	35.84
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	153,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,270,760,000	500,145,182	0	500,145,182	39.36
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	199,620,000	100,300,000	0	100,300,000	50.25
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	199,620,000	100,300,000	0	100,300,000	50.25
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,689,770,000	1,125,485,000	0	1,125,485,000	41.84
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	14,523,850,000	9,058,485,000	0	9,058,485,000	62.37
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	17,213,620,000	10,183,970,000	0	10,183,970,000	59.16
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	155,775,002	0	155,775,002	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	155,775,002	0	155,775,002	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	318,432,575	0	318,432,575	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,291,293,461	0	2,291,293,461	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	249,953,677	0	249,953,677	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	450,000	0	450,000	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	850,000	0	850,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,860,979,713	0	2,860,979,713	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	18,684,000,000	13,801,169,897	0	13,801,169,897	73.87
	JUMLAH PENDAPATAN	18,684,000,000	13,801,169,897	0	13,801,169,897	73.87

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
088010100KD	kanreg V BKN					
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	16,591,000	3,670,525	0	3,670,525	22.12
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KD kanreg V BKN	16,591,000	3,670,525	0	3,670,525	22.12
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA					
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	15,292,949,000	10,061,279,292	0	10,061,279,292	65.79
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KP BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	15,292,949,000	10,061,279,292	0	10,061,279,292	65.79
088010200KD	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT					
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	74,668,000	60,345,249	0	60,345,249	80.82
	JUMLAH PENDAPATAN 088010200KD BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	74,668,000	60,345,249	0	60,345,249	80.82
088010400KD	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA					
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	102,000,000	14,199,804	0	14,199,804	13.92
	JUMLAH PENDAPATAN 088010400KD BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	102,000,000	14,199,804	0	14,199,804	13.92
088010500KD	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR					
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	8,504,000	6,897,948	0	6,897,948	81.11
	JUMLAH PENDAPATAN 088010500KD BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	8,504,000	6,897,948	0	6,897,948	81.11
088010600KD	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	0	21,789,488	0	21,789,488	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010600KD BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	21,789,488	0	21,789,488	
088010700KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA					
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	5,448,000	50,042,640	0	50,042,640	918.55
	JUMLAH PENDAPATAN 088010700KD BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	5,448,000	50,042,640	0	50,042,640	918.55
088010900KD	BA(088) ES1(01) RIAU					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	39,532,000	50,685,703	0	50,685,703	128.21
	JUMLAH PENDAPATAN 088010900KD BA(088) ES1(01) RIAU	39,532,000	50,685,703	0	50,685,703	128.21
088011100KD 622372	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	0	12,928,051	0	12,928,051	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011100KD BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	0	12,928,051	0	12,928,051	
088011500KD 622386	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	13,740,000	53,354,774	0	53,354,774	388.32
	JUMLAH PENDAPATAN 088011500KD BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	13,740,000	53,354,774	0	53,354,774	388.32
088011700KD 667896	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	2,889,000	68,611,201	0	68,611,201	2374.91
	JUMLAH PENDAPATAN 088011700KD BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	2,889,000	68,611,201	0	68,611,201	2,374.91
088011900KD 560635	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	0	2,037,359,143	0	2,037,359,143	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011900KD BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	2,037,359,143	0	2,037,359,143	
088012200KD 667882	BA(088) ES1(01) BALI KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	36,530,000	46,808,456	0	46,808,456	128.14
	JUMLAH PENDAPATAN 088012200KD BA(088) ES1(01) BALI	36,530,000	46,808,456	0	46,808,456	128.14
088012500KD 622390	BA(088) ES1(01) PAPUA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	40,601,000	118,611,426	0	118,611,426	292.14
	JUMLAH PENDAPATAN 088012500KD BA(088) ES1(01) PAPUA	40,601,000	118,611,426	0	118,611,426	292.14
088013300KD 667652	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	0	9,056,370	0	9,056,370	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088013300KD BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	0	9,056,370	0	9,056,370	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 19/07/24 1:22 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
020505	PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	3,050,548,000	1,185,529,827	0	1,185,529,827	38.86
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	3,050,548,000	1,185,529,827	0	1,185,529,827	38.86
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	18,684,000,000	13,801,169,897	0	13,801,169,897	73.87
	JUMLAH PENDAPATAN	18,684,000,000	13,801,169,897	0	13,801,169,897	73.87

LAMPIRAN VII

Laporan Posisi BMN di Neraca

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl.Data : 30/07/24 12:22 PM
Tanggal : 30/07/24 1:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	6,644,635,858
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	450,485,008
131111	Tanah	2,331,580,054,368
132111	Peralatan dan Mesin	774,657,579,537
133111	Gedung dan Bangunan	870,549,881,368
134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800
134112	Irigasi	2,980,446,163
134113	Jaringan	5,267,586,977
135111	Aset Tetap Renovasi	11,626,062,154
135121	Aset Tetap Lainnya	1,627,785,903
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	9,099,203,348
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(590,263,754,174)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(179,048,856,695)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16,053,832,888)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(843,416,697)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,383,456,538)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(633,102,045)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	135,420,431,787
162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	21,948,433,338
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	6,108,411,375
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(21,798,412,540)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(67,850)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(125,292,374,575)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(5,918,211,375)
J U M L A H		3,252,389,978,607

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT KL
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 30/07/24 1:58 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	6,722,383,660
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	383,791,500
131111	Tanah	2,330,666,524,668
132111	Peralatan dan Mesin	704,398,035,892
133111	Gedung dan Bangunan	868,849,348,970
134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800
134112	Irigasi	2,980,446,163
134113	Jaringan	5,267,586,977
135111	Aset Tetap Renovasi	12,060,376,974
135121	Aset Tetap Lainnya	1,814,610,125
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	168,877,064
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(561,012,680,230)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(165,721,828,073)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(15,831,346,575)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(788,035,767)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,325,752,656)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(602,959,129)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	125,545,819,487
162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15,612,040,702
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	5,750,743,125
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(15,497,962,040)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(64,279)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(124,209,997,088)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(5,560,543,125)
J U M L A H		3,205,333,883,145

LAMPIRAN VIII

Laporan Barang Kuasa Pengguna

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	570,438	2,330,666,524,668	15,460	3,379,762,700	460	2,466,233,000	585,438	2,331,580,054,368
20101	TANAH PERSIL	570,438	2,330,666,524,668	15,460	3,379,762,700	460	2,466,233,000	585,438	2,331,580,054,368
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	67,234	704,398,035,892	1,417	99,866,030,175	1,521	29,606,486,530	67,130	774,657,579,537
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	216	39,065,671,821	3	25,752,000	1	541,480,000	218	38,549,943,821
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	216	40,686,136,920	0	0	1	207,609,200	215	40,478,527,720
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	108	222,531,720	0	0	0	0	108	222,531,720
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	28	6,054,885,211	1	7,270,500	0	0	29	6,062,155,711
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	40	126,802,050	0	0	0	0	40	126,802,050
30303	ALAT UKUR	8	109,795,050	0	0	0	0	8	109,795,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	0	0	0	0	6	49,107,300
30501	ALAT KANTOR	9,792	82,050,874,380	74	6,186,776,950	77	4,695,019,066	9,789	83,542,632,264
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,934	149,188,518,672	393	902,475,386	497	1,567,240,462	37,830	148,523,753,596
30601	ALAT STUDIO	1,150	40,567,265,657	39	274,571,609	6	593,184,812	1,183	40,248,652,454
30602	ALAT KOMUNIKASI	618	5,023,790,910	3	12,744,000	18	15,686,000	603	5,020,848,910
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	0	0	0	0	12	1,440,181,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	329	952,713,794	0	0	4	13,209,000	325	939,504,794
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14	120,200,625	0	0	0	0	14	120,200,625
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	86	5,795,051,964	0	0	2	374,835,947	84	5,420,216,017
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	0	0	0	0	1	18,616,500
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	0	0	0	0	17	87,670,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	4,284,000	0	0	0	0	1	4,284,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	2,400,000	1	1,576,400	1	1,576,400	2	2,400,000
31001	KOMPUTER UNIT	10,870	155,198,977,129	666	11,395,629,475	829	12,391,735,573	10,707	154,202,871,031
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,675	174,942,732,982	229	80,975,764,855	85	9,204,910,070	5,819	246,713,587,767
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	6	64,269,000	0	0	6	64,269,000
31503	ALAT SAR	57	2,169,719,500	0	0	0	0	57	2,169,719,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	12	218,556,314	0	0	0	0	12	218,556,314
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	54,978,600	0	0	0	0	8	54,978,600
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27	143,815,000	0	0	0	0	27	143,815,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	7	102,758,000	2	19,200,000	0	0	9	121,958,000
133111	Gedung dan Bangunan	494	868,849,348,970	4	3,801,870,998	2	2,101,338,600	496	870,549,881,368
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	168	748,625,031,034	4	3,801,870,998	1	1,977,252,600	171	750,449,649,432
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	297	104,798,653,706	0	0	1	124,086,000	296	104,674,567,706
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	0	0	0	0	1	45,569,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,380,095,230	0	0	0	0	28	15,380,095,230

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:58 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	58,771	16,468,966,800	0	0	0	0	58,771	16,468,966,800
50101	JALAN	58,761	16,466,806,800	0	0	0	0	58,761	16,466,806,800
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	0	0	0	0	10	2,160,000
134112	Irigasi	27	2,980,446,163	0	0	0	0	27	2,980,446,163
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	16,428,500	0	0	0	0	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	11	1,757,299,063	0	0	0	0	11	1,757,299,063
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	0	0	0	0	4	440,714,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
134113	Jaringan	32	5,267,586,977	0	0	0	0	32	5,267,586,977
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	0	0	0	0	4	1,783,479,940
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	0	0	7	951,173,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
135111	Aset Tetap Renovasi	25	12,060,376,974	0	0	1	434,314,820	24	11,626,062,154
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	23	11,976,140,074	0	0	1	434,314,820	22	11,541,825,254
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	80,238,400	0	0	0	0	1	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	11,646	1,814,610,125	3,990	216,453,979	6,397	403,278,201	9,239	1,627,785,903
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,403	951,436,025	3,990	216,453,979	6,397	403,278,201	8,996	764,611,803
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211	676,955,000	0	0	0	0	211	676,955,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	0	0	0	0	29	84,719,100
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	0	2	80,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	188	15,612,040,702	3,166	8,966,382,277	2,467	2,629,989,641	887	21,948,433,338
30103	ALAT BANTU	0	0	1	541,480,000	0	0	1	541,480,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	1	207,609,200	1	207,609,200	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	3	8,881,020	42	1,490,769,066	17	775,740,000	28	723,910,086
30502	ALAT RUMAH TANGGA	66	389,359,732	437	1,460,051,962	192	658,948,842	311	1,190,462,852

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:58 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30601	ALAT STUDIO	10	946,857,597	6	593,184,812	1	4,004,000	15	1,536,038,409
30602	ALAT KOMUNIKASI	5	541,968,610	18	15,686,000	0	0	23	557,654,610
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	4	13,209,000	0	0	4	13,209,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	2	374,835,947	0	0	5	811,021,841
31001	KOMPUTER UNIT	81	2,110,400,875	187	1,890,773,598	48	536,513,804	220	3,464,660,669
31002	PERALATAN KOMPUTER	17	11,034,212,974	61	2,191,958,470	11	273,980,573	67	12,952,190,871
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	144,174,000	0	0	0	0	3	144,174,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	2,407	186,824,222	2,197	173,193,222	210	13,631,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3,958,117,937,271		116,230,500,129		37,641,640,792		4,036,706,796,608

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:59 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	Tanah	585,438	2,331,580,054,368	0	0	0	2,331,580,054,368
20101	TANAH PERSIL	585,438	2,331,580,054,368	0	0	0	2,331,580,054,368
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	67,130	774,657,579,537	(561,012,680,230)	(29,251,073,944)	(590,263,754,174)	184,393,825,363
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	218	38,549,943,821	(29,344,312,493)	(856,741,355)	(30,201,053,848)	8,348,889,973
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	215	40,478,527,720	(30,743,231,976)	(1,226,265,338)	(31,969,497,314)	8,509,030,406
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	108	222,531,720	(200,062,024)	(12,499,696)	(212,561,720)	9,970,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29	6,062,155,711	(5,614,626,877)	(87,425,793)	(5,702,052,670)	360,103,041
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	40	126,802,050	(114,580,445)	(1,717,545)	(116,297,990)	10,504,060
30303	ALAT UKUR	8	109,795,050	(57,048,075)	(10,064,325)	(67,112,400)	42,682,650
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	(48,602,950)	(504,350)	(49,107,300)	0
30501	ALAT KANTOR	9,789	83,542,632,264	(79,102,508,309)	486,975,664	(78,615,532,645)	4,927,099,619
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,830	148,523,753,596	(131,409,062,162)	(1,672,617,838)	(133,081,680,000)	15,442,073,596
30601	ALAT STUDIO	1,183	40,248,652,454	(25,744,100,838)	(1,328,213,991)	(27,072,314,829)	13,176,337,625
30602	ALAT KOMUNIKASI	603	5,020,848,910	(4,908,290,992)	(22,503,216)	(4,930,794,208)	90,054,702
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	(1,111,327,449)	(66,668,106)	(1,177,995,555)	262,186,238
30701	ALAT KEDOKTERAN	325	939,504,794	(822,012,535)	(25,807,187)	(847,819,722)	91,685,072
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14	120,200,625	(71,774,675)	(9,929,288)	(81,703,963)	38,496,662
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	84	5,420,216,017	(5,516,731,780)	329,967,978	(5,186,763,802)	233,452,215
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	(4,343,850)	(620,550)	(4,964,400)	13,652,100
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	(34,374,991)	(6,262,139)	(40,637,130)	47,032,870
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	4,284,000	(856,800)	(214,200)	(1,071,000)	3,213,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	2,400,000	(1,200,000)	(300,000)	(1,500,000)	900,000
31001	KOMPUTER UNIT	10,707	154,202,871,031	(91,669,555,574)	(9,504,024,574)	(101,173,580,148)	53,029,290,883
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,819	246,713,587,767	(152,023,638,823)	(15,207,867,084)	(167,231,505,907)	79,482,081,860
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6	64,269,000	0	(2,142,300)	(2,142,300)	62,126,700
31503	ALAT SAR	57	2,169,719,500	(2,169,719,500)	0	(2,169,719,500)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	12	218,556,314	(41,967,758)	(10,927,816)	(52,895,574)	165,660,740
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	54,978,600	(39,390,638)	(3,233,037)	(42,623,675)	12,354,925
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27	143,815,000	(140,600,716)	(267,858)	(140,868,574)	2,946,426
31901	PERALATAN OLAH RAGA	9	121,958,000	(78,758,000)	(11,200,000)	(89,958,000)	32,000,000
133111	Gedung dan Bangunan	496	870,549,881,368	(165,721,828,073)	(13,327,028,622)	(179,048,856,695)	691,501,024,673
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	171	750,449,649,432	(144,860,915,863)	(11,625,642,035)	(156,486,557,898)	593,963,091,534
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	296	104,674,567,706	(18,551,340,094)	(1,470,185,412)	(20,021,525,506)	84,653,042,200
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	(6,009,096)	(500,758)	(6,509,854)	39,059,146
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,380,095,230	(2,303,563,020)	(230,700,417)	(2,534,263,437)	12,845,831,793

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:59 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
134111	Jalan dan Jembatan	58,771	16,468,966,800	(15,831,346,575)	(222,486,313)	(16,053,832,888)	415,133,912
50101	JALAN	58,761	16,466,806,800	(15,830,986,579)	(222,458,621)	(16,053,445,200)	413,361,600
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	(359,996)	(27,692)	(387,688)	1,772,312
134112	Irigasi	27	2,980,446,163	(788,035,767)	(55,380,930)	(843,416,697)	2,137,029,466
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	(32,623,537)	(2,793,765)	(35,417,302)	221,659,298
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	(25,120,446)	(1,932,342)	(27,052,788)	131,967,212
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	16,428,500	(16,428,500)	0	(16,428,500)	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,757,299,063	(538,865,324)	(37,193,441)	(576,058,765)	1,181,240,298
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	(99,662,396)	(7,666,339)	(107,328,735)	333,385,265
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	(75,335,564)	(5,795,043)	(81,130,607)	268,777,393
134113	Jaringan	32	5,267,586,977	(2,325,752,656)	(57,703,882)	(2,383,456,538)	2,884,130,439
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	(203,544,165)	(5,592,875)	(209,137,040)	126,435,460
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	(257,020,652)	(23,401,432)	(280,422,084)	1,503,057,856
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	(951,173,820)	0	(951,173,820)	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	(60,573,738)	(1,730,608)	(62,304,416)	41,536,284
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	(807,353,859)	(25,359,105)	(832,712,964)	1,196,015,403
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	(46,086,422)	(1,619,792)	(47,706,214)	17,085,436
135111	Aset Tetap Renovasi	24	11,626,062,154	(558,669,466)	(25,313,029)	(583,982,495)	11,042,079,659
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	22	11,541,825,254	(558,669,466)	(25,313,029)	(583,982,495)	10,957,842,759
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	80,238,400	0	0	0	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,239	1,627,785,903	(44,289,663)	(4,829,887)	(49,119,550)	1,578,666,353
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,996	764,611,803	0	0	0	764,611,803
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211	676,955,000	0	0	0	676,955,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	(44,289,663)	(4,829,887)	(49,119,550)	35,599,550
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	80,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	887	21,948,433,338	(15,497,962,040)	(6,300,450,500)	(21,798,412,540)	150,020,798
30103	ALAT BANTU	1	541,480,000	0	(541,480,000)	(541,480,000)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	28	723,910,086	(8,881,020)	(712,952,266)	(721,833,286)	2,076,800
30502	ALAT RUMAH TANGGA	311	1,190,462,852	(389,359,732)	(796,817,520)	(1,186,177,252)	4,285,600
30601	ALAT STUDIO	15	1,536,038,409	(946,857,597)	(589,180,812)	(1,536,038,409)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:59 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
30602	ALAT KOMUNIKASI	23	557,654,610	(541,968,610)	(15,686,000)	(557,654,610)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	4	13,209,000	0	(11,750,400)	(11,750,400)	1,458,600
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	5	811,021,841	(436,185,894)	(374,835,947)	(811,021,841)	0
31001	KOMPUTER UNIT	220	3,464,660,669	(2,110,400,875)	(1,345,987,294)	(3,456,388,169)	8,272,500
31002	PERALATAN KOMPUTER	67	12,952,190,871	(11,034,212,974)	(1,909,445,235)	(12,943,658,209)	8,532,662
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	144,174,000	(30,095,338)	(2,315,026)	(32,410,364)	111,763,636
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	210	13,631,000	0	0	0	13,631,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		722,044	4,036,706,796,608	(761,780,564,470)	(49,244,267,107)	(811,024,831,577)	3,225,681,965,031

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	12,107	5,289,371,107	558	316,655,580	370	168,487,499	12,295	5,437,539,188
30103	ALAT BANTU	18	15,120,400	5	3,695,400	0	0	23	18,815,800
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	13	10,257,860	2	1,529,830	0	0	15	11,787,690
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	1,714,089	5	3,707,220	0	0	8	5,421,309
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	12	6,556,812	2	1,388,900	0	0	14	7,945,712
30303	ALAT UKUR	11	6,185,800	0	0	0	0	11	6,185,800
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	1	489,900	0	0	1	489,900
30501	ALAT KANTOR	290	156,207,300	34	20,149,428	2	1,979,002	322	174,377,726
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,868	2,813,349,656	164	107,149,907	108	27,755,982	5,924	2,892,743,581
30601	ALAT STUDIO	389	253,574,650	122	74,123,540	88	57,657,740	423	270,040,450
30602	ALAT KOMUNIKASI	370	134,818,229	7	2,940,000	0	0	377	137,758,229
30701	ALAT KEDOKTERAN	111	22,124,480	1	943,500	0	0	112	23,067,980
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	0	0	0	0	5	1,973,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	10	7,154,000	0	0	0	0	10	7,154,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	32	2,800,000	0	0	0	0	32	2,800,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	7	3,939,000	3	900,000	1	839,000	9	4,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	4,952	1,832,218,331	210	99,157,955	171	80,255,775	4,991	1,851,120,511
31503	ALAT SAR	5	3,405,600	0	0	0	0	5	3,405,600
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	3,741,000	2	480,000	0	0	9	4,221,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	3	13,335,900	0	0	0	0	3	13,335,900
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	894,600	0	0	0	0	1	894,600
133111	Gedung dan Bangunan	5	24,331,300	0	0	0	0	5	24,331,300
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	18,481,300	0	0	0	0	1	18,481,300
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	0	0	0	0	4	5,850,000
135121	Aset Tetap Lainnya	492	34,404,500	4	1,665,000	0	0	496	36,069,500
60501	TANAMAN	492	34,404,500	4	1,665,000	0	0	496	36,069,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	108	27,755,982	12	2,400,000	96	25,355,982
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	108	27,755,982	12	2,400,000	96	25,355,982
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			5,348,106,907		346,076,562		170,887,499		5,523,295,970

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM
Tanggal : 30/07/24 1:59 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	Peralatan dan Mesin	12,295	5,437,539,188	(2,293,350,149)	(429,659,305)	(2,723,009,454)	2,714,529,734
30103	ALAT BANTU	23	18,815,800	(4,919,516)	(1,343,983)	(6,263,499)	12,552,301
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	15	11,787,690	(8,300,850)	(1,858,243)	(10,159,093)	1,628,597
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	8	5,421,309	(237,832)	(271,066)	(508,898)	4,912,411
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	14	7,945,712	(3,942,868)	(477,192)	(4,420,060)	3,525,652
30303	ALAT UKUR	11	6,185,800	(2,101,400)	(618,580)	(2,719,980)	3,465,820
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	489,900	0	(61,238)	(61,238)	428,662
30501	ALAT KANTOR	322	174,377,726	(56,395,880)	(14,249,913)	(70,645,793)	103,731,933
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,924	2,892,743,581	(1,697,087,981)	(154,591,893)	(1,851,679,874)	1,041,063,707
30601	ALAT STUDIO	423	270,040,450	(50,097,845)	(26,685,945)	(76,783,790)	193,256,660
30602	ALAT KOMUNIKASI	377	137,758,229	(76,948,807)	(7,493,485)	(84,442,292)	53,315,937
30701	ALAT KEDOKTERAN	112	23,067,980	(14,722,165)	(1,418,135)	(16,140,300)	6,927,680
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	(1,973,400)	0	(1,973,400)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	10	7,154,000	(3,227,626)	(417,626)	(3,645,252)	3,508,748
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	32	2,800,000	(923,750)	(98,750)	(1,022,500)	1,777,500
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	9	4,000,000	(739,875)	(395,125)	(1,135,000)	2,865,000
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	4,991	1,851,120,511	(356,121,507)	(218,382,682)	(574,504,189)	1,276,616,322
31503	ALAT SAR	5	3,405,600	(2,066,750)	(851,400)	(2,918,150)	487,450
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	4,221,000	(281,625)	(263,813)	(545,438)	3,675,562
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	3	13,335,900	(12,962,272)	(31,136)	(12,993,408)	342,492
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	894,600	(298,200)	(149,100)	(447,300)	447,300
133111	Gedung dan Bangunan	5	24,331,300	(1,701,939)	(243,313)	(1,945,252)	22,386,048
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	18,481,300	(554,439)	(184,813)	(739,252)	17,742,048
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	(1,147,500)	(58,500)	(1,206,000)	4,644,000
135121	Aset Tetap Lainnya	496	36,069,500	0	0	0	36,069,500
60501	TANAMAN	496	36,069,500	0	0	0	36,069,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	96	25,355,982	0	(22,304,286)	(22,304,286)	3,051,696
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	96	25,355,982	0	(22,304,286)	(22,304,286)	3,051,696
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		12,892	5,523,295,970	(2,295,052,088)	(452,206,904)	(2,747,258,992)	2,776,036,978

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	570,438	2,330,666,524,668	15,460	3,379,762,700	460	2,466,233,000	585,438	2,331,580,054,368
20101	TANAH PERSIL	570,438	2,330,666,524,668	15,460	3,379,762,700	460	2,466,233,000	585,438	2,331,580,054,368
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	79,341	709,687,406,999	1,975	100,182,685,755	1,891	29,774,974,029	79,425	780,095,118,725
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	234	39,080,792,221	8	29,447,400	1	541,480,000	241	38,568,759,621
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	216	40,686,136,920	0	0	1	207,609,200	215	40,478,527,720
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	121	232,789,580	2	1,529,830	0	0	123	234,319,410
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	31	6,056,599,300	6	10,977,720	0	0	37	6,067,577,020
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	52	133,358,862	2	1,388,900	0	0	54	134,747,762
30303	ALAT UKUR	19	115,980,850	0	0	0	0	19	115,980,850
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	1	489,900	0	0	7	49,597,200
30501	ALAT KANTOR	10,082	82,207,081,680	108	6,206,926,378	79	4,696,998,068	10,111	83,717,009,990
30502	ALAT RUMAH TANGGA	43,802	152,001,868,328	557	1,009,625,293	605	1,594,996,444	43,754	151,416,497,177
30601	ALAT STUDIO	1,539	40,820,840,307	161	348,695,149	94	650,842,552	1,606	40,518,692,904
30602	ALAT KOMUNIKASI	988	5,158,609,139	10	15,684,000	18	15,686,000	980	5,158,607,139
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	0	0	0	0	12	1,440,181,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	440	974,838,274	1	943,500	4	13,209,000	437	962,572,774
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	19	122,174,025	0	0	0	0	19	122,174,025
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	96	5,802,205,964	0	0	2	374,835,947	94	5,427,370,017
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	0	0	0	0	1	18,616,500
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	0	0	0	0	17	87,670,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	33	7,084,000	0	0	0	0	33	7,084,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	9	6,339,000	4	2,476,400	2	2,415,400	11	6,400,000
31001	KOMPUTER UNIT	10,870	155,198,977,129	666	11,395,629,475	829	12,391,735,573	10,707	154,202,871,031
31002	PERALATAN KOMPUTER	10,627	176,774,951,313	439	81,074,922,810	256	9,285,165,845	10,810	248,564,708,278
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	6	64,269,000	0	0	6	64,269,000
31503	ALAT SAR	62	2,173,125,100	0	0	0	0	62	2,173,125,100
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	12	218,556,314	0	0	0	0	12	218,556,314
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	15	58,719,600	2	480,000	0	0	17	59,199,600
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	30	157,150,900	0	0	0	0	30	157,150,900
31901	PERALATAN OLAH RAGA	8	103,652,600	2	19,200,000	0	0	10	122,852,600
133111	Gedung dan Bangunan	499	868,873,680,270	4	3,801,870,998	2	2,101,338,600	501	870,574,212,668
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	169	748,643,512,334	4	3,801,870,998	1	1,977,252,600	172	750,468,130,732
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	297	104,798,653,706	0	0	1	124,086,000	296	104,674,567,706
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	51,419,000	0	0	0	0	5	51,419,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,380,095,230	0	0	0	0	28	15,380,095,230

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:58 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	58,771	16,468,966,800	0	0	0	0	58,771	16,468,966,800
50101	JALAN	58,761	16,466,806,800	0	0	0	0	58,761	16,466,806,800
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	0	0	0	0	10	2,160,000
134112	Irigasi	27	2,980,446,163	0	0	0	0	27	2,980,446,163
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	1	16,428,500	0	0	0	0	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,757,299,063	0	0	0	0	11	1,757,299,063
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	0	0	0	0	4	440,714,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
134113	Jaringan	32	5,267,586,977	0	0	0	0	32	5,267,586,977
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	0	0	0	0	4	1,783,479,940
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	0	0	7	951,173,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
135111	Aset Tetap Renovasi	25	12,060,376,974	0	0	1	434,314,820	24	11,626,062,154
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	23	11,976,140,074	0	0	1	434,314,820	22	11,541,825,254
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	80,238,400	0	0	0	0	1	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	12,138	1,849,014,625	3,994	218,118,979	6,397	403,278,201	9,735	1,663,855,403
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,403	951,436,025	3,990	216,453,979	6,397	403,278,201	8,996	764,611,803
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211	676,955,000	0	0	0	0	211	676,955,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	0	0	0	0	29	84,719,100
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	0	2	80,000,000
60501	TANAMAN	492	34,404,500	4	1,665,000	0	0	496	36,069,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	188	15,612,040,702	3,274	8,994,138,259	2,479	2,632,389,641	983	21,973,789,320
30103	ALAT BANTU	0	0	1	541,480,000	0	0	1	541,480,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	1	207,609,200	1	207,609,200	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	3	8,881,020	42	1,490,769,066	17	775,740,000	28	723,910,086

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:58 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30502	ALAT RUMAH TANGGA	66	389,359,732	545	1,487,807,944	204	661,348,842	407	1,215,818,834
30601	ALAT STUDIO	10	946,857,597	6	593,184,812	1	4,004,000	15	1,536,038,409
30602	ALAT KOMUNIKASI	5	541,968,610	18	15,686,000	0	0	23	557,654,610
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	4	13,209,000	0	0	4	13,209,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	2	374,835,947	0	0	5	811,021,841
31001	KOMPUTER UNIT	81	2,110,400,875	187	1,890,773,598	48	536,513,804	220	3,464,660,669
31002	PERALATAN KOMPUTER	17	11,034,212,974	61	2,191,958,470	11	273,980,573	67	12,952,190,871
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	144,174,000	0	0	0	0	3	144,174,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	2,407	186,824,222	2,197	173,193,222	210	13,631,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3,963,466,044,178		116,576,576,691		37,812,528,291		4,042,230,092,578

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 1:59 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_kel_kl_poc

UAPB

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162121	Hak Cipta	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
162151	Software	211	125,545,819,487	6	11,033,498,000	8	1,158,885,700	209	135,420,431,787
80101	ASET TAK BERWUJUD	211	125,545,819,487	6	11,033,498,000	8	1,158,885,700	209	135,420,431,787
162161	Lisensi	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1	195,000,000	0	0	0	0	1	195,000,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	195,000,000	0	0	0	0	1	195,000,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	28	5,750,743,125	8	1,158,885,700	7	801,217,450	29	6,108,411,375
80101	ASET TAK BERWUJUD	28	5,750,743,125	8	1,158,885,700	7	801,217,450	29	6,108,411,375
TOTAL			131,492,062,612		12,192,383,700		1,960,103,150		141,724,343,162

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 30/07/24 12:22 PM

Tanggal : 30/07/24 2:00 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI AMORTISASI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
162121	Hak Cipta	1	500,000	(64,279)	(3,571)	(67,850)	432,150
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	(64,279)	(3,571)	(67,850)	432,150
162151	Software	209	135,420,431,787	(124,209,997,088)	(1,082,377,487)	(125,292,374,575)	10,128,057,212
80101	ASET TAK BERWUJUD	209	135,420,431,787	(124,209,997,088)	(1,082,377,487)	(125,292,374,575)	10,128,057,212
162161	Lisensi	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1	195,000,000	0	0	0	195,000,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	195,000,000	0	0	0	195,000,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	29	6,108,411,375	(5,560,543,125)	(357,668,250)	(5,918,211,375)	190,200,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	29	6,108,411,375	(5,560,543,125)	(357,668,250)	(5,918,211,375)	190,200,000
JUMLAH		240	141,724,343,162	(129,770,604,492)	(1,440,049,308)	(131,210,653,800)	10,513,689,362

LAMPIRAN IX

Laporan Persediaan

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tanggal : 30/07/24 2:03 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_persediaan_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	252,831,100
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	17,497,973
1010301003	Penjepit Kertas	159,683,865
1010301004	Penghapus/Korektor	17,812,146
1010301005	Buku Tulis	47,003,166
1010301006	Ordner Dan Map	535,240,807
1010301007	Penggaris	9,276,586
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	18,187,623
1010301009	Pita Mesin Ketik	20,647,830
1010301010	Alat Perekat	85,903,141
1010301011	Stadler HD	783,355
1010301012	Staples	26,819,326
1010301013	Isi Staples	44,569,330
1010301014	Barang Cetak	294,431,990
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,041,732,241
1010302001	Kertas HVS	449,000,157
1010302002	Berbagai Kertas	90,496,253
1010302003	Kertas Cover	19,952,380
1010302004	Amplop	402,379,931
1010302005	Kop Surat	3,500,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	179,827,734
1010303002	Tinta Cetak	13,763,670
1010303003	Plat Cetak	125,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	356,311,261
1010304002	Computer File/Tempat Disket	557,000
1010304003	Pita Printer	3,652,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	1,661,574,568
1010304005	Disket	1,148,400
1010304006	USB/Flash Disk	54,530,495
1010304010	Mouse	5,271,755
1010304011	CD/DVD	473,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	38,098,429
1010306001	Kabel Listrik	21,610,467
1010306002	Lampu Listrik	149,896,854
1010306003	Stop Kontak	9,991,972
1010306004	Saklar	6,549,960
1010306005	Stacker	3,188,460
1010306006	Balast	1,625,000
1010306007	Starter	679,840
1010306008	Vitting	12,222,800
1010306010	Batu Baterai	67,734,575
1010306999	Alat Listrik Lainnya	28,920,378
1010307005	Penutup Kaki	1,020,000
1010309001	Meterai	13,804,000
1010309003	Stempel	106,700

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tanggal : 30/07/24 2:03 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_persediaan_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode	Uraian	Jumlah
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	14,553,383
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	325,899
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,944,100
1010311001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran	30,356,746
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	3,970,093
1010313001	Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)	28,083,131
1010313002	Minyak Pelumas (Barang Konsumsi)	2,629,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	40,342,451
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	264,716,598
1010314003	Obat Gas (Barang Konsumsi)	381,300
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	2,010,502
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	16,056,851
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	29,547,326
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39,284,960
Jumlah Barang Konsumsi		6,644,635,858
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	28,554,341
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	49,837,560
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	18,136,345
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	16,043,836
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	38,614,492
1010305006	Alat Pengikat	7,966,890
1010305007	Peralatan Ledeng	2,953,194
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	134,711,096
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	1,155,000
1010305012	Pengharum Ruangan	32,790,556
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	119,721,698
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		450,485,008
TOTAL		7,095,120,866

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 262,931,190 dalam kondisi usang.

LAMPIRAN X

Telaah Laporan Keuangan

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
SEMESTERAN / TAHUNAN TA 2024

Kode dan Nama K/L : (088) Badan Kepegawaian Negara

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA Neraca LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada

KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI

Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Semua face laporan (LRA LO LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama apabila ada yang tidak sama uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit) LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama

PENGECEKAN PADA MONSAKTI

To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	√		Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi <i>(dalam hal masih terdapat anomali)</i>	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar (TK) Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di <i>Settle</i> Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a Pagu/DIPA		√	Tidak
	b Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c Belanja		√	Tidak
	d Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e Pendapatan		√	Tidak
	f Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g Kas BLU		√	Tidak
	h Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i Kas Hibah		√	Tidak
	j Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	√		Tidak
Daftar MONSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)	√		Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (<i>Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun belum diregister</i>)	√		Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)	√		Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (<i>selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada</i>)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1xxxx bersaldo (D) (<i>kec. Penyisihan dan Akumulasi</i>)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (<i>kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu</i>)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	√		Ya

Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (<i>untuk LK tahunan tidak boleh ada</i>)	√		Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41xxxx / 43xxxx (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan Pita Cukai Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (<i>untuk LK tahunan tidak boleh ada</i>)		√	Ada/Tidak
	<i>Dalam hal masih terdapat akun tersebut agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/barang/jasa? <i>Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya</i>		√		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak

2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211 Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133 Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211	-	-	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	-		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	√		Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? <i>Jika ada konfirmasi kebenarannya Jelaskan dalam Calk</i>	√		Ya/Tidak
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20xx di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx) beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx) beban subsidi (55xxxx) beban hibah (56xxxx) dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset" Bila ada cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? <i>Akun ini hanya khusus dari IP</i>		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	<i>Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000 transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST</i>			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111 313121 313211 313221 391131 391132 391133 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA" maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA" sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK" maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak

3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512x pada Neraca Percobaan Kas dan AkruaI?	√		Ya/Tidak
	<i>Jika Ada apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?</i>	√		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	<i>Jika Ya ada realisasi akun 526xxx pada Neraca Percobaan Kas</i>	-	-	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	<i>Jika Ya ada realisasi akun 57xxxx pada Neraca Percobaan Kas</i>	-	-	Ya
Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika Ada Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan AkruaI	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411x) pada Neraca Percobaan AkruaI	√		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan AkruaI	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121xx) pada Neraca Percobaan AkruaI	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914 1133XX dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	-	-	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914 1133XX dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	-	-	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx 111826 1133xx 165111 dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	-	-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya

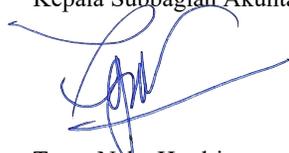
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA** serta hal-hal lainnya yang diperlukan termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

- 1 Terdapat Pagu Minus pada akun Belanja Pegawai diantaranya sebagai berikut:
 - a Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada akun Belanja Beban Tunjangan PPh PNS (511125) sebesar Rp31.183.839,00;
 - b Kantor Regional V BKN Jakarta pada akun Belanja Beban Tunjangan PPh PNS (511125) sebesar Rp25.538.098,00.
- 2 Terdapat Selisih Rekon Internal pada Kantor Regional III BKN Bandung berupa piutang lainnya sebesar Rp265.500,00 dengan kondisi dimana saat input *settlement* piutang non SBS, ada satu piutang yang salah tulis keterangannya. Karena tidak ada menu edit, maka dihapus dulu lalu saat diinput ulang ternyata tidak bisa karena sudah sempat kerekam. Ketika dicek di kartu piutangnya saldo kreditnya tidak muncul, senilai 265.500 untuk piutang nomor 00014/AR/017237/202 nama debitur Herlina Tambunan.
- 3 Terdapat Saldo Tidak Normal pada akun Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment) sebesar Rp850.000,00 berasal dari Kantor Regional V BKN Jakarta yang merupakan kesalahan penggunaan akun potongan SPM untuk Pengembalian Belanja Pegawai TAYL (425911) namun menggunakan akun potongan SPM untuk Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991).
- 4 Terdapat akun Persediaan Belum Diregister sebesar Rp10.000,00 berasal dari Kantor Pusat BKN yang merupakan kesalahan pencatatan tanggal perolehan pada BAST yang seharusnya dibuat bulan Juli namun tercatat bulan Juni. Untuk kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan, namun koreksi pencatatan tersebut terbukukan pada bulan Juli.
- 5 Terdapat selisih transaksi resiprokal pada Kantor Pusat BKN sebesar Rp42.560.000,00 dan Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh sebesar Rp(13.850.000,00) dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.

Mengetahui,
Pejabat Penyusun LKKL
Kepala Subbagian Akuntansi



Tegar Nake Hardriana
NIP. 198907072015031004

Jakarta, 27 Juli 2024

Penelaah
Pranata Keuangan APBN Mahir



Eka Desi Lestari
NIP 198812022010122001

LAMPIRAN XI
CATATAN ATAS LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/PMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP.291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

B. Entitas Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. BKN bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKN adalah tersusunnya sistem (norma, standar, dan prosedur) manajemen kepegawaian secara nasional. Sedangkan hasil (*outcome*) yang hendak dicapai oleh BKN adalah “Terwujudnya Sistem Manajemen Kepegawaian Secara Nasional”. *Outcome* tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan manajemen kepegawaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan dari seluruh unit/satuan kerja BKN.

C. Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Badan Kepegawaian Negara Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 .

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Kodefikasi Barang Milik Negara

Kodefikasi barang adalah pemberian kode barang milik negara sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik negara. Kode Lokasi adalah kode yang

dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab BMN. Sedangkan Kode Registrasi adalah kode yang diberikan pada setiap BMN yang terdiri dari kode lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kodefikasi BMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

B. Kapitalisasi Barang Milik Negara

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Dasar kapitalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, disebutkan pada bagian Kedua (Kapitalisasi BMN Berupa Aset Tetap) Pasal 40 ayat 4, bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:
 - a. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk peralatan dan mesin; atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
 - b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), untuk gedung dan bangunan; atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
2. Serta dengan memperhatikan lampiran 11.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50 disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat dikapitalisasi merupakan "pengeluaran setelah saldo awal suatu aset tetap yang *memperpanjang masa manfaat* atau yang kemungkinan besar *memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja*, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan".

C. Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara

Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga. Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

D. Penyusutan Barang Milik Negara

1. Penyusutan

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset yang bertujuan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

2. Nilai Penyusutan

- a. Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 01 Januari 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 01 Januari 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 01 Januari 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- d. Penyusutan aset tak berwujud (amortisasi) merupakan penghitungan dan pencatatan yang dilakukan pada dan oleh tingkat Kuasa Pengguna Barang, dilakukan pada setiap akhir semester dengan tidak memperhatikan nilai residu untuk setiap sub kelompok ATB. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- e. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2015 untuk aset tak berwujud yang diperoleh berdasarkan saldo sampai dengan 01 Januari 2016 sebesar nilai perolehan.

3. Metode Penyusutan Yang Digunakan

- a. Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- b. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa rnanfaat.

4. Masa Manfaat Yang Digunakan

- a. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/PMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s/d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s/d 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s/d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

- b. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum label masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kode Barang					Uraian	Tahun
1	8	01	01	01	001	Software Komputer	4
2	8	01	01	01	002	Lisensi	10
3	8	01	01	01	003	Franchise	5
4	8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
5	8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
6	8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	50
7	8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
12	8	01	01	01	014	Merk	10
13	8	01	01	01	015	Desain Industri	10
14	8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
15	8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	9	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	10	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Setahun	25

E. Metode Penilaian Persediaan

Terkait Kebijakan Akuntansi Persediaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, di dalam mencatat persediaan Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Dalam hal metode *First In First Out* (FIFO) mulai diterapkan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2024 ini dengan penjelasan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/PB.6/2021 tentang Penerapan Metode Penilaian Persediaan *First In First Out* (FIFO).

I. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh BKN.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Semester I Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebesar Rp4.200.148.759.954,00 (*Empat triliun dua ratus milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp4.102.233.159.014,00 (*Empat triliun seratus dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat belas rupiah*) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp138.846.170.456,00 (*Seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) nilai mutasi kurang sebesar Rp40.908.460.928,00 (*Empat puluh milyar sembilan ratus delapan juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 16 Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta (088.01.0100.017220)
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta (088.01.0400.017241)
3. Kantor Regional II BKN Surabaya (088.01.0500.450454)
4. Kantor Regional III BKN Bandung (088.01.0200.017237)
5. Kantor Regional IV BKN Makassar (088.01.1900.560635)
6. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta (088.01.0100.606254)

7. Kantor Regional VI BKN Medan (088.01.0700.606261)
8. Kantor Regional VII BKN Palembang (088.01.1100.622372)
9. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin (088.01.1500.622386)
10. Kantor Regional IX BKN Jayapura (088.01.2500.622390)
11. Kantor Regional X BKN Denpasar (088.01.2200.667882)
12. Kantor Regional XI BKN Manado (088.01.1751.667896)
13. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (088.01.0900.667901)
14. Kantor Regional XIII BKN Aceh (088.01.0600.667752)
15. Kantor Regional XIV BKN Manokari (088.01.3300.667652)
16. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (088.01.0200.020505)

Laporan BMN ini disusun menggunakan system aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca.
2. Laporan Barang Persediaan.
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan).
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
5. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB).
6. Laporan Barang Bersejarah.
7. Laporan Kondisi Barang.
8. Laporan Penyusutan.
9. Laporan Barang Rusak Berat.
10. Laporan Barang Hilang.
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAK-SIMAK pada Badan Kepegawaian Negara.
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN.

II. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2024

Nilai BMN per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp4.102.233.159.014,00 (*Empat triliun seratus dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat belas rupiah*), yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp4.096.885.052.107,00 (*Empat triliun sembilan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp5.348.106.907,00 (*Lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2024

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.095.120.866,00 (*Tujuh milyar sembilan puluh lima juta seratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 01 Januari 2024 Rp7.106.175.160,00 (*Tujuh milyar seratus enam juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp11.054.294,00 (*Sebelas juta lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.

Daftar Mutasi barang persediaan

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	6.722.383.660,00	(77.747.802,00)	6.644.635.858,00
117113	Bahan Pemeliharaan	383.791.500,00	66.693.508,00	450.485.008,00
JUMLAH		7.106.175.160,00	(11.054.294,00)	7.095.120.866,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang dari aplikasi Persediaan masing-masing satuan kerja adalah sebesar Rp262.931.190,00 (*Dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp262.931.190,00 (*Dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*)

a. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 seluas 585.438 m² sebesar Rp2.331.580.054.368,00 (*Dua triliun tiga ratus tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 570.438 m² sebesar Rp2.330.666.524.668,00 (*Dua triliun tiga ratus tiga puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*). Mutasi tambah seluas 15.460 m² dengan nilai sebesar Rp3.379.762.700,00 (*Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), mutasi kurang seluas 460 m² dengan nilai sebesar Rp2.466.233.000,00 (*Dua milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Hibah masuk	913.529.700	0,00	913.529.700,00
Reklasifikasi masuk	2.466.233.000,00	0,00	2.466.233.000,00
Jumlah	3.379.762.700,00	0,00	3.379.762.700,00

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi keluar	2.466.233.000,00	0,00	2.466.233.000,00
Jumlah	2.466.233.000,00	0,00	2.466.233.000,00

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	585.438	2.331.580.054.368,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m²/ Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh Badan Kepegawaian Negara yaitu:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	-	0,00
Tidak terdapat bukti kepemilikan	-	0,00
Dikuasai pihak lain	9.493,96	Rp109.664.231.000,00

Dengan penjelasan sebagai berikut

1. Kantor Pusat BKN Jakarta. Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat seluas 4.060 m² senilai Rp77.478.342.000,00.
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta dengan luas total 2.640 m² dikuasai pihak lain. Tanah dihuni pensiunan pegawai di lokasi sebagai berikut:
 - a. Kampung Sapen GK.I/445 seluas 619 m² senilai Rp3.037.866.000,00.
 - b. Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1.869 m² senilai Rp7.906.640.000,00.

Atas pemanfaatan BMN di kedua lokasi tersebut, masih belum ada kontribusi yang diterima oleh BKN. Pada Tahun 2021 telah ada persetujuan tarif sewa tanah

atas sebagian tanah pada Kanreg I BKN Yogyakarta sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Nomor: S-40/MK.6/WKN.09/KNL.06/2021 tanggal 5 Maret 2021, namun belum ada tindak lanjut dari BKN untuk melakukan pungutan sewa dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut. Para penyewa mengajukan keberatan atas tarif sewa dengan mengajukan keringanan tarif kepada BKN. Pengajuan keringanan tarif dilakukan pada bulan Maret 2023, dan masih dalam proses persetujuan di KPKNL.

Selain kedua tanah yang dikuasai pensiunan pegawai tersebut, terdapat juga tanah yang berlokasi di perumahan BKN telah dibangun oleh pihak ketiga berupa bangunan permanen yang dimanfaatkan sebagai Musholla di luar lingkungan BKN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rejowinangun, Kota Gede seluas 48 m² senilai Rp342.853.000,00
 - b. Sedangadi, Mlati, Sleman seluas 104 m² senilai Rp683.456.000,00
3. Kantor Regional II BKN Surabaya. Tanah milik BKN yang berlokasi di belakang kantor yaitu Desa Waru, Sidoarjo seluas 97,44 m² telah dibangun bangunan permanen dan difungsikan oleh pihak ketiga sebagai garasi mobil.

Selain itu, terdapat Tanah yang telah diterbitkan pelepasan hak atas tanahnya oleh Kementerian PUPR namun belum mengurangi luasan pada Sertifikat Tanah Kantor Regional II BKN Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan atas nama 7 orang, seluas 844,82 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor 7730047.
 - b. Surat Keputusan atas nama 6 orang, seluas 733,70 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor B 2511581.
4. Kantor Regional III BKN Bandung. Tanah milik BKN yang berlokasi di Muararajen Lama, Cihaurgeulis seluas 1.118 m² senilai Rp20.215.074.000,00 yang tidak dimanfaatkan oleh BKN, namun digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha oleh pihak ketiga.

Atas pemanfaatan BMN di lokasi tersebut, telah dilakukan pungutan sewa sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-192/MK.06/WKN.08/KNL01/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Kepegawaian Negara RI c.q. Kantor Regional III BKN. Pada tahun 2022, terjadi penyesuaian tarif sewa dan pergantian lima orang penyewa berdasarkan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-252/MK.6/KNL.0801/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, namun BKN belum dapat melakukan pungutan sewa dengan tarif baru tersebut dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut.

Atas permintaan penyesuaian tarif tersebut, melalui Surat KPKNL Bandung Nomor S-229/MK.6/KNL.0801/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, permintaan penyesuaian tarif oleh penyewa telah disesuaikan dengan nilai yang sewa baru namun tarif tersebut masih belum dapat disetujui para penyewa sehingga mengajukan keberatan kembali kepada BKN pada tanggal 2 Maret 2024 dan masih dalam proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan tarif sewa yang baru

Dari aset tanah BKN seluas 585.438 m², terdapat tanah yang belum bersertifikat yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN Jakarta sebanyak 2 bidang tanah yang berlokasi di:
 - a. Perumahan Citra Gran Blok Q Nomor 5, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan luas tanah 92 m² senilai Rp1.021.623.000,00.
 - b. Jalan Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah 244 m² senilai Rp9.385.290.000,00.
2. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebanyak 1 bidang tanah yang berlokasi di Jl. Nasional Poros Bulungan-Malinau Desa Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dengan luas tanah 15.000 m² senilai Rp913.529.700,00
3. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebanyak 2 bidang tanah yang berlokasi di Jalan Adinegoro Padang, Ganting, Koto Tangah, Kota Padang dengan luas tanah 2.000 m² senilai Rp400.000.000,00

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sorong menghibahkan Tanah untuk Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang berlokasi di Aimas-Kab Sorong dengan luas 30.000 m² dengan nilai Rp4.624.710.000,00 (*Empat milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor: 34/A/KS/IX/2020 tanggal 24 September 2020 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara disertai dengan penyerahan Sertifikat Tanah sebanyak dua sertifikat rincian 1 (satu) sertifikat seluas 20.000 m² dengan No. 33.02.06.01.4.00033 dan 1 (satu) sertifikat seluas 10.000 m² dengan No.33.02.06.01.4.00034 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 79.425 unit sebesar Rp780.095.118.725,00 (*Tujuh ratus delapan puluh milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 79.341 unit sebesar Rp709.687.406.999,00 (*tujuh ratus sembilan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sejumlah 1.975 unit sebesar Rp100.182.685.755,00 (*Seratus milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 1.891 unit sebesar Rp29.774.974.029,00 (*Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

c.1. Alat Besar (3.01);

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 241 unit sebesar Rp38.568.759.621,00 (*Tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sejumlah 234 unit sebesar Rp39.080.792.221,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) mutasi tambah 8 unit dengan nilai sebesar Rp29.447.400,00 (*Dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) dan mutasi kurang 1 unit dengan nilai sebesar Rp541.480.000,00 (*Lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	25.752.000,00	3.695.400,00	29.447.400,00
Jumlah	25.752.000,00	3.695.400,00	29.447.400,00

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	541.480.000,00	0,00	541.480.000,00
Jumlah	541.480.000,00	0,00	541.480.000,00

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	233	38.027.279.621,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	1	541.480.000,00

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit dengan nilai sebesar Rp541.480.000,00 (*Lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).

c.2. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 338 unit sebesar Rp40.712.847.130,00 (*Empat puluh milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total sejumlah

337 unit sebesar Rp40.918.926.500,00 (*Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 2 unit alat angkutan darat bermotor dengan nilai sebesar Rp1.529.830,00 (*Satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 1 unit alat angkutan darat bermotor dengan nilai sebesar Rp207.609.200,00 (*Dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan ribu dua ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	1.529.830,00	1.529.830,00
Jumlah	-	1.529.830,00	1.529.830,00

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset dari Penggunaan	207.609.200,00	0,00	207.609.200,00
Jumlah	207.609.200,00	0,00	207.609.200,00

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	336	40.363.947.130,00
Rusak Ringan	2	348.900.000,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit/unit dengan nilai sebesar Rp207.609.200,00 (*Dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan ribu dua ratus rupiah*).

c.3. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 110 unit sebesar Rp6.318.305.632,00 (*Enam milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 102 unit sebesar Rp6.305.939.012,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 8 unit dengan nilai sebesar Rp12.366.620,00 (*Dua belas juta tiga ratus enam puluh*

enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	7.270.500,00	5.096.120,00	12.366.620,00
Jumlah	7.270.500,00	5.096.120,00	12.366.620,00

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	110	6.318.305.632,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional adalah Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.4. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 7 unit sebesar Rp49.597.200,00 (*Empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 6 unit sebesar Rp49.107.300,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp489.900,00 (*Empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	489.900,00	489.900,00
Jumlah	-	489.900,00	489.900,00

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Dari jumlah Alat Pertanian diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pertanian diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7	49.597.200,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.5. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 53.865 unit sebesar Rp235.133.507.167,00 (*Dua ratus tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 53.884 unit sebesar Rp234.208.950.008,00 (*dua ratus tiga puluh empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 665 unit dengan nilai sebesar Rp7.216.551.671,00 (*Tujuh milyar dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 684 unit dengan nilai sebesar Rp6.291.994.512,00 (*Enam milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	4.041.113.836,00	125.320.333,00	4.166.434.169,00
Transfer Masuk	3.048.138.500,00	0,00	3.048.138.500,00
Reklasifikasi masuk	-	1.979.002,00	1.979.002,00
Jumlah	7.089.252.336,00	127.299.335,00	7.216.551.671,00

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	3.048.138.500,00	0,00	3.048.138.500,00
Reklasifikasi keluar	0,00	1.979.002,00	1.979.002,00
Koreksi pencatatan	263.300.000,00	0,00	263.300.000,00
Penghentian aset dari penggunaan	2.950.821.028,00	27.755.982,00	2.978.577.010,00
Jumlah	6.262.259.528,00	29.734.984,00	6.291.994.512,00

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	53.157	232.907.617.388,00
Rusak Ringan	129	178.582.909,00
Rusak Berat	579	2.047.306.870,00

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 587 unit/unit sebesar Rp2.978.577.010,00 (*Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sepuluh rupiah*).

c.6. Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 2,598 unit sebesar Rp47.117.481.836,00 (*Empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas Saldo awal total jumlah barang sebesar 2,539 unit sebesar Rp47.419.631.239,00 (*Empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 171 unit dengan nilai sebesar Rp364.379.149,00 (*Tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 112 unit dengan nilai sebesar Rp666.528.552,00 (*Enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	285.739.209,00	18.566.800,00	304.306.009,00
Transfer Masuk	-	57.657.740,00	57.657.740,00
Reklasifikasi Masuk	1.576.400,00	839.000,00	2.415.400,00
Jumlah	287.315.609,00	77.063.540,00	364.379.149,00

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	-	57.657.740,00	57.657.740,00
Penghentiaan Aset dari Penggunaan	608.870.812,00	-	608.870.812,00
Jumlah	608.870.812,00	57.657.740,00	666.528.552,00

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2.497	44,534,481,317.00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	42	2.583.000.519,00

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sejumlah 24 unit senilai Rp608.870.812,00 (*Enam ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah*).

c.7. Alat Kedokteran dan Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 456 unit sebesar Rp1.084.746.799,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 459 unit sebesar Rp1.097.012.299,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp943.500,00 (*Sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 4 unit dengan nilai sebesar Rp13.209.000,00 (*Tiga belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	943.500,00	943.500,00
Jumlah	-	943.500,00	943.500,00

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	13.209.000,00	-	13.209.000,00
Jumlah	13.209.000,00	-	13.209.000,00

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	452	1.091.096.299,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	4	1,071,537,799.00

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 4 unit sebesar Rp13.209.000,00 (*Tiga belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah*).

c.8. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 145 unit sebesar Rp5.540.740.517,00 (*Lima milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 147 unit sebesar Rp5.915.576.464,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp374.835.947,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	374.835.947,00	-	374.835.947,00
Jumlah	374.835.947,00	-	374.835.947,00

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	139	4.559.218.676,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	6	981.521.841,00

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 2 unit dengan nilai sebesar Rp374.835.947,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*).

c.9. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 11 unit sebesar Rp6.400.000,00 (*Enam juta empat ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang 9 unit sebesar Rp6.339.000,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 4 unit dengan nilai sebesar Rp2.476.400,00 (*Dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp2.415.400,00 (*Dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	1.576.400,00	900.000,00	2.476.400,00
Jumlah	1.576.400,00	900.000,00	2.476.400,00

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	1.576.400,00	839.000,00	2.415.400,00
Jumlah	1.576.400,00	839.000,00	2.415.400,00

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	11	6.400.000,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.10. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 21.517 unit sebesar Rp402.767.579.309,00 (*Empat ratus dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 21.497 unit sebesar Rp331.973.928.442,00 (*tiga ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 1.105 unit dengan nilai sebesar Rp92.470.552.285,00 (*Sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 1.085 unit dengan nilai sebesar Rp21.676.901.418,00 (*Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan belas rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	74.760.755.755,00	18.902.180,00	74.779.657.935,00
Transfer Masuk	10.574.515.000,00	80.255.775,00	10.654.770.775,00
Perolehan Lainnya	12.411.600,00	0,00	12.411.600,00
Batal Transfer Keluar	4.849.800.000,00	0,00	4.849.800.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	97.788.975,00	0,00	97.788.975,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2.076.123.000,00	0,00	2.076.123.000,00
Jumlah	92.371.394.330,00	99.157.955,00	92.470.552.285,00

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Susulan	96.236.975,00	-	96.236.975,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	12.411.600,00	-	12.411.600,00
Transfer Keluar	15.424.315.000,00	80.255.775,00	15.504.570.775,00
Koreksi Pencatatan	1.980.950.000,00	-	1.980.950.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	4.082.732.068,00	-	4.082.732.068,00
Jumlah	21.596.645.643,00	80.255.775,00	21.676.901.418,00

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar

Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	21.217	386.094.431.072,00
Rusak Ringan	2	23.279.550,00
Rusak Berat	298	16.649.868.687,00

Kelompok barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 248 unit sebesar Rp4.082.732.068,00 (*Empat milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah*).

c.11. Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 6 unit sebesar Rp64.269.000,00 (*Enam puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 6 unit sebesar Rp64.269.000,00 (*Enam puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	64.269.000,00	-	64.269.000,00
Jumlah	64.269.000,00	-	64.269.000,00

Mutasi Kurang Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6	64.269.000,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.12. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 74 unit sebesar Rp2.391.681.414,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 74 unit sebesar Rp2.391.681.414,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	74	2.391.681.414,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.13. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 17 unit sebesar Rp59.199.600,00 (*Lima*

puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 15 unit sebesar Rp58.719.600,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp480.000,00 (*Empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	0,00	480.000,00	480.000,00
Jumlah	0,00	480.000,00	480.000,00

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	17	59.199.600,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit senilai Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.14. Rambu – Rambu (3.18)

Saldo Rambu - Rambu pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 30 unit sebesar Rp157.150.900,00 (*seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas Saldo awal total jumlah barang sebanyak 30 unit sebesar Rp157.150.900,00 (*seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah*). mutasi tambah jumlah barang barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	30	157.150.900,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Rambu - Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.15. Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 10 unit sebesar Rp122.852.600,00 (*Seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 8 unit sebesar Rp103.652.600,00 (*Seratus tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 2 unit sebesar Rp19.200.000,00 (*Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	19.200.000,00	-	19.200.000,00
Jumlah	19.200.000,00	-	19.200.000,00

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	10	122.852.600,00
Rusak Ringan	0,00	0,00
Rusak Berat	0,00	0,00

Kelompok barang Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.16. Akumulasi Penyusutan

Tabel 3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

KODE	URAIAN	PENYUSUTAN		
		INTRAKOMPTABLE (Rp)	EKSTRAKOMPTABLE (Rp)	GABUNGAN (Rp)
30101	ALAT BESAR DARAT	-	-	-
30103	ALAT BANTU	30.201.053.848,00	6.263.499,00	30.207.317.347,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	31.969.497.314,00		31.969.497.314,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	212.561.720,00	10.159.093,00	222.720.813,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	5.702.052.670,00	508.898,00	5.702.561.568,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	116.297.990,00	4.420.060,00	120.718.050,00
30303	ALAT UKUR	67.112.400,00	2.719.980,00	69.832.380,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	49.107.300,00	61.238,00	49.168.538,00
30501	ALAT KANTOR	78.615.532.645,00	70.645.793,00	78.686.178.438,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	133.081.680.000,00	1.851.679.874,00	134.933.359.874,00
30601	ALAT STUDIO	27.072.314.829,00	76.783.790,00	27.149.098.619,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	4.930.794.208,00	84.442.292,00	5.015.236.500,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	1.177.995.555,00		1.177.995.555,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	847.819.722,00	16.140.300,00	863.960.022,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	81.703.963,00	1.973.400,00	83.677.363,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	5.186.763.802,00	3.645.252,00	5.190.409.054,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4.964.400,00	1.022.500,00	5.986.900,00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	40.637.130,00		40.637.130,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI	1.071.000,00	1.022.500,00	2.093.500,00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1.500.000,00	1.135.000,00	2.635.000,00
31001	KOMPUTER UNIT	101.173.580.148,00		101.173.580.148,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	167.231.505.907,00	574.504.189,00	167.806.010.096,00
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2.142.300,00		2.142.300,00
31503	ALAT SAR	2.169.719.500,00	2.918.150,00	2.172.637.650,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	52.895.574,00		52.895.574,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	42.623.675,00	545.438,00	43.169.113,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	140.868.574,00	12.993.408,00	153.861.982,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	89.958.000,00	447.300,00	90.405.300,00
	JUMLAH	590.263.754.174,00	2.724.031.954,00	592.743.518.846,00

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah adalah sejumlah 501 unit sebesar Rp870.574.212.668,00 (*Delapan ratus tujuh puluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 499 unit sebesar Rp868.873.680.270,00 (*delapan ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), mutasi tambah 4 unit sebesar Rp3.801.870.998,00 (*Tiga milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan mutasi kurang 2 unit sebesar Rp2.101.338.600,00 (*Dua milyar seratus satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

d.1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah adalah sebanyak 468 unit sebesar Rp855.142.698.438,00 (*Delapan ratus lima puluh lima milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 466 unit sebesar Rp853.442.166.040,00 (*Delapan ratus lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu empat puluh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 4 unit sebesar Rp3.801.870.998,00 (*Tiga milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan mutasi kurang 2 unit sebesar Rp2.101.338.600,00 (*Dua milyar seratus satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	993.242.600,00	-	993.242.600,00
Reklasifikasi Masuk	124.086.000,00	-	124.086.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	99.052.914,00	-	99.052.914,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	485.361.103,00	-	485.361.103,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	953.244.600,00	-	953.244.600,00
Pengembangan Melalui KDP	1.146.883.781,00	-	1.146.883.781,00
Jumlah	3.801.870.998,00	-	3.801.870.998,00

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Susulan	1.007.689.600,00		1.007.689.600,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	16.318.400,00		16.318.400,00
Reklasifikasi Keluar	124.086.000,00		124.086.000,00
Koreksi Pencatatan	953.244.600,00		953.244.600,00
Jumlah	2.101.338.600,00	-	2.101.338.600,00

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	432	848,105,742,438.00
Rusak Ringan	10	5.067.193.000,00
Rusak Berat	26	1.969.763.000,00

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.2. Monumen (4.02)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah adalah sebanyak 5 unit sebesar Rp51.419.000,00 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 5 unit sebesar Rp51.419.000,00 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Mutasi Kurang Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Dari jumlah Monumen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Monumen di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	51.419.000,00
Rusak Ringan	0,00	0,00
Rusak Berat	0,00	0,00

Kelompok barang Monumen yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.3. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 28 unit sebesar Rp15.380.095.230,00 (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 28 unit sebesar Rp15.380.095.230,00 (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	28	15.380.095.230,00
Rusak Ringan	0,00	0,00
Rusak Berat	0,00	0,00

Kelompok barang Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan		
		intrakomptable	ekstrakomptable	gabungan
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	156.486.557.898,00	739.252,00	156.487.297.150,00
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.021.525.506,00	-	20.021.525.506,00
4.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	6.509.854,00	1.206.000,00	7.715.854,00
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	2.534.263.437,00	-	2.534.263.437,00
	Jumlah	179.048.856.695,00	1.945.252,00	179.050.801.947,00

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah adalah sebanyak 58.830 m² sebesar Rp24.716.999.940,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 58.830 m² sebesar Rp24.716.999.940,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*), mutasi tambah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

e.1. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah adalah sejumlah 58.771 m² sebesar Rp16.468.966.800,00 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 58.771 m² sebesar Rp16.468.966.800,00 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol*

rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	58.771	16.468.966.800,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m² sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.2. Irigasi (5.02)

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 27 unit sebesar Rp2.980.446.163,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 27 unit sebesar Rp2.980.446.163,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*)

Mutasi Tambah Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	26	2.934.621.163,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	45.825.000,00

Kelompok barang irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.3. Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah adalah sejumlah 13 unit dengan nilai sebesar Rp3.070.226.260,00 (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp3.070.226.260,00 (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	13	3.070.226.260,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok Instalasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.4. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah adalah sejumlah 19 unit sebesar Rp2.197.360.717,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 19 unit sebesar Rp2.197.360.717,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	19	2.197.360.717,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Tabel 5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

	JALAN DAN JEMBATAN	16.053.832.888,00
5.01.01	Jalan	16.053.445.200,00
5.01.02	Jembatan	387.688,00
	IRIGASI	843.416.697,00
5.02.01	Bangunan Air Irigasi	35.417.302,00
5.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	27.052.788,00
5.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	16.428.500,00
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	576.058.765,00
5.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	107.328.735,00
5.02.07	Bangunan Air Kotor	81.130.607,00
	JARINGAN	2.383.456.538,00
5.03.01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	209.137.040,00
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	280.422.084,00
5.03.10	Instalasi Lain	951.173.820,00
5.04.01	Jaringan Air Minum	62.304.416,00
5.04.02	Jaringan Listrik	832.712.964,00
5.04.03	Jaringan Telepon	47.706.214,00
	JUMLAH	19.280.706.123,00

f. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 24 unit sebesar Rp11.626.062.154,00 (*Sebelas milyar enam ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak sebanyak 25 unit sebesar Rp12.060.376.974,00 (*dua belas milyar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). dan mutasi kurang sebanyak 1 unit sebesar Rp434.314.820,00 (*Empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi per bidang barang adalah sebagai berikut:

f.1. Peralatan dan Mesin dalam Renovasi (6.07)

Saldo Peralatan dan Mesin dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 1 unit sebesar Rp3.998.500,00 (*tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 1 unit sebesar Rp3.998.500,00 (*tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah mutasi tambah sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Peralatan dan Mesin dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan dan Mesin dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	3.998.500,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Peralatan dan Mesin dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

f.2. Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (6.07)

Saldo Gedung dan Bangunan dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 22 unit sebesar Rp11.541.825.254,00 (*Sebelas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 23 unit sebesar Rp11.976.140.074,00 (*sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu tujuh puluh empat rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 1 unit sebesar Rp434.314.820,00 (*Empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Hibah Keluar	434.314.820,00	-	434.314.820,00
Jumlah	434.314.820,00	-	434.314.820,00

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	22	11.541.825.254,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Gedung dan Bangunan dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

f.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi (6.03)

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 1 unit sebesar Rp80.238.400,00 (*delapan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 1 unit sebesar Rp80.238.400,00 (*delapan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah mutasi tambah sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	80.238.400,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

f.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Tabel 6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.07.02	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	-
6.07.03	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	583.982.495,00
6.07.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	-
6.07.05	Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi	-
	Jumlah	583.982.495,00

g. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 sejumlah 9.735 unit sebesar Rp1.663.855.403,00 (*Satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 12.138 unit sebesar Rp1.849.014.625,00 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 3.994 unit sebesar Rp218.118.979,00 (*Dua ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 6.397 unit sebesar Rp403.278.201,00 (*Empat ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

g.1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 9.208 sebesar Rp1.463.066.803,00 (*Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 11.615 sebesar Rp1.649.891.025,00 (*Satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 3.990 unit dengan nilai sebesar Rp216.453.979,00 (*Dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 6.397 unit sebesar Rp403.278.201,00 (*Empat ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Masuk	216.453.979	-	216.453.979,00
Jumlah	216.453.979,00	-	216.453.979,00

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	186.824.222	-	186.824.222,00
Reklasifikasi Keluar	216.453.979	-	216.453.979,00
Jumlah	403.278.201,00	-	403.278.201,00

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	8.998	1.449.435.803,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	210	13.631.000,00

Kelompok Bahan Perpustakaan Tercetak yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 2.407 unit sebesar Rp186.824.222,00 (*Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).

g.2. Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga (6.02);

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 31 unit sebesar Rp164.719.100,00 (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu*

seratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah sejumlah 31 unit sebesar Rp164.719.100,00 (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	-	-
Reklasifikasi Masuk	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	31	164.719.100,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

g.3. Tanaman (6.05);

Saldo Tanaman pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 496 unit sebesar Rp36.069.500,00 (*Tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah sejumlah 492 unit sebesar Rp34.404.500,00 (*Tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah 4 unit sebesar Rp1.665.000,00 (*Satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	1.665.000	1.665.000
Jumlah	-	1.665.000,00	1.665.000,00

Mutasi Kurang Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Tanaman di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Tanaman di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	496	36.069.500,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

g.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.01.01	Bahan Perpustakaan	0,00
6.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	0,00
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	49.119.550,00
6.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	0,00
6.05.01	Tanaman	0,00
	JUMLAH	49.119.550,00

h. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 9.099.203.348,00 (*Sembilan milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp168.877.064,00 (*Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 10.077.210.065,00 (*Sepuluh milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu enam puluh lima rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp 1.146.883.781,00 (*Satu milyar seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Perolehan/Penambahan KDP	211.713.909,00
Pengembangan KDP	8.857.806.556,00
Koreksi Nilai KDP Bertambah	953.244.600,00
Perolehan Lainnya KDP	54.445.000,00
Jumlah	10.022.765.065,00

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	1.146.883.781,00
Jumlah	1.146.883.781,00

i. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp163.698.132.482,00 (*Seratus enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp147.104.103.314,00 (*Seratus empat puluh tujuh milyar seratus empat juta seratus tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp21.186.521.959,00 (*Dua puluh satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp4.592.492.791,00 (*Empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*).

i.1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

i.2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 211 unit sebesar Rp135.615.931.787,00 (*Seratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 213 unit sebesar Rp125.741.319.487,00 (*seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 6 unit sebesar Rp11.033.498.000,00 (*Sebelas milyar tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 8 unit dengan nilai sebesar Rp1.158.885.700,00 (*Satu milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per bidang barang adalah sebagai berikut:

i.2.1 Hak Cipta

Saldo Hak Cipta pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 1 unit sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit sebesar Rp500.000,00

(*lima ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Dari jumlah Hak Cipta di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Hak Cipta yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

i.2.2 Software

Saldo Software pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 209 unit sebesar Rp135.420.431.787,00 (*Seratus tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 211 unit sebesar Rp125.545.819.487,00 (*seratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 6 unit sebesar Rp11.033.498.000,00 (*Sebelas milyar tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 8 unit dengan nilai sebesar Rp1.158.885.700,00 (*Satu milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	10.723.050.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	16.550.000,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	293.898.000,00
Jumlah	11.033.498.000,00

Mutasi Kurang Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	1.158.885.700,00
Jumlah	1.158.885.700,00

Dari jumlah Software di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 8 unit dengan nilai sebesar Rp1.158.885.700,00 (*Satu milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).

i.2.3 Hasil Kajian Penelitian

Saldo Hasil Kajian Penelitian pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 1 unit sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Dari jumlah Hasil Kajian Penelitian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Hasil Kajian Penelitian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

i.3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 1.012 unit sebesar Rp28.082.200.695,00 (*dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh*

rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 216 unit sebesar Rp21.362.783.827,00 (*dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 3.282 unit/unit dengan nilai sebesar Rp10.153.023.959,00 (*Sepuluh milyar seratus lima puluh tiga juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 2.486 unit/unit dengan nilai sebesar Rp3.433.607.091,00 (*Tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah*).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	10.125.267.977,00	27.755.982,00	10.153.023.959,00
Jumlah	10.125.267.977,00	27.755.982,00	10.153.023.959,00

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	293.898.000,00	-	293.898.000,00
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	3.137.309.091,00	2.400.000,00	3.139.709.091,00
Jumlah	3.431.207.091,00	2.400.000,00	3.433.607.091,00

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Peralatan dan Mesin	21.790.628.338,00	25.355.982,00	21.815.984.320,00
Gedung dan Bangunan	144.174.000,00	-	144.174.000,00
Aset Tetap Lainnya	13.631.000,00	-	13.631.000,00
Aset Tak Berwujud	6.108.411.375,00	-	6.108.411.375,00
Jumlah	28.056.844.713,00	25.355.982,00	28.082.200.695,00

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah adalah:

Tabel 9. Akumulasi Penyusutan BMN yang telah dihentikan penggunaanya

Kode	Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
30103	ALAT BANTU	541.480.000,00	0,00	541.480.000,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0,00	0,00	0,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0,00	0,00	0,00
30303	ALAT UKUR	0,00	0,00	0,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	0,00	0,00	0,00
30501	ALAT KANTOR	721.833.286	0,00	721.833.286,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1.186.177.252	22.304.286,00	1.208.481.538,00
30601	ALAT STUDIO	1.536.038.409	0,00	1.536.038.409,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	557.654.610	0,00	557.654.610,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	11.750.400,00	0,00	11.750.400,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	811.021.841,00	0,00	811.021.841,00
31001	KOMPUTER UNIT	3.456.388.169	0,00	3.456.388.169,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	12.943.658.209	0,00	12.943.658.209,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	32.410.364	0,00	32.410.364,00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0,00	0,00	0,00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0,00	0,00	0,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	5.918.211.375,00	0,00	5.918.211.375,00
Total		27.716.623.915,00	22.304.286,00	27.738.928.201,00

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024

a. Barang Milik Negara per Akun Neraca

Nilai BMN Intrakomptabel pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.200.148.759.954,00 (*Empat triliun dua ratus milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut

Tabel 10. Penyajian nilai BMN dalam Neraca

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	ASET LANCAR						
1	Persediaan	7.095.120.866,00	0,17	-	0,00	7.095.120.866,00	0,17
	Sub Jumlah (1)	7.095.120.866,00	0,17	-	0,00	7.095.120.866,00	0,17
II	ASET TETAP						
1	Tanah	2.331.580.054.368,00	55,58	-	0,00	2.331.580.054.368,00	55,51
2	Peralatan Mesin	774.657.579.537,00	18,47	5.437.539.188	98,45	780.095.118.725,00	18,57
3	Gedung & Bangunan	870.549.881.368,00	20,75	24.331.300	0,44	870.574.212.668,00	20,73
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.716.999.940,00	0,59	-	0,00	24.716.999.940,00	0,59
5	Aset Tetap Lainnya	1.627.785.903,00	0,04	36.069.500	0,00	1.663.855.403,00	0,04
6	ATR	11.626.062.154,00	0,28	-	0,00	11.626.062.154,00	0,28
7	KDP	9.099.203.348,00	0,22	-	0,00	9.099.203.348,00	0,22
	Sub Jumlah (2)	4.023.857.566.618,00	95,93	5.497.939.988,00	99,54	4.029.355.506.606,00	95,93
III	ASET LAINNYA						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Aset Tak Berwujud	135.615.931.787,00	3,23	-	0,00	135.615.931.787,00	3,23
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	28.056.844.713,00	0,67	25.355.982,00	0,46	28.082.200.695,00	0,67
	Sub Jumlah (3)	163.672.776.500,00	3,90	25.355.982,00	0,46	163.698.132.482,00	3,90
	TOTAL	4.194.625.463.984,00	100	5.523.295.970,00	100,00	4.200.148.759.954,00	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Penyajian nilai Penyusutan BMN dalam Neraca

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
ASET TETAP						
Peralatan Mesin	590.263.754.174,00	62,65	2.723.009.454,00	99,12	592.986.763.628,00	62,75
Gedung & Bangunan	179.048.856.695,00	19,00	1.945.252,00	0,07	179.050.801.947,00	18,95
Jalan, dan Jembatan	16.053.832.888,00	1,70	-	0,00	16.053.832.888,00	1,70
Irigasi	843.416.697,00	0,09	-	0,00	843.416.697,00	0,09
Jaringan	2.383.456.538,00	0,25	-	0,00	2.383.456.538,00	0,25
Aset Tetap dlm Renov.(ATR)	583.982.495,00	0,06	-	0,00	583.982.495,00	0,06
Aset Tetap Lainnya	49.119.550,00	0,01	-	0,00	49.119.550,00	0,01
Sub Jumlah (1)	789.226.419.037,00	83,76	2.724.954.706,00	99,19	791.951.373.743,00	83,81
ASET LAINNYA						
Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Aset Tak Berwujud (ATB)	125.292.442.425,00	13,30	-	0,00	125.292.442.425,00	13,26
Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional	21.798.412.540,00	2,31	22.304.286,00	0,81	21.820.716.826,00	2,31
ATB yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	5.918.211.375,00	0,63	-	0,00	5.918.211.375,00	0,63
Sub Jumlah (2)	153.009.066.340,00	16,24	22.304.286,00	0,81	153.031.370.626,00	16,19
TOTAL	942.235.485.377,00	100,00	2.747.258.992,00	100,00	944.982.744.369,00	100,00

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan nilai BMN Laporan Barang dan Laporan Keuangan

No.	Golongan Barang	Laporan Barang (Rp)	Laporan Keuangan (Rp)	Selisih
1	Persediaan	7.095.120.866,00	7.095.120.866,00	-
2	Tanah	2.331.580.054.368,00	2.331.580.054.368,00	-
3	Peralatan Mesin	774.657.579.537,00	774.657.579.537,00	-
4	Gedung & Bangunan	870.549.881.368,00	870.549.881.368,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.716.999.940,00	24.716.999.940,00	-
6	Aset Tetap dlm Renov (ATR)	11.626.062.154,00	11.626.062.154,00	-
7	Aset Tetap Lainnya	1.627.785.903,00	1.627.785.903,00	-
8	KDP	168.877.064,00	168.877.064,00	-
9	Aset Tak Berwujud	135.615.931.787,00	135.615.931.787,00	-
10	Aset Lain-lain *)	28.056.844.713,00	28.056.844.713,00	-
	TOTAL	4.194.625.463.984,00	4.194.625.463.984,00	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

II. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	31 Desember 2019	4.187.534.481.904,00	55.329.874.792,00	1,34
2	31 Desember 2020	3.950.769.706.634,00	(236.764.775.270,00)	(5,65)
3	31 Desember 2021	4.014.796.075.085,00	64.026.368.451,00	1,62
4	31 Desember 2022	4.034.613.674.636,00	19.817.599.551,00	0,49
5	31 Desember 2023	4.102.233.159.014,00	67.619.484.378,00	0,02

2. Informasi Pengelola BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Golongan Barang	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah (m ²)	2.325.324.644.668	6.255.409.700,00
2	Peralatan dan Mesin	701.837.577.546	78.257.541.179,00
3	Gedung dan Bangunan	868.203.520.163,00	2.370.692.505,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.700.571.440,00	16.428.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.460.759.741	203.095.662
6	Aset Tak Berwujud	131.001.293.162,00	10.723.050.000,00
TOTAL		4.052.528.366.720,00	97.826.217.546,00

b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	4	2	3	-	9
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/ Kuasa Pengguna	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	6	2	9	-	17
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	10	2	12	-	24
8	Selesai serah terima	-	-	12	-	12
9	Gagal/Batal Proses	-	-	-	-	-

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI

c. Pengelolaan BMN *Idle*

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

3. BMN dari dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum dan informasi penyusutan satuan kerja Badan Layanan Umum, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

No	SATUAN KERJA	Intrakomptabel (Neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				
Total				

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.070.079.128,00 (*Satu milyar tujuh puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.070.079.128,00	0,00
Total		1.070.079.128,00	0,00

b. Daftar barang hilang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku
1			
Total			

7. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1			0,00
Total			

8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kanreg VII BKN Palembang	1.070.079.128,00	0,00
Total		1.070.079.128,00	0,00

9. BMN Berupa BPYBDS

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai (Rp)
1		
2		
Total		

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan serta langkah-langkah strategis yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN antara lain:

1. Aset berupa gedung dan bangunan masih terdapat permasalahan pada Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Melalui Surat Nomor 149/1/KR/III/1/2017 tanggal 9 Februari 2017, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara telah

membuat surat permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala BKN. Selain surat tersebut, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara juga mengajukan surat kepada Menteri Keuangan dengan Nomor K26-30/V21-10/06 tanggal 9 Februari 2017 permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Berdasar informasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, Tanah seluas 7.849,5 m² yang berlokasi di Jl. Surapati No. 10 merupakan tanah negara bekas tanah Rech van Eigendom No.11582 dengan surat hak tanah nomor 257 tgl. 15 April 1950 dan bekas tanah Rech van Eigendom No.11577 dengan surat hak tanah nomor 273 tgl. 20 April 1950. Selain diklaim oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan dasar naskah serah terima aset-aset eks Dana Pensiun Indonesia tanah tersebut juga diklaim oleh Pemerintah Kota Bandung dengan dasar kepemilikan bukti jual beli tanah.

Berdasarkan penuturan dari KPKNL Bandung, terdapat dua pengajuan atas permintaan sertifikat tanah yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui surat nomor 408/1/1992 tanggal 27 Agustus 1992, yang diajukan oleh Kepala Kantor Regional III BKN dan melalui surat Nomor S-1310/A.954/0896 tanggal 15 Agustus 1996, yang diajukan oleh Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran Departemen Keuangan. Sampai saat ini tanah tersebut masih dalam proses penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga dari pihak Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, pihak Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat, maupun pihak Kantor Regional III BKN belum ada satu pun yang memiliki sertifikat tanah tersebut.

11. Langkah-langkah strategis sebagai alternatif penyelesaian adalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Badan Kepegawaian Negara, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DJKN dan KPKNL sebagai pembina Penatausahaan BMN ;
- b. Melakukan sosialisasi peraturan penatausahaan BMN kepada satker-satker dan stakeholder terkait;
- c. Melakukan penatausahaan pengelolaan BMN lebih cermat dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

III. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- I. *“Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara/ Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.”*
- II. *“Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”*

Dalam rangka mewujudkan Penyajian BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset tetap :

- a. tanah,
- b. gedung dan bangunan.
- c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi :
 - 1) jalan dan jembatan.
 - 2) bangunan air.

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan Kodifikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2023

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023, terdapat temuan terkait Penatausahaan Persediaan dan Pengelolaan Aset tetap. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2023

Pada Badan Kepegawaian Negara
Per 30 Juni 2024

NO	URAIAN TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Pengelolaan aset tetap berupa tanah pada Kanreg II BKN Surabaya belum memadai dan terdapat kekurangan pembayaran tanah yang dilepas sebesar Rp4.738.507,83	Tahun 2022: <ul style="list-style-type: none">- S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II Tahun 2023: <ul style="list-style-type: none">- Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut- Surat ke Warga untuk merenovasi Pagar Rumah- Pemecahan sertifikat [belum]- Penertiban lahan [belum]
2	Terdapat Kelebihan Pembayaran Enam Paket Pekerjaan Belanja Barang sebesar Rp34.777.156	Semester I 2023: <ul style="list-style-type: none">- Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN- Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum memerintahkan PPK Biro Umum Semester I 2024: <ul style="list-style-type: none">- Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum- Tanda Terima PPK Biro Umum

3	Terdapat Indikasi Kemahalan Harga 14 Paket Pekerjaan pada Kantor Pusat BKN Sebesar Rp174.898.775	<p>Semester I 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum dan Dir. PPU <p>Semester I 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum dan PPK Dit. PPU - Tanda Terima PPK Dit PPU - Tanda Terima PPK Biro Umum
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal pada Dua Unit Kerja Belum Memadai.	<p>Semester I 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional III BKN Bandung) - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum dan Kakanreg Bandung <p>Semester I 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Kakanreg III BKN Bandung ke Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Surat Perintah KPA Kanreg III BKN Bandung ke PPK - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum - Tanda Terima PPK Biro Umum

		<ul style="list-style-type: none"> - Bukti perbaikan oleh PPK Kanreg III BKN Bandung yang menunjukkan penyusunan pengadaan melaksanakan tahap survei harga
5	Dua Paket Pekerjaan pada Biro Umum Dilaksanakan Mendahului Kontrak.	<p>Semester I 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum <p>Semester I 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum dan Pejabat Pengadaan Biro Umum - Tanda Terima PPK Biro Umum
6	Terdapat Indikasi Kemahalan Pengadaan Paket Router pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi.	<p>Semester I 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Pusat PPSS <p>Semester I 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK PPSS <p>Semester I 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Pusat PPSS <p>Semester I 2024:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Notulen bukti oleh PPK PPSS bahwa telah melaporkan ke LKPP - Surat Kepala BKN ke LKPP (barang discontinue) [belum]
7	<p>Penatausahaan Persediaan Pada BKN Belum Sepenuhnya Tertib.</p>	<p>Semester I 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama - Surat Perintah Sesma ke Kepala Biro Umum <p>Semester I 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - POS Pengelolaan Persediaan - Sosialisasi pengelolaan persediaan (ND Pendistribusian SOP) <p>Semester I 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Kantor Regional III BKN Bandung - Surat Perintah Sesma ke Kakanreg Bandung <p>Semester I 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Kakanreg III BKN Bandung ke Pengelola Barang Persediaan - Bukti Diklat yang Diikuti Penanggung Jawab Persediaan Obat <p>Semester I 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kepala Kantor Regional III BKN Bandung, dan Kepala Kantor

		<p>Regional IV BKN Makassar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Sesma ke Kepala Pusbangpeg, Kakanreg Bandung dan Makassar [tambahan] <p>Semester I 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Stock Opname Semester I Ttd Kakanreg III BKN Bandung - Laporan Stock Opname Semester II Ttd Kakanreg III BKN Bandung - Laporan Stock Opname Semester II di Ttd Kakanreg IV BKN Makassar - Laporan Stock Opname per Semester di Ttd Kepala Pusbang ASN
8	<p>Pengelolaan Aset Tetap pada Tiga Satuan Kerja BKN Belum Tertib.</p>	<p>Semester I 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Biro Umum <p>Semester I 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto Bukti Melakukan Pengamanan Fisik Bangunan - Laporan BMN 2023

Penanggungjawab

Laporan Pengguna Barang Tahunan

Per 30 Juni 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



[Handwritten signature]
HARYOMO DWI PUTRANTO

LAMPIRAN XI

Monitoring Tindak Lanjut Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK

**Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara**

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindaklanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
1	2022	<u>Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021</u>	Pengelolaan aset tetap berupa tanah pada Kanreg II BKN Surabaya belum memadai dan terdapat kekurangan pembayaran tanah yang dilepas sebesar Rp4.738.507,83	BPK merekomendasikan Plt. Kepala BKN agar menginstruksikan KPA pada Biro Umum Kantor Pusat BKN dan Kanreg II BKN Surabaya untuk: a. Menindaklanjuti permintaan dari pihak ketiga untuk melakukan pemecahan sertifikat tanah yang telah dilunasi.	Semester II 2022: - S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II Semester II 2023: - Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut - Pemecahan sertifikat [belum]	Belum Sesuai		Melakukan pemecahan sertipikat.
2				b. Melakukan penertiban atas tanah milik BKN yang digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga.	Semester II 2022: - S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II Semester I 2023: - Surat ke Warga untuk merenovasi Pagar Rumah; Semester II 2023: - Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut - Penertiban lahan [belum]	Belum Sesuai		Melakukan penertiban.
3	2023	<u>Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Efektifitas Pengadaan ASN TA</u>	SOP Tahap Perencanaan Pengadaan ASN Tahun 2021 Belum Lengkap dan Kegiatan Perencanaan yang Melibatkan Instansi di Luar BKN Belum Dijjukan dengan Service Level Agreement per Instansi kepada Instansi Terkait	BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN untuk: b. Memerintahkan Kepala PPSIASN dalam melakukan pengembangan aplikasi untuk meminta masukan dari pihak pengguna aplikasi SSCASN khususnya yang terlibat dengan kegiatan verifikasi dan validasi formasi ataupun kegiatan wasdal.	Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Kepala PPSIASN - Dok Masukan SSCASN dari pihak pengguna [belum]	Belum Sesuai		Kepala PPSIASN dalam melakukan pengembangan aplikasi akan meminta masukan dari pihak pengguna aplikasi SSCASN khususnya yang terlibat dalam kegiatan verifikasi dan validasi formasi serta kegiatan wasdal.
4				d. Berkoordinasi dengan Menteri PANRB dalam membuat SOP teknis rinci yang dilengkapi SLA untuk kegiatan penyediaan data penetapan kebutuhan ASN dari Menteri PANRB kepada BKN (unit terkait di BKN adalah Direktur PPSIASN dan PDPIK).	Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Direktur PPSIASN dan PDPIK - Konsep SOP oleh PDPIK Semester I 2024: - Surat Direktur PDPIK bahwa POS AP disahkan - POS AP Penyediaan Data Kebutuhan ASN - POS AP Penyediaan Data Kebutuhan ASN (Terdapat Nomor & Tanggal)	Pengajuan Sesuai		Direktur PPSIASN dan Direktur PDPIK akan berkoordinasi dengan Menteri PANRB dalam membuat SOP teknis rinci yang dilengkapi SLA untuk kegiatan penyediaan data penetapan kebutuhan ASN dari Menteri PANRB kepada BKN.
5				e. Berkoordinasi dengan BSSN, BPKP, Kementerian PANRB, dan Kemendikbudistek dalam membuat SOP teknis rinci yang dilengkapi SLA untuk kegiatan proofreading.	Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Kepala PPSS - Dokumentasi telah berkoordinasi [belum]	Belum Sesuai	Semester I 2024: Memasukkan surat koordinasi ke BSSN, BPKP, Kementerian PANRB, dan Kemendikbudistek dalam membuat SOP teknis rinci yang dilengkapi SLA untuk kegiatan proofreading	Kepala PPSS untuk berkoordinasi dengan BSSN, BPKP, Kementerian PANRB, dan Kemendikbudistek dalam membuat SOP teknis rinci yang dilengkapi SLA untuk kegiatan proofreading.
6			Sistem pada Tahap Perencanaan Pengadaan ASN Belum Sepenuhnya Optimal dalam Mendukung Proses Bisnis Kegiatan Perencanaan Pengadaan ASN.	BPK merekomendasi Kepala BKN untuk: a. Memerintahkan Direktur PPSIASN: 1) mendokumentasikan pengembangan aplikasi SSCASN secara memadai; 2) mengidentifikasi satker yang terlibat dalam dokumen UAT dan meminta masukan dari user terkait pada saat pengujian aplikasi yang melibatkan user; dan 3) membuat data warehouse yang memadai untuk penyajian di Dashboard.	Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Kepala PPSIASN - Dokumentasi pengembangan aplikasi SSCASN [belum] - Masukan dari user saat pengujian aplikasi [belum] - Data warehouse memadai [belum]	Belum Sesuai		Kepala BKN memerintahkan agar: a. Direktur PPSIASN untuk: 1) mendokumentasikan pengembangan aplikasi SSCASN secara memadai; 2) mengidentifikasi satker yang terlibat dalam dokumen UAT dan meminta masukan dari user terkait pada saat pengujian aplikasi yang melibatkan user; 3) membuat data warehouse yang memadai untuk penyajian di Dashboard.
7			Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS tidak Selaras dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PNS.	BPK merekomendasi Kepala BKN membuat Petunjuk Teknis Pengadaan ASN yang mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang masa sanggah.	Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala ke Direktur Pengadaan dan Kepangkatan ASN Semester II 2023: - Bahan Revisi Petunjuk Teknis Pengadaan PNS - Petunjuk Teknis Pengadaan ASN [belum]	Belum Sesuai	Akhir Semester II 2023: Masih berupa bahan	Kepala BKN akan menginstruksikan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan ASN berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk menyusun Petunjuk Teknis Pengadaan ASN dalam hal masa sanggah yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.
8			SOP Tahapan Pelaksanaan Seleksi ASN Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk: a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengadaan PNS secara rinci/detail untuk Panitia Pengadaan ASN dan Panitia Pengadaan Instansi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012.	Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala ke Direktur Pengadaan dan Kepangkatan ASN Semester II 2023: - Bahan Revisi Petunjuk Teknis Pengadaan PNS - Petunjuk Teknis Pengadaan ASN [belum]	Belum Sesuai	Akhir Semester II 2023: Masih berupa bahan Akhir Semester II 2024: Menunggu hasil RPP, jika substansi masih selaras dapat dilanjutkan membuat juknis. Namun jika substansi berbeda makan akan distatus "tidak dapat diTL"	Kepala BKN memerintahkan : a. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan ASN berkoordinasi dengan pihak yang terkait agar menetapkan Petunjuk Teknis Pengadaan PNS secara rinci atau detail untuk pembagian tugas/ tanggung jawab antara Panitia Pengadaan BKN dan Panitia Pengadaan Instansi sesuai dengan ketentuan SOP yang diatur pada Permpenan 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindaklanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
9				<p>b. Memerintahkan Penanggung Jawab Dukungan TI, Pengelolaan Data dan Kearsipan membuat SOP teknis terkait mekanisme seleksi pengadaan ASN dan melengkapinya dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan denah/alur seleksi bagi peserta seleksi. 2) Mekanisme tatacara penempatan peserta seleksi dari dan ke ruangan steril. 3) Mekanisme pencadangan jaringan. 4) Mekanisme pengecekan sarana dan prasarana ujian CAT. 5) Mekanisme pengawasan ruangan ujian dan peserta seleksi oleh Panitia Seleksi BKN. 	<p>Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Kepala PPSS</p> <p>Semester I 2024: - SOP Pelaksanaan Seleksi CASN</p>	Pengajuan Sesuai		<p>b. Penanggung Jawab Dukungan TI, Pengelolaan Data dan Kearsipan membuat SOP sesuai dengan ketentuan SOP yang diatur pada Permenpan 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan untuk mengatur hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Denah Ujian yang Disediakan oleh Instansi Pusat dan Daerah; 2. SOP Tata Cara Penempatan Peserta Seleksi di Ruangan Steril; 3. SOP Teknis Pengecekan PC Client dari Software yang tidak Sesuai Ketentuan dan Kondisi yang dapat Membatalkan Pelaksanaan Seleksi; 4. SOP Pembatasan Jaringan selain Penggunaan Jaringan Aplikasi CAT BKN; 5. SOP Penguncian dan Penyegelan ruang ujian; 6. SOP Teknis Pengecekan Kesesuaian Jumlah Fisik Peserta di Ruang Tes dengan Data Peserta yang login di aplikasi CAT; 7. SOP Hak dan Tanggung Jawab Pemanfaatan Rekaman CCTV; 8. SOP Penggantian dan Pemindahan PC Ujian yang tidak digunakan. 9. SOP Pengawasan Ruang Ujian dan Peserta Seleksi oleh Panitia Seleksi BKN.
10			<p>Pelaksanaan Kegiatan pada Tahapan Seleksi Pengadaan ASN Tidak Sesuai Ketentuan</p>	<p>BPK merekomendasi Kepala BKN untuk memerintahkan:</p> <p>a. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP teknis bagi verifikasi BKN yang memastikan adanya persetujuan pelaksanaan SKB tambahan instansi dari Kementerian PANRB. 2) SOP teknis kegiatan rekonsiliasi data hasil integrasi SKD dan SKB yang mengatur terkait apa saja yang menyebabkan rekonsiliasi tambahan bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan sesuai ketentuan. 	<p>Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Kepala PPSS</p> <p>- SOP [belum]</p>	Belum Sesuai		<p>Kepala BKN memerintahkan agar:</p> <p>a. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP teknis bagi verifikasi BKN yang memastikan adanya persetujuan pelaksanaan SKB tambahan instansi dari Kementerian PANRB. 2) SOP teknis kegiatan rekonsiliasi data hasil integrasi SKD dan SKB yang mengatur terkait apa saja yang menyebabkan rekonsiliasi tambahan bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan sesuai ketentuan.
11				<p>b. Kepala PPSS untuk mendokumentasikan pengembangan aplikasi CAT.</p>	<p>Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Kepala PPSS</p> <p>Semester I 2024: - Dokumentasi Pengembangan CAT</p>	Pengajuan Sesuai		<p>Kepala PPSS untuk mendokumentasikan proses pengembangan aplikasi CAT berupa dokumen kebutuhan pengguna atas sistem/aplikasi yang dibuat (user requirement) secara tertulis, change request, ataupun laporan monitoring dan evaluasi dari aplikasi CAT</p>
12			<p>Terdapat Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 pada Tahap Penetapan NIP yang Tidak Selaras dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk merevisi Juknis Pengadaan PNS terkait klausul Penetapan NIP.</p>	<p>Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Direktur Pengadaan dan Kepangkatan ASN</p> <p>Semester II 2023: - Bahan Revisi Petunjuk Teknis Pengadaan PNS</p> <p>- Revisi Petunjuk Teknis Pengadaan ASN [belum]</p>	Belum Sesuai	<p>Akhir Semester II 2023: Masih berupa bahan</p>	<p>Kepala BKN akan menginstruksikan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan ASN berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk menyusun Petunjuk Teknis Pengadaan ASN dalam hal mekanisme penggantian peserta yang mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri/meninggal dunia yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.</p>
13			<p>Belum Semua Bidang membuat Laporan Kegiatan Pengadaan ASN.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menginstruksikan:</p> <p>a. Penanggung Jawab Administrasi dan Publikasi, Penanggung Jawab Dukungan TI, Pengelolaan Data dan Kearsipan serta Penanggung Jawab Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan</p>	<p>Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Penanggung Jawab Administrasi dan Publikasi, Penanggung Jawab Dukungan TI, Pengelolaan Data dan Kearsipan serta Penanggung Jawab Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP</p> <p>Semester II 2023: - Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan ASN Tahun 2022 (Dengan Informasi tambahan mengenai keterisian formasi, perbedaan nomenklatur dan kode kualifikasi pendidikan, serta informasi lainnya)</p> <p>Semester I 2024: - SK Tim Panselnas (Sebagai panduan memeriksa substansi dalam laporan)</p> <p>- Laporan dengan tambahan penunjuk halaman pada Daftar Isi tiap kewenangan Penanggung Jawab</p>	Pengajuan Sesuai		<p>Kepala BKN menginstruksikan:</p> <p>a. Penanggung Jawab Administrasi dan Publikasi, Penanggung Jawab Dukungan TI, Pengelolaan Data dan Kearsipan serta Penanggung Jawab Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN.</p>

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	TindakanJudit	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
					- Nota Dinas Penyampaian Laporan Pengadaan CASN beserta Lapornya - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab			
14			Laporan Kegiatan Belum Disampaikan dan Belum Bisa Dimanfaatkan Secara Optimal oleh Pihak-Pihak yang Berkepentingan.	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk: a. Memasukkan informasi mengenai formasi PNS yang tidak terisi pada instansi pusat dan daerah, Informasi Perbedaan Nomenklatur dan Kode Kualifikasi Pendidikan dalam formasi, serta informasi lainnya yang berguna dalam perencanaan kebutuhan ASN atau informasi lain yang berguna untuk bidang strategis nasional.	Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Ketua Bidang Pelaporan Semester II 2023: - Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan ASN Tahun 2022 (Dengan Informasi tambahan mengenai keterisian formasi, perbedaan nomenklatur dan kode kualifikasi pendidikan, serta informasi lainnya) Semester I 2024: - Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan ASN Tahun 2023 - Nota Dinas Penyampaian Laporan Pengadaan CASN beserta Lapornya	Pengajuan Sesuai	Akhir Semester II 2023: Informasi berupa total secara keseluruhan (Nasional), belum menunjukkan detail tiap formasi sesuai instansi. Dapat dilengkapi melalui Laporan Seleksi terbaru ataupun menambahkan berupa lampiran penjelasan tabel hal 42 pada Laporan 2022 yang sudah ada	Kepala BKN menginstruksikan: a. Ketua Bidang Pelaporan untuk memasukkan informasi mengenai formasi PNS yang tidak terisi pada instansi pusat dan daerah, Informasi Perbedaan Nomenklatur dan Kode Kualifikasi Pendidikan dalam formasi, serta informasi lainnya yang berguna dalam perencanaan kebutuhan ASN atau informasi lain yang berguna untuk bidang strategis nasional.
15				b. Menyampaikan laporan kegiatan pengadaan ASN kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambil kebijakan terkait perencanaan dan distribusi ASN dan pihak lain yang berkepentingan.	Semester I 2023: - Surat Perintah Plt. Kepala BKN ke Ketua Bidang Pelaporan Semester II 2023: - Nota Dinas Penyampaian Laporan Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 Semester I 2024: - Bukti Tanda Terima Email Penerimaan Laporan dari DJA - Nota Dinas Penyampaian Laporan Pengadaan CASN beserta Lapornya	Pengajuan Sesuai	Akhir Semester II 2023: Belum ada bukti kirim (Surat/Paket/dll)	b. Ketua Bidang Pelaporan menyampaikan laporan kegiatan pengadaan ASN kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambil kebijakan terkait perencanaan dan distribusi ASN dan pihak lain yang berkepentingan.
16	2023	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2022	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tunjangan Kinerja Pegawai BKN Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk mengenakan tarif pajak atas penghasilan tukin sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan melaporkan penghasilan tukin sebagai komponen penghasilan tetap berikut nilai pajak atas penghasilan tukin yang dipotong ke dalam form 1721-A2.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama dan Kepala Biro Keuangan Semester II 2023: - Surat Penyampaian Progres oleh Kepala Biro Keuangan - Surat Sesma ke Kepala Biro Keuangan Semester I 2024: - Pengenaan tarif pajak atas tunjangan kinerja dan pemotongan tukin dalam form 1721-A2 (Sampel Bukti Potong Pajak Pegawai) - Dokumen bukti pengenaan tarif pajak penghasilan atas tunjangan kinerja - Pengenaan tarif pajak atas tunjangan kinerja dan pemotongan tukin dalam form 1721-A2 (Sampel Bukti Potong Pajak Pegawai) - Pengenaan tarif pajak atas tunjangan kinerja dan pemotongan tukin dalam form 1721-A2 (Sampel Bukti Potong Pajak Pegawai TA 2024 Pusbang & 14 Kanreg)	Belum Sesuai	Semester I 2024: Surat keterangan penghasilan belum	Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk mengenakan tarif pajak atas penghasilan tukin sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan melaporkan penghasilan tukin sebagai komponen penghasilan tetap berikut nilai pajak atas penghasilan tukin yang dipotong ke dalam form 1721-A2.

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindaklanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
17			Peraturan tentang Tukin BKN Tidak Selaras dengan Peraturan Disiplin Pegawai Terkait Hukuman dan Belum Terdapat Pemotongan Tukin Terhadap Pegawai yang Presensi tanpa Melalui Aplikasi Presensi LBP	BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Kepala Biro SDM untuk: a. Menyelaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Biro Sumber Daya Manusia Semester I 2024: - Surat Tanggapan Karo SDM bahwa Penyesuaian Peraturan akan Dilakukan Ketika PP Gaji dan Tugangan Berlaku - Peraturan pemberian dan pembayaran tukin [belum]	Belum Sesuai		Kepala BKN memerintahkan Kepala Biro SDM berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk: a. Menyelaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
18				b. Menyusun kebijakan terkait batasan dan sanksi terhadap pegawai yang lupa mengisi daftar hadir	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Biro Sumber Daya Manusia Semester I 2024: - Surat Tanggapan Karo SDM bahwa Kebijakan Sudah Berupa Draft dan Disampaikan Kepada Karo Humas untuk Disesuaikan Format Peraturan yang Berlaku - Kebijakan tentang batasan dan sanksi pegawai lupa mengisi daftar hadir (Keputusan Kepala BKN No. 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai BKN)	Pengajuan Sesuai		b. Menyusun kebijakan terkait batasan dan sanksi terhadap pegawai yang lupa mengisi daftar hadir
19			Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA terkait untuk: a. Memerintahkan PPSPM melakukan pembayaran Belanja Pegawai mengacu pada ketentuan yang berlaku.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Pusat BKN dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN) Semester II 2023: - Surat Tanggapan KPA PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Surat Kapusbang ke PPSPM - Surat KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Keuangan memerintahkan PPSPM, Kasubag Belanja Pegawai, dan PPABP Semester I 2024: - Surat Perintah Karo Keuangan ke PPSPM - Tanda Terima PPSPM Pusat - Bukti Setor Rp.390.000 terhadap Nama (Inisial) DHW - Bukti Setor Rp.3.090.000 terhadap Nama (Inisial) IH, AD, HA, MA, YK, JN - Bukti Setor Rp.360.000 terhadap Nama (Inisial) RH - Bukti Pembayaran/Pemotongan (PPSPM Pusat, Pusbang, Jogja)	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Bukti pembayaran/pemotongan Pusbang	Kepala BKN menginstruksikan KPA terkait untuk: a. Memerintahkan PPSPM melakukan pembayaran Belanja Pegawai mengacu pada ketentuan yang berlaku.
20				b. Memerintahkan Kepala Subbagian Belanja Pegawai Kantor Pusat, dan PPABP Kanreg terkait agar cermat dalam menghitung besaran pembayaran kepada pegawai.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Pusat BKN, Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, dan Kantor Regional I BKN Yogyakarta) Semester II 2023: - Surat Perintah Kakanreg I BKN Yogyakarta ke PPABP - Surat Tanggapan KPA PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Surat Kapusbang ke PPABP - Surat KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Keuangan memerintahkan PPSPM, Kasubag Belanja Pegawai, dan PPABP Semester I 2024: - Surat Perintah Karo Keuangan ke Kasubag Belanja Pegawai	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Tanda terima ke kasubag belanja pegawai	b. Memerintahkan Kepala Subbagian Belanja Pegawai Kantor Pusat, dan PPABP Kanreg terkait agar cermat dalam menghitung besaran pembayaran kepada pegawai.

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	TindakanJlnt	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
					- Sampel bukti dukung perhitungan pembayaran - Tanda Terima			
21			Pembayaran Uang Lembur Tidak Didukung dengan Bukti Kehadiran Real Time dari Aplikasi Presensi LBP	BPK merekomendasikan Kepala BKN: a. Menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Kantor Regional III BKN Bandung dan Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Semester II 2023: - Surat Tanggapan Kepala PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Surat Kepala PusBangPeg ASN ke Kepala Biro SDM perihal Teknis Jam Kerja Lembur Semester I 2024: - Surat Kakanreg Bandung ke Kepala Biro SDM perihal Penggunaan LBP untuk Lembur Pegawai - Surat Tanggapan Karo SDM terhadap Surat Kakanreg Bandung - Surat Tanggapan Karo SDM terhadap Surat Kepala PusBangPeg ASN [belum]	Belum Sesuai	Semester I 2024: Surat tanggapan Pusbang belum dilampirkan	Kepala BKN menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk: a. Berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.
22				b. Menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk mengimplementasikan dan mengendalikan kedisiplinan presensi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Kantor Regional III BKN Bandung dan Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Semester I 2024: - Bukti pelaksanaan lembur hari sabtu di Kanreg III BKN Bandung sudah menggunakan LBP - Bukti pelaksanaan lembur sabtu minggu di PusBangPeg ASN sudah menggunakan LBP [belum]	Belum Sesuai	Semester I 2024: Bukti lembur hari sabtu minggu sudah pakai LBP (ST Lembur dan Printout LBP), jika tidak ada lembur dapat melampirkan absen pegawai yang masuk di Sabtu atau minggu.	b. Mengimplementasikan dan mengendalikan kedisiplinan presensi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23			Terdapat Kelebihan Pembayaran Enam Paket Pekerjaan Belanja Barang sebesar Rp34.777.156	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA pada satker terkait untuk: a. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN lebih cermat dalam menyusun HPS.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum memerintahkan PPK Biro Umum Semester I 2024: - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum - Tanda Terima PPK Biro Umum	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Tanda terima ke PPK biro umum belum dilampirkan	Kepala BKN menginstruksikan KPA pada satker terkait untuk: a. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN lebih cermat dalam menyusun HPS.
24			Terdapat Indikasi Kemahalan Harga 14 Paket Pekerjaan pada Kantor Pusat BKN Sebesar Rp174.898.775	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN selaku KPA untuk: a. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN dan Direktorat PPU lebih cermat dalam membuat HPS dan mengendalikan pekerjaan.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum dan Dir. PPU Semester I 2024: - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum dan PPK Dit. PPU - Tanda Terima PPK Dit. PPU - Tanda Terima PPK Biro Umum	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Tanda terima ke PPK Biro umum belum dilampirkan	Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN selaku KPA untuk: a. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN dan Direktorat PPU lebih cermat dalam membuat HPS dan mengendalikan pekerjaan.
25				b. Memerintahkan PPK Direktorat INTI membuat HPS mengacu kepada SBM.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Dir. INTI Semester I 2024: - Surat Perintah Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Dit. INTI - Tanda Terima Surat Perintah	Pengajuan Sesuai		b. Memerintahkan PPK Direktorat INTI membuat HPS mengacu kepada SBM.
26			Pengenaan Pajak atas Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruang	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan: a. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN memastikan: 1) Bendahara pengeluaran di masing-masing satker dapat memahami aturan dan mengimplementasikan perpajakan sesuai ketentuan.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Semester II 2023: - Bukti bahwa PPH23 telah disetor oleh Oemah Kecebong Yogyakarta atas kegiatan Fullday meeting Rakor Permasalahan Kepegawaian wilker Kanreg X Denpasar BKN bulan Mei 2022 - Tanda Terima Surat Perintah (Manado)	Belum Sesuai	Akhir Semester II 2023: belum sesuai, belum didukung bukti setor yang memadai Akhir Semester I 2024: Bukti bahwa PPH23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg V BKN Jakarta dengan KPP setempat (3 Paket Meeting) [belum]	Kepala BKN menginstruksikan : a. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN untuk mensosialisasikan ketentuan perpajakan terkait Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruang Hotel;

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	TindakanJudit	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
					<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah KPA Kanreg V BKN Jakarta ke PPK dan Bendahara - Surat Penyampaian Tanggapan oleh Kakanreg IV BKN Makassar bahwa telah menegur Bendahara Pengeluaran dan berkoordinasi dengan Pihak Hotel - Surat Tanggapan KPA PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Bukti bahwa PPh23 telah disetor oleh PusBangPeg ASN atas kegiatan 2023 - Surat Perintah Sesma ke KPA terkait Semester I 2024: - Surat Perintah Kakanreg III BKN Bandung ke Bendahara Pengeluaran - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg III BKN Bandung dengan KPP setempat (3 Paket Meeting) [belum] Tidak perlu bertanya karena temuan Kanreg Bandung berupa kelebihan potong. - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg XIV BKN Manokwari dengan KPP setempat (1 Paket Meeting) - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg IV BKN Makassar dengan KPP setempat (8 Paket Meeting) - Bukti pembayaran kekurangan PPh23 PusBangPeg ASN (5 Paket Meeting) - Surat permintaan bukti setor PPh 23 Kanreg Makassar - Bukti pembayaran kekurangan PPh23 Kanreg IV BKN Makassar 			
27				b. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang dimiliki BKN.	Semester I 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama - Surat Perintah Sesma ke Kepala Biro Keuangan Semester I 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Bukti penyesuaian aplikasi SIAVA - Screen record penyesuaian aplikasi SIAVA 	Pengajuan Sesuai		b. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap aplikasi SIAVA sebagai alat kontrol kelengkapan dokumen.
28			Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal pada Dua Unit Kerja Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA BKN Kantor Pusat dan KPA Kanreg III BKN Bandung memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal dimasa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.	Semester I 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional III BKN Bandung) - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum dan Kakanreg Bandung Semester I 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Kakanreg III BKN Bandung ke Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Surat Perintah KPA Kanreg III BKN Bandung ke PPK - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum - Tanda Terima PPK Biro Umum - Bukti perbaikan oleh PPK Kanreg III BKN Bandung yang menunjukkan penyusunan pengadaan melaksanakan tahap survei harga 	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Tanda terima PPK Biro Umum dan PPK Kanreg Bandung belum	Kepala BKN menginstruksikan KPA BKN Kantor Pusat dan KPA Kanreg III BKN Bandung memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal dimasa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.
29			Dua Paket Pekerjaan pada Biro Umum Dilaksanakan Mendahului Kontrak	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA Kantor Pusat BKN memerintahkan PPK dan pejabat pengadaan Biro Umum untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian pekerjaan.	Semester I 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum 	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Tanda terima PPK Biro Umum [belum]	Kepala BKN menginstruksikan KPA Kantor Pusat BKN memerintahkan PPK dan pejabat pengadaan Biro Umum untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian pekerjaan.

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	TindakanJut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
					Semester I 2024: - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum dan Pejabat Pengadaan Biro Umum - Tanda Terima PPK Biro Umum			
30			Terdapat Indikasi Kemahalan Pengadaan Paket Router pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk: a. Menginstruksikan PPK PPSS lebih cermat dalam melakukan survei kewajaran harga, menentukan HPS, mengendalikan pelaksanaan pengadaan dan memasukkan biaya pengiriman dalam kontrak pekerjaan.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Pusat PPSS Semester I 2024: - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK PPSS - Tanda Terima Surat Perintah	Pengajuan Sesuai		Kepala BKN untuk: a. Menginstruksikan PPK PPSS lebih cermat dalam melakukan survei kewajaran harga, menentukan HPS, mengendalikan pelaksanaan pengadaan dan memasukkan biaya pengiriman dalam kontrak pekerjaan.
31				b. Melaporkan kepada LKPP bahwa dalam e-katalog ada barang yang sudah discontinued dan harga tidak sesuai harga pasar.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Pusat PPSS Semester I 2024: - Notulen bukti oleh PPK PPSS bahwa telah melaporkan ke LKPP - Surat Kepala BKN ke LKPP (barang discontinued) [belum]	Pengajuan Sesuai	(turun belum sesuai)	b. Melaporkan kepada LKPP bahwa dalam e-katalog ada barang yang sudah discontinued dan harga tidak sesuai harga pasar.
32			Pengelolaan Kas Pada Tiga Satker BKN Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN: a. Selaku KPA Kantor Pusat BKN untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN Semester I 2024: - BA Cash Opname - Bukti perbaikan yang dilakukan - Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024 Agar melampirkan Bukti ada perbaikan pengelolaan kas dari Bendahara (turun belum sesuai)	Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN: a. Selaku KPA Kantor Pusat BKN untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran.
33				b. Memerintahkan Kakanreg III BKN Bandung dan Kakanreg VI BKN Medan untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Regional III BKN Bandung dan Kantor Regional VI BKN Medan) Semester I 2024: - Surat Perintah Sesma ke Kakanreg III BKN Bandung dan Kakanreg VI BKN Medan - BA Cash Opname Kanreg VI BKN Medan - Lampiran BA Cash Opname Kanreg VI BKN Medan (Keadaan Brankas) - BA Cash Opname Kanreg III BKN Bandung - Bukti perbaikan yang dilakukan	Pengajuan Sesuai		b. Memerintahkan Kakanreg III BKN Bandung dan Kakanreg VI BKN Medan untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran.
34				c. Memerintahkan Kakanreg VI BKN Medan supaya Kepala Subbagian Keuangan pada Kanreg VI BKN Medan tertib dalam menggunakan brankas yang ditempatkan pada unit kerjanya.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Regional VI BKN Medan - Surat Perintah Kepala Kantor Regional VI BKN Medan ke Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Semester I 2024: - Surat Perintah Sesma ke Kakanreg VI BKN Medan - BA Cash Opname Kanreg VI BKN Medan - Bukti perbaikan yang dilakukan	Pengajuan Sesuai		c. Memerintahkan Kakanreg VI BKN Medan supaya Kepala Subbagian Keuangan pada Kanreg VI BKN Medan tertib dalam menggunakan brankas yang ditempatkan pada unit kerjanya.
35			Keterlambatan Penyetoran Pajak yang Dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada Kanreg III BKN Bandung Sebesar Rp53.531.877	BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama menginstruksikan Kakanreg III BKN Bandung: a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran secara cermat.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama Semester I 2024: - Surat Perintah Sesma ke Kakanreg Bandung - BA Cash Opname Kanreg III BKN Bandung - Bukti perbaikan yang dilakukan - Bukti perbaikan (Surat Pernyataan) mengetahui Kakanreg Bandung [belum]	Pengajuan Sesuai	Surat pernyataan ditambah mengetahui Kakanreg Bandung	Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama menginstruksikan Kakanreg III BKN Bandung: a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran secara cermat.

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	TindakanJut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
36				b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk cermat dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan perbendaharaan.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama	Pengajuan Sesuai		b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk cermat dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan perbendaharaan.
					- Surat Perintah Sesma ke Kakanreg Bandung			
					Semester I 2024: - Sample bukti pajak yang disetor tepat waktu, kuitansi tanggal berapa dan setor pajaknya tanggal berapa (maksimal 1 bulan dari kuitansi)			
37			Penatausahaan Persediaan Pada BKN Belum Sepenuhnya Tertib	BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN agar menginstruksikan: a. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Umum segera menyusun POS pengelolaan persediaan yang mengatur secara rinci terkait penggunaan barang pada level satker dan menyosialisasikan kepada pengelola persediaan serta mengelola persediaan sesuai dengan ketentuan.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama Semester I 2024: - Surat Perintah Sesma ke Kepala Biro Umum - POS Pengelolaan Persediaan - Sosialisasi pengelolaan persediaan (ND, Pendistribusian SOP)	Pengajuan Sesuai		Kepala BKN agar menginstruksikan: a. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Umum segera menyusun POS pengelolaan persediaan yang mengatur secara rinci terkait penggunaan barang pada level satker dan menyosialisasikan kepada pengelola persediaan serta mengelola persediaan sesuai dengan ketentuan.
38				b. Kepala Kanreg III BKN Bandung memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Kantor Regional III BKN Bandung - Surat Perintah Sesma ke Kakanreg Bandung Semester I 2024: - Surat Perintah Kakanreg III BKN Bandung ke Pengelola Barang Persediaan - Bukti Diklat yang Diikuti Penanggung Jawab Persediaan Obat	Pengajuan Sesuai		b. Kepala Kanreg III BKN Bandung memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan.
39				c. Kepala Pusbang ASN, Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Kepala Kanreg IV BKN Makassar melakukan pemantauan secara berkala pengelolaan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kepala Kantor Regional III BKN Bandung, dan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar - Surat Perintah Sesma ke Kepala Pusbangpeg, Kakanreg Bandung dan Makassar [tambahan] Semester I 2024: - Laporan Stock Opname Semester I Ttd Kakanreg III BKN Bandung - Laporan Stock Opname Semester II Ttd Kakanreg III BKN Bandung - Laporan Stock Opname Semester II di Ttd Kakanreg IV BKN Makassar - Laporan Stock Opname per Semester di Ttd Kepala Pusbang ASN	Pengajuan Sesuai		c. Kepala Pusbang ASN, Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Kepala Kanreg IV BKN Makassar melakukan pemantauan secara berkala pengelolaan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.
40			Pengelolaan Aset Tetap pada Tiga Satuan Kerja BKN Belum Tertib	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan kepada: a. Sekretaris Utama BKN untuk memerintahkan: 1) Kepala Biro Umum BKN supaya melakukan pengamanan bangunan dan gedung. 2) Kepala Bagian Barang Milik Negara BKN Pusat menyajikan informasi yang lengkap dalam Laporan BMN BKN Pusat.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Biro Umum Semester I 2024: - Foto Bukti Melakukan Pengamanan Fisik Bangunan - Laporan BMN 2023	Pengajuan Sesuai		Kepala BKN menginstruksikan kepada: a. Sekretaris Utama BKN untuk memerintahkan: 1) Kepala Biro Umum BKN supaya melakukan pengamanan bangunan dan gedung. 2) Kepala Bagian Barang Milik Negara BKN Pusat menyajikan informasi yang lengkap dalam Laporan BMN BKN Pusat.

Jakarta, 15 Juli 2024

Mengetahui,
Inspektur

Ditandatangani Secara Elektronik
Dedi Herdi



2024



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur

Telp. (021) 8092423/80930008 Fax. (021) 8010301

www.bkn.go.id